

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

2025
—
2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas izin dan ridhoNya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagai dokumen penting diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta. Gambaran tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja yang disusun berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan hasil telaahan telah kami susun dalam rangka menangani permasalahan sosial di Provinsi DKI Jakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta dapat terwujud.

Jakarta, September 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta

The image shows a circular official stamp of the Social Welfare Office (Dinas Sosial) of the DKI Jakarta Provincial Government. The stamp features the text "PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA" at the top and "DINAS SOSIAL" at the bottom. In the center is a shield emblem with a scale of justice and the words "JAYA RAYA". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Iqbal Akbarudin

NIP 197301151998031003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Dasar Hukum 9

1.3 Maksud dan Tujuan..... 11

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 13

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial..... 13

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial..... 15

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial..... 18

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 20

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial..... 33

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.2.2 Rumusan Isu Strategis..... 60

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 67

3.1.1 Tujuan detail Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial..... 69

3.1.2 Sasaran detail Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial..... 71

3.2 Strategi Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Tahun 2025-2029..... 74

3.2.1 Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran 74

3.2.2 Penjabaran tahapan..... 74

3.3 Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Tahun 2025-2029..... 76

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029..... 77

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL ... 83**

4.1 Uraian Program 83

4.2 Uraian Kegiatan 85

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 89

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 147

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 149

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029
Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 149

BAB V P E N U T U P..... 158

BAB VI LAMPIRAN..... 159

6.1 *Critical Success Factor* 159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial..... 17

Gambar 2.2 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020–2030 35

Gambar 2.3 Peta Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Jakarta Tahun 2023 36

Gambar 2.4 Grafik Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2030..... 36

Gambar 2.5 Grafik Angka Kelahiran dan Kematian Jakarta Tahun 2014–2024..... 37

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Jakarta
Tahun 2019–2023 38

Gambar 2 .7 Indeks Gini, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Jakarta
Tahun 2019–2023 39

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2019–2023..... 40

Gambar 2.9 Grafik Indeks Risiko Bencana Indonesia dan Jakarta Tahun 2020–2024 56

Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran dan Titik Pos Damkar 58

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Dinas Sosial 2025-2029..... 69

Gambar 3.2a Pohon Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 78

Gambar 3.2b Pohon Kinerja Program Pemberdayaan Sosial 79

Gambar 3.2c Pohon Kinerja Program Penanganan Bencana 79

Gambar 3.2d Pohon Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan 80

Gambar 3.2e Pohon Kinerja Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan 80

Gambar 3.2f Pohon Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial..... 80

Gambar 3.2g Pohon Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi..... 81

Gambar 3.2h Pohon Kinerja Program Rehabilitasi Sosial 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 18

Tabel 2.2 Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... 19

Tabel 2.3 Realisasi Pembangunan Jangka Menengah di Jakarta..... 20

Tabel 2.4 Penjangkauan dan Pemulangan Orang Terlantar di DKI Jakarta
Target Tahunan dan Angka Realisasi di TW 4 Tahun 2025 23

Tabel 2.5 Jumlah Warga Binaan Sosial di Panti Sosial..... 23

Tabel 2.6 Kondisi Bangunan Panti Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 26

Tabel 2.7 Potensi Risiko Bencana Alam Jakarta..... 56

Tabel 2.8 Potensi Risiko Bencana Non Alam (Kebakaran) Jakarta 57

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial 66

Tabel 3.1 Tujuan Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Sosial 2025-2029 70

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Sosial 2025-2029 71

Tabel 3.3 Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial 2025-2029..... 73

Tabel 3.4 Lima Penahapan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial..... 75

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial
Tahun 2025-2029..... 76

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta
Tahun 2025-2030..... 90

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta
Tahun 2025-2029..... 124

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 147

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2030 149

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2030 149

Tabel 6.1 Tujuan Renstra dan Critical Success Factor..... 159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memancang fondasi filosofis yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya, termuat dengan tegas bahwa negara memikul tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini tidak sekadar menjadi rumusan normatif, melainkan menjadi orientasi nilai yang mengikat seluruh kebijakan dan praktik pemerintahan. Dalam kerangka inilah, kesejahteraan sosial tidak diposisikan sebagai hasil ikutan dari pembangunan ekonomi semata, tetapi sebagai hak fundamental warga negara yang wajib dijamin oleh negara secara aktif dan terus-menerus.

Kesejahteraan sosial adalah manifestasi konkret dari kehadiran negara. Ia mewujud dalam bentuk layanan yang menyentuh kebutuhan dasar dan martabat manusia, terutama bagi kelompok yang berada dalam kondisi paling rentan: fakir miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, korban kekerasan, korban bencana, hingga individu dan keluarga yang mengalami disfungsi sosial. Pelayanan terhadap kelompok-kelompok ini bukan sekadar urusan administratif atau teknis, melainkan cerminan dari keberpihakan negara terhadap keadilan dan kesetaraan sosial.

Pelaksanaan amanat ini semakin menemukan bentuknya melalui sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara mendistribusikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan sosial. Urusan sosial ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Hal ini menandai bahwa daerah bukan hanya pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga pengambil keputusan utama dalam merancang dan mengimplementasikan program sosial yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Bagi Provinsi DKI Jakarta, tanggung jawab ini memiliki dimensi yang lebih kompleks. Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, tetapi juga sebagai kota megapolitan yang menjadi rumah bagi lebih dari sepuluh juta jiwa dengan karakteristik sosial yang sangat beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan sosial di Jakarta berkembang cepat dan dinamis. Tekanan urbanisasi, ketimpangan ekonomi, pergeseran demografi menuju populasi lansia, serta meningkatnya kebutuhan akan sistem perlindungan sosial yang inklusif menjadi perhatian utama. Meskipun data menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,30% pada Maret 2024 atau sekitar 464,93 ribu jiwa, angka tersebut masih menyimpan ketimpangan spasial dan sosial antarwilayah di Jakarta. Target ambisius untuk menurunkan angka ini menjadi 2,08–3,08% pada tahun 2029 menandakan perlunya transformasi serius dalam pendekatan dan strategi pembangunan sosial.

Transisi Jakarta dari ibu kota negara menuju kota global juga memunculkan tantangan struktural dan peluang baru. Peran Jakarta sebagai simpul aktivitas manusia, ekonomi, budaya, dan teknologi harus diimbangi dengan sistem pelayanan sosial yang tangguh dan tanggap. Dalam konteks ini, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 menjadi sangat krusial. Renstra bukan sekadar dokumen formal, tetapi peta jalan (roadmap) bagi penyelenggaraan urusan sosial di Jakarta yang harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dengan pendekatan strategis, terukur, dan berorientasi hasil.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai poros utama. Dalam RPJMD tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi terkoneksi erat dengan tujuan pembangunan yang lebih luas seperti pengurangan kesenjangan, penguatan masyarakat sipil, peningkatan kualitas layanan dasar, dan pembangunan kota layak huni yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Renstra juga dirancang agar selaras dengan visi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Tahun 2025–2045, serta mengikuti ketentuan teknis dari berbagai regulasi perencanaan seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017, Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025, dan Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based), partisipatif, dan adaptif. Dinas Sosial tidak hanya meninjau data statistik seperti tren kemiskinan, indeks pembangunan sosial, atau profil demografi kelompok rentan, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat, menjaring masukan dari pemangku kepentingan, dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi instrumen perencanaan yang hidup, relevan, dan operasional.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberpihakan, Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kuat bagi upaya mewujudkan Jakarta yang lebih berdaya, berkeadilan, dan berempati. Dinas Sosial hadir sebagai garda depan yang bukan hanya merespons permasalahan sosial, tetapi juga secara proaktif membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada yang lemah. Dengan arah kebijakan yang terstruktur dan komitmen pelaksanaan yang kuat, Jakarta bergerak menuju masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan bermartabat untuk semua.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
17. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Didaerah Kab/Kota;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
30. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
31. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
32. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
34. Keputusan Gubemur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025- 2029 yaitu:

1. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode tahun 2025-2029; dan
2. Sebagai acuan Unit Kerja Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab I Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025-2029 dimulai dengan latar belakang yang mendasari perencanaan dan nilai strategis penyusunan Rencana Strategis, serta masa bakti atau periodesasi kepala daerah. Bagian dasar hukum menjelaskan acuan hukum dalam perencanaan Rencana Strategis, sementara hubungan antar dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD juga dijelaskan. Selanjutnya, bagian maksud dan tujuan menjabarkan arah perencanaan, diikuti dengan sistematika penulisan yang menunjukkan bagaimana setiap bab pada Rencana Strategis mendukung pencapaian RPJMD secara bertahap.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial

Pada Bab ini berisi mengenai peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Dokumen di dalamnya memuat matrik tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dokumen di dalamnya memuat: tahapan pembangunan daerah, tabel penentuan strategi, mapping strategi, matrik arah kebijakan dan matrik analisis SWOT.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial bukan hanya sebuah langkah administratif, melainkan sebuah upaya strategis yang mendalam dan berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk menciptakan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, dengan memperhatikan setiap aspek kebutuhan sosial, mulai dari perlindungan sosial yang berkeadilan hingga pemberdayaan bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Misi utama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang terpinggirkan, dapat meraih kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Perlindungan sosial menjadi salah satu elemen krusial dalam mencapai tujuan ini. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada, yang sering kali bersifat multidimensional. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, perlindungan sosial yang berkeadilan harus mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan, dengan pendekatan yang tidak hanya memastikan kesejahteraan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup sosial mereka secara menyeluruh.

Secara lebih mendalam, perlindungan sosial yang berkeadilan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keberlanjutan bagi warga negara, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok miskin dan rentan. Perlindungan ini berfungsi sebagai jaringan pengaman yang mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam jurang kemiskinan. Namun, perlindungan sosial bukan hanya soal menjaga mereka dari kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial mereka. Hal ini membuka ruang bagi mereka untuk berkembang, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), salah satu prinsip dasar negara ini adalah pemberdayaan penduduk miskin dan rentan, dengan mengutamakan martabat manusia dan asas kemanusiaan. Dalam konteks ini, perlindungan sosial yang berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah, sebagai penggerak utama kebijakan, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif dan aplikatif.

Sustainable Development Goals (SDGs) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016, menjadi pedoman global yang relevan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengurangan ketimpangan. Khususnya, SDGs menyarankan untuk:

1. No poverty (Tanpa Kemiskinan): Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Zero hunger (Tanpa Kelaparan): Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Reduced inequalities (Pengurangan Ketimpangan): Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam satu negara maupun antar negara.
4. Partnership for the goals (Kemitraan untuk Tujuan): Memperkuat implementasi dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian SDGs di Indonesia terkait erat dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Bappenas, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pencapaian SDGs di Indonesia, mengembangkan indikator dan pilar-pilar yang mendukung pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Indonesia menyadari bahwa pencapaian ini memerlukan kerja sama tidak hanya antar lembaga pemerintah, tetapi juga dengan sektor swasta dan masyarakat luas. Pencapaian SDGs merupakan tanggung jawab bersama, dan bukan hanya pemerintah pusat atau kementerian terkait yang harus terlibat, melainkan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai tujuan, sasaran, kebijakan pembangunan daerah, serta anggaran daerah. Salah satu sasaran utama RPJMD adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar, termasuk perlindungan sosial. Dalam hal ini, RPJMD memastikan bahwa pelayanan dasar yang melibatkan perlindungan sosial dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang paling membutuhkan.

Keterkaitan antar tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, menjadi sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 menekankan perlunya koordinasi dan pengelolaan yang baik dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih serta memastikan pencapaian yang optimal.

Dalam konteks Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, rencana strategis daerah ini selaras dengan prioritas nasional dan sejalan dengan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di bawah koordinasi Bappenas dan Kementerian Sosial RI, berbagai kebijakan terkait kesejahteraan sosial dirumuskan dan dievaluasi melalui forum-forum seperti Musrenbang. Forum-forum ini penting untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan berbagai program yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, khususnya di DKI Jakarta.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, program perlindungan sosial dapat memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Indonesia.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas Sosial memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan dasar yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan korban bencana atau kekerasan. Tugas utama Dinas Sosial meliputi penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan masalah sosial.

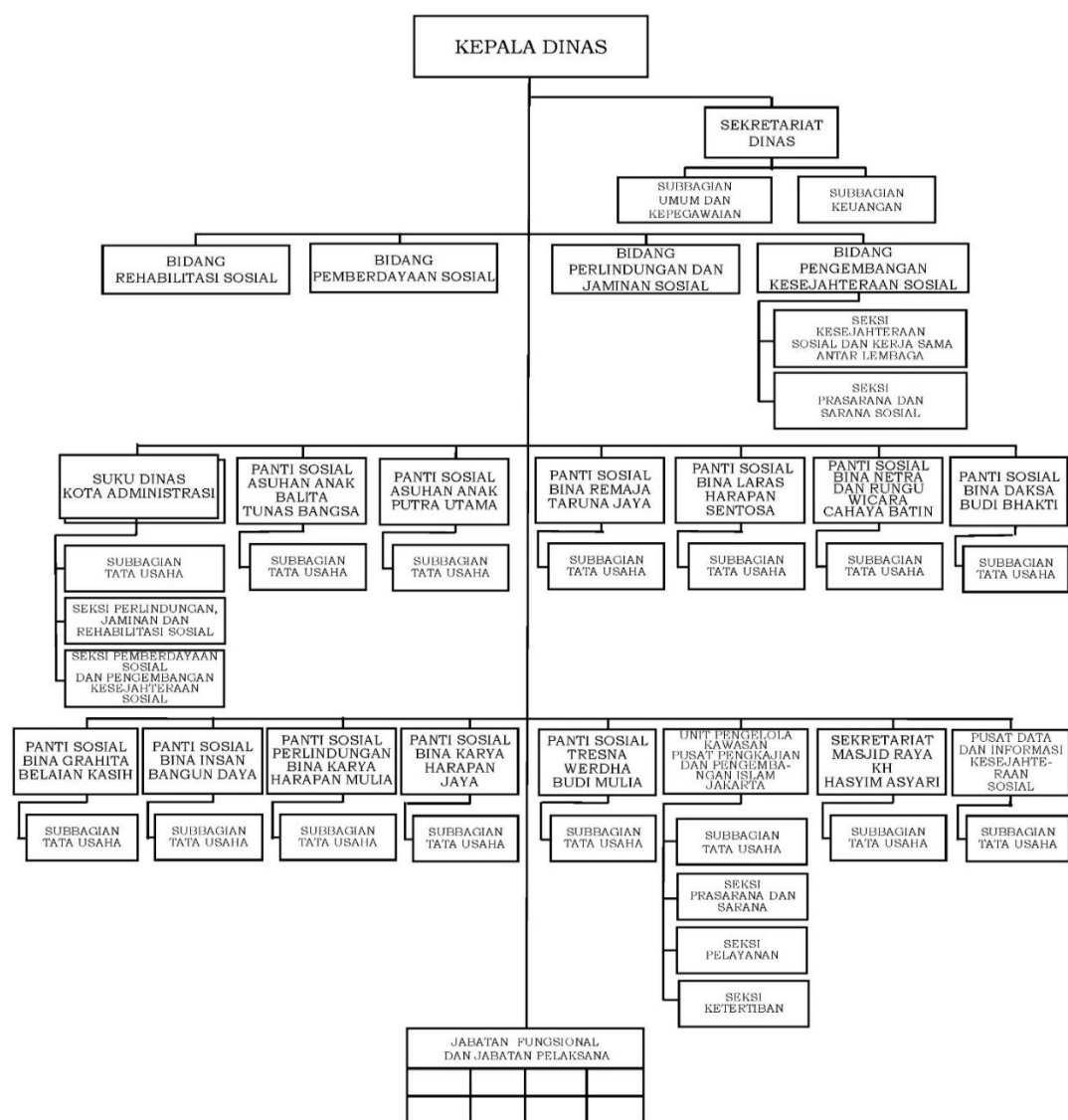
B. Fungsi

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Sosial;
4. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan atau instansi pemerintah/ swasta/ organisasi dalam pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang sosial;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial
12. pengembangan peran seta masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;

13. pengelolaan panti sosial;
14. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial
16. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
17. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru /rehab total/ rehab berat/ rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
20. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah;

C. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Selain itu, pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangan nya, terdiri atas:

1. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
2. Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan pada Suku Dinas Sosial Kota; dan
3. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis;

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial.

Sumber daya sosial atau kesejahteraan sosial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan, bila dilandasi asas profesional. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada dua sumber daya sosial yaitu; (i) sumber daya manusia, dan (ii) kelembagaan sosial.

Menurut PP No. 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber daya manusia pekerjaan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/atau perlindungan sosial (Pasal 69 dan Pasal 72).

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi secara; pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka

Adapun rincian jumlah pegawai ASN pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 595 orang, yang terdiri dari 588 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

No	Kategori	Keterangan	Jumlah	Total
1	Golongan	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	595
		Pembina Utama (IV/c)	1	
		Pembina Tk. I (IV/b)	28	
		Pembina (IV/a)	25	
		Penata Tk. I (III/d)	76	
		Penata (III/c)	37	
		Penata Muda Tk. I (III/b)	112	
		Penata Muda (III/a)	119	
		Pengatur Tk. I (II/d)	46	
		Pengatur (II/c)	99	
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	26	
		Pengatur Muda (II/a)	15	
		Juru Tk I (I/d)	2	
		IX (PPPK)	7	
2	Pendidikan	Strata III (S-3)	3	595
		Strata II (S-2)	59	
		Strata I (S-1)	260	
		Diploma IV	46	
		Diploma III	57	
		SMA sederajat	152	
		SMP sederajat	11	
		SD sederajat	7	
3	Jabatan	Jabatan Pratama Tinggi	1	595
		Jabatan Administrator	24	

No	Kategori	Keterangan	Jumlah	Total
		Jabatan Pengawas	38	
		Subkelompok	9	
		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	112	
		Jabatan Pelaksana	411	
4	Jenis Kelamin	Perempuan	312	595
		Laki-laki	282	
5	Agama	Islam	535	595
		Kristen	36	
		Katolik	20	
		Hindu	2	
		Budha	2	

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pegawai Non ASN (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan/PJLP), merupakan petugas pelaksana lapangan yang mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas layanan publik antara lain Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Mekanikal Elektrikal, Petugas Kesiapsiagaan Bencana, Petugas Pengawasan dan Pengendalian Sosial, Petugas Penanganan Sosial, Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dan Petugas Pendamping Jakpreneur dengan jumlah sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 2.726 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

NO	UKPD	Jumlah PJLP
1	Dinas Sosial	92
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	69
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	46
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	43
5	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	48
6	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	45
7	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	97
8	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	46
9	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	74
10	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	73
11	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	28
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	49
13	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	73
14	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	40
15	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	34
16	Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin	44
17	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	27
18	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	35
19	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	71
20	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	40
21	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	67
22	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	65

NO	UKPD	Jumlah PJLP
23	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	46
24	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	801
25	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari	73
26	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	97
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	96
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	116
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	114
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	82
31	UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	95
Total		2.726

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Indikator rencana strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2020-2024 telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Pembangunan Jangka Menengah di Jakarta

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	63,35	69,81	N/A	N/A	N/A
2	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	5,01	4,85	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah Keluarga Miskin yang Mandiri	Keluarga	2.496	4.815	6.044	N/A	N/A
4	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jiwa	4.576	5.513	5.241	7.345	5.985
Standar Pelayanan Minimam (SPM) Sosial							
5	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	87,02	99,936	99,952
6	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	89,79	99,988	97,613
7	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	89,21	100	100
8	Jumlah Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	100	100	100

9	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Persen	100	100	100	N/A	N/A
10	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	98,31	N/A	N/A
11	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	N/A	N/A
12	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	93,03	N/A	N/A
13	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	100	100	99,44	N/A	N/A
14	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	99,44	N/A	N/A
15	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	N/A	N/A	N/A	98,958	99,993
16	Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menghadapi dinamika yang kompleks dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Kompleksitas ini dipicu oleh beberapa faktor utama: dampak multidimensi pandemi COVID-19, percepatan urbanisasi, serta perubahan kebijakan nasional dan regional yang menuntut reformulasi indikator serta pendekatan pelayanan. Di tengah situasi tersebut, kinerja Dinas Sosial mencerminkan adanya pergeseran paradigma: dari pendekatan kuantitatif yang menekankan cakupan luas, ke arah pendekatan yang lebih presisi dan berbasis kualitas layanan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial.

1. Perubahan Indikator Kinerja dan Capaian Umum: Menuju Reformulasi Strategis

Beberapa indikator kinerja yang awalnya menjadi tolok ukur utama, seperti persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dan

persentase penanganan PMKS, menunjukkan capaian positif pada tahun 2020 dan 2021. Misalnya, cakupan bantuan sosial untuk PMKS meningkat dari 63,35% pada 2020 menjadi 69,81% pada 2021.

Perubahan ini dapat dimaknai sebagai upaya koreksi arah kebijakan: dari sekadar menambah jumlah penerima bantuan ke arah penjaminan kualitas intervensi yang berkelanjutan. Salah satu indikator transformatif, yaitu jumlah keluarga miskin yang mandiri, mencatat lonjakan dari 2.496 keluarga (2020) menjadi 4.815 keluarga (2021). Ini mencerminkan keseriusan awal dalam membangun sistem graduasi bantuan sosial. Namun, ketiadaan data kelanjutan menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan sistem monitoring yang mampu melacak keberlanjutan kemandirian eks penerima bantuan sosial, alih-alih hanya mencatat pencapaian jangka pendek.

2. Pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS): Responsif, namun Belum Stabil

Data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga menunjukkan tren yang menarik. Angka ini mengalami peningkatan dari 4.576 jiwa pada 2020 menjadi puncaknya di 7.345 jiwa pada 2023, sebelum menurun kembali menjadi 5.985 jiwa pada 2024. Peningkatan tajam di tahun 2023 dapat dikaitkan dengan dampak lanjutan pandemi, inflasi, serta ketidakpastian ekonomi urban yang membuat lebih banyak kelompok masyarakat jatuh dalam kategori rentan.

Namun, fluktuasi ini juga menunjukkan bahwa sistem data kesejahteraan sosial Jakarta masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya adaptif. Ketika jumlah PPKS meningkat, respon layanan berhasil ditingkatkan, namun tidak disertai dengan mekanisme antisipatif atau pemetaan risiko secara prediktif. Ini mengindikasikan bahwa Jakarta memerlukan sistem informasi sosial yang real time dan berbasis risiko, agar mampu mengenali potensi lonjakan kerentanan sebelum krisis terjadi.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial: Konsistensi dan Kualitas Layanan Dasar

Di sisi lain, capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial memperlihatkan keberhasilan yang konsisten dan menunjukkan bahwa Dinas Sosial berhasil menjaga kualitas pelayanan dasar meskipun di tengah tekanan eksternal. Seluruh indikator utama pada tahun 2020 dan 2021 berada pada capaian 100%, mencerminkan kesiapan dan kapasitas layanan panti dan non panti. Walaupun terdapat penurunan capaian di tahun 2022 (misalnya rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti turun ke 87,02%), namun pemulihan yang cepat pada 2023 dan 2024 hingga mencapai kembali 99,952% membuktikan resiliensi sistem pelayanan dasar sosial Jakarta.

Kinerja positif dalam capaian SPM sosial juga tercermin dari indikator operasional yang lebih teknis, seperti penjangkauan dan pemulangan orang terlantar. Data berikut

memperlihatkan bahwa, meskipun terdapat disparitas kapasitas antarwilayah, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja di atas target, bahkan beberapa melampaui 100%. Hal ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan lapangan yang tidak hanya mampu merespons kebutuhan, tetapi juga proaktif dalam menjangkau kelompok rentan.

Tabel 2.4 Penjangkauan dan Pemulangan Orang Terlantar di DKI Jakarta
Target Tahunan dan Angka Realisasi di TW 4 Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target Tahunan	Realisasi TW4 Tahun 2025	
			Jumlah	Persentase
1	Dinas Sosial	3200	3200	100,00%
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	900	1614	179,33%
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	800	886	110,75%
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	600	805	134,17%
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	900	1122	124,67%
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	200	728	364,00%
	Total	6600	8355	126,59%

Keterangan:

Penjangkauan PPKS dilakukan oleh Dinas Sosial dan lima suku dinas, sedangkan pemulangan orang terlantar hanya dilakukan Dinas Sosial Jadi realisasi 3200 di Dinas Sosial adalah gabungan dari penjangkauan PPKS & pemulangan orang terlantar

Capaian signifikan tersebut juga didukung oleh daya tampung dan efektivitas operasional panti-panti sosial yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial. Realisasi jumlah Warga Binaan Sosial (WBS) di berbagai panti menunjukkan rata-rata capaian di atas target tahunan. Ini mencerminkan kesiapan lembaga dalam menampung dan merehabilitasi berbagai kelompok sasaran, serta kesesuaian antara perencanaan kebutuhan dan kapasitas aktual layanan sosial yang tersedia.

Tabel 2.5 Jumlah Warga Binaan Sosial di Panti Sosial
Milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Nama Panti Sosial	Target Tahunan	Realisasi TW 4 Tahun 2025	
			Jumlah WBS	Persentase
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	153	175	114,38%
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	140	150	107,14%
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	150	130	86,67%

No	Nama Panti Sosial	Target Tahunan	Realisasi TW 4 Tahun 2025	
			Jumlah WBS	Persentase
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	145	143	98,62%
5	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	175	175	100,00%
6	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	420	424	100,95%
7	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	300	312	104,00%
8	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	800	861	107,63%
9	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	540	782	144,81%
10	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	150	167	111,33%
11	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	770	813	105,58%
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	1200	1239	103,25%
13	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	570	575	100,88%
14	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	300	305	101,67%
15	Panti Sosial Bina Netra Dan Rungu Wicara Cahaya Batin	110	112	101,82%
16	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	100	114	114,00%
17	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	150	214	142,67%
18	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	290	254	87,59%
19	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	250	250	100,00%
20	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	435	462	106,21%
21	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	358	358	100,00%
22	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	290	312	107,59%
	Total	7796	8327	106,81%

Dengan capaian indikator layanan yang nyaris menyentuh 100% dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga keberlangsungan layanan dasar sekaligus menunjukkan arah transformasi kebijakan sosial. Hal ini menandakan bahwa struktur kelembagaan dan sistem operasional yang ada telah mencapai kematangan tertentu

dalam merespons kebutuhan kelompok rentan, termasuk anak terlantar, lanjut usia, dan gelandangan/pengemis. Salah satu indikator agregat yang patut dicatat adalah persentase penerima pelayanan dasar di luar panti yang mencapai 99,993% pada tahun 2024. Capaian ini merefleksikan keberhasilan strategi desentralisasi layanan yang semakin terarah pada pendekatan non-institusional dan berbasis komunitas.

Transformasi ini menandakan bahwa Jakarta tidak hanya menjaga cakupan layanan, tetapi juga secara aktif menggeser orientasi pelayanan ke arah sistem sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika urban. Pendekatan ini memperkuat resiliensi sosial kota dengan membangun jaringan dukungan yang tersebar dan tidak lagi terpusat hanya pada institusi panti. Dengan kata lain, keberhasilan Dinas Sosial tidak semata diukur dari terpenuhinya kuota layanan, melainkan dari keberhasilannya membangun fondasi sistem sosial baru yang lebih lentur, manusiawi, dan sesuai dengan kompleksitas masyarakat perkotaan modern.

Namun di balik capaian kuantitatif dan operasional yang tergambar dari tingginya persentase penerima layanan, masih terdapat tantangan mendasar yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya tertangani secara sistematis. Salah satu tantangan utama tersebut berkaitan dengan kondisi fisik sarana dan prasarana panti sosial yang menjadi tulang punggung pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial di DKI Jakarta.

Keberhasilan pelayanan sosial tidak semata ditentukan oleh terselenggaranya program atau tersalurkannya bantuan, tetapi juga sangat bergantung pada lingkungan fisik tempat intervensi tersebut dijalankan. Panti sosial bukan sekadar tempat tinggal sementara bagi warga binaan sosial (WBS), melainkan merupakan ruang pemulihan, penguatan psikososial, dan penyiapan kemandirian. Dengan demikian, kondisi bangunan yang aman, layak, sehat, dan mendukung kegiatan pembinaan adalah syarat minimum untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi.

Sayangnya, hasil inventarisasi terbaru menunjukkan bahwa sejumlah panti masih beroperasi dalam kondisi yang kurang ideal. Beberapa unit belum pernah mengalami peremajaan sejak pertama kali dibangun lebih dari dua dekade lalu. Ada pula yang telah mengalami rehabilitasi, namun secara teknis belum mampu mengakomodasi kebutuhan aktual jumlah penghuni, jenis layanan, maupun standar layanan sosial yang terus berkembang. Bahkan, ditemukan pula panti dengan klasifikasi kondisi "tidak baik" yang tetap beroperasi, menandakan adanya kesenjangan serius antara kualitas layanan yang diharapkan dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia.

Situasi ini semakin penting untuk diperhatikan mengingat meningkatnya kompleksitas masalah sosial perkotaan, serta dorongan reformasi sistem pelayanan sosial yang lebih manusiawi, inklusif, dan berbasis pemulihan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, program rehabilitasi sosial akan sulit mencapai dampak jangka panjang, dan hanya berhenti pada pemenuhan layanan dasar secara administratif.

Maka dari itu, penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk tidak hanya mempertahankan tingkat layanan yang tinggi, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas panti sosial, baik yang berada dalam kondisi kurang layak maupun yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar selaras dengan dinamika kebutuhan sosial masyarakat urban saat ini. Langkah ini akan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan dan berbasis martabat manusia.

Tabel berikut menunjukkan kondisi bangunan panti sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, termasuk tahun pendirian dan riwayat rehabilitasi, serta klasifikasi kondisi bangunan saat ini:

Tabel 2.6 Kondisi Bangunan Panti Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Nama Panti	Jumlah WBS Eksisting	Data Bangunan Panti		Kondisi Saat Ini		
			Tahun Pendirian	Tahun Rehab Panti (RK, RS, RB)	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	90	1986	RB di 2011-2012			✓
	Taman Anak Sejahtera Pertiwi	25	1999	Belum Pernah	✓		
	Taman Anak Sejahtera Tat Twam Asi	30	1999	Belum Pernah			✓
	Taman Anak Sejahtera Arutala	25	1999	Belum Pernah			✓
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	140	1998	Belum Pernah	✓		
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	105	2000	RS di 2023			✓
				RB di 2012			✓
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	131	2003	RB di 2005		✓	
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	250	1996	RB di 2011 RS di 2019 RS di 2023		✓	
6	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2						
	PSTW BM 2 Cengkareng	347	1990	RB di 2013		✓	
	PSTW BM 2 Jelambar	104	1994	RB di 2013			✓
7	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	358	1965	RS di 2019			✓
8	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	290	2002	RB di 2024-2025	✓		

9	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	113	2000	RB di 2015			✓
	LBK (Loka Bina Karya) Jagakarsa		1999	RK di 2018			✓
10	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	824	1972	RB di 1998	✓		
11	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2						
	PSBL HS 2 Cipayung	507	1972	RS di 2015		✓	
	PSBL HS 2 Budi Murni	705	1999	2019 (bangun baru wisma Garuda)		✓	
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	570	1972	RS di 2006;			✓
13	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	300	2023	Belum pernah	✓		
14	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	297	1996	RB di 2014		✓	
15	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	800	2010	2019			✓
16	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	616	1978	RB di 2012 - 2013 RK di 2019		✓	
17	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	156	1993	RS di 2011	✓		
18	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	110	2000	RB di 2023			✓
19	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	150	1994	RS di 2015	✓		
20	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	178	1969	RB di 2001 dan 2024			✓
	Sasana Bina Daksa Pondok Bambu	0	1969	RB di 2023			✓
21	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	430	2023	Belum Pernah	✓		
22	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	219	2002	RS di 2024			✓

- Keterangan
- Tahun rehab panti bisa lebih dari satu kali terhitung dari tahun pendirian panti
 - RK=Rehab Kecil, RS=Rehab Sedang, RB=Rehab Berat

Dari data kondisi fisik panti sosial yang tersedia, terlihat dengan jelas bahwa meskipun sejumlah unit telah mengalami rehabilitasi sedang (RS) maupun berat (RB) dalam kurun waktu sepuluh hingga lima belas tahun terakhir, namun upaya tersebut belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. Terdapat beberapa panti yang belum pernah disentuh proses perbaikan sejak awal pendiriannya pada dekade 1980–1990-

an, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas lingkungan layanan antarunit yang signifikan.

Beberapa unit bahkan tercatat berada dalam kondisi "tidak baik", seperti *Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1* yang dibangun pada tahun 1972 dan terakhir direhabilitasi berat pada 1998, serta *Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya* yang terakhir mendapatkan rehabilitasi sedang pada 2011. Dua unit ini hingga saat ini masih digunakan untuk menampung warga binaan sosial dengan berbagai latar belakang masalah sosial psikologis, namun berada dalam kondisi yang secara fisik tidak memenuhi standar hunian layak, baik dari segi sanitasi, pencahayaan, sirkulasi udara, maupun keamanan struktural.

Situasi ini tentu berdampak langsung pada kualitas hidup WBS, mengingat mereka bukan hanya tinggal sementara, tetapi menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi dalam jangka waktu panjang. Lingkungan fisik yang tidak representatif dapat memperparah stres psikososial, menghambat proses pemulihan, serta memperburuk persepsi publik terhadap layanan sosial pemerintah.

Di sisi lain, unit baru seperti Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2, meskipun baru dibangun pada tahun 2023, belum pernah melalui proses audit teknis atau rehabilitasi minor yang umumnya diperlukan setelah tahap operasional awal. Hal ini membuka risiko jika ternyata terdapat ketidaksesuaian fungsi ruangan dengan kebutuhan aktual layanan disabilitas daksa, yang membutuhkan desain inklusif dan ramah akses.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan kualitas infrastruktur layanan sosial belum sepenuhnya tercapai, dan oleh karena itu diperlukan revitalisasi menyeluruh secara terencana dan bertahap terhadap seluruh unit panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi ini tidak cukup dilakukan secara tambal-sulam atau responsif terhadap kerusakan, tetapi harus didasarkan pada audit teknis menyeluruh, kajian kebutuhan layanan masa kini, serta proyeksi fungsi panti di masa depan.

Sebagai benchmark, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 1 yang baru saja direvitalisasi dengan dukungan hibah dari KOICA Korea pada tahun 2025, telah berhasil melakukan transformasi menyeluruh dari panti konvensional menjadi pusat rehabilitasi modern yang terintegrasi. Unit ini bukan hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga dirancang ulang secara fungsional agar mampu menyediakan berbagai layanan berbasis pemulihan dan pemberdayaan, termasuk ruang konseling, pelatihan vokasi, klinik kesehatan, dan ruang interaksi sosial.

Oleh karena itu, model PSBR Taruna Jaya 1 dapat dijadikan acuan pengembangan ulang seluruh panti sosial, dengan prinsip dasar: aman, sehat, ramah kelompok rentan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan sosial perkotaan. Revitalisasi panti harus dilihat sebagai bagian dari reformasi sistemik pelayanan sosial, bukan hanya proyek infrastruktur semata.

Dengan demikian, revitalisasi infrastruktur panti sosial harus menjadi salah satu pilar

utama strategi pelayanan sosial 2025–2029. Pendekatan ini penting tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam aspek fisik dan layanan, tetapi juga sebagai komitmen moral dan institusional terhadap martabat, kenyamanan, dan efektivitas proses rehabilitasi bagi seluruh warga binaan sosial di DKI Jakarta. Melalui perencanaan strategis yang menyeluruh, sinergi lintas sektor, dan pendanaan yang memadai, transformasi panti sosial Jakarta menjadi ruang pemulihan yang modern, manusiawi, dan berkualitas tinggi bukan hanya mungkin, tetapi menjadi keniscayaan.

Namun, di tengah dinamika sosial perkotaan yang kian kompleks, mulai dari urbanisasi cepat, disparitas sosial, pergeseran struktur keluarga, hingga munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru, pelayanan sosial tidak bisa terus bergantung pada pendekatan institusional yang konvensional. Ketergantungan pada panti sebagai pusat utama rehabilitasi dan perlindungan sosial tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan Jakarta hari ini. Selain kapasitasnya yang terbatas, pendekatan institusional juga kurang fleksibel untuk menjangkau kelompok rentan yang tinggal di lingkungan informal, permukiman padat, atau kawasan pinggiran kota yang minim infrastruktur sosial.

Dalam konteks ini, penguatan layanan rehabilitasi sosial luar panti menjadi bukan hanya opsi, tetapi keharusan strategis. Model ini memungkinkan respons sosial yang lebih cepat, berbasis kedekatan geografis, dan lebih berakar pada kebutuhan spesifik komunitas. Penguatan ini hanya dapat dilakukan bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sosial, secara serius membangun sistem pelayanan sosial berbasis wilayah yang kokoh, dengan Suku Dinas Sosial di lima wilayah kota administrasi sebagai pilar utamanya.

Salah satu terobosan yang mulai digagas adalah pendirian Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) dan Taman Anak Sejahtera (TAS) di seluruh kecamatan. UILS tidak sekadar menjadi pusat informasi, tetapi dirancang sebagai nerve center layanan sosial lokal yang mampu mengidentifikasi kebutuhan secara real-time, menerima pengaduan, serta memberikan rujukan cepat dan tepat kepada unit layanan terkait. Ini merupakan langkah maju menuju sistem sosial yang evidence-based, responsif, dan partisipatif. Sementara itu, TAS hadir menjawab kebutuhan spesifik anak-anak dari keluarga prasejahtera, menyediakan layanan komprehensif mulai dari stimulasi dini, penguatan pengasuhan, hingga perlindungan dari risiko kekerasan dan pengabaian. Kehadiran TAS memperlihatkan bahwa sistem sosial yang tangguh dimulai sejak masa anak-anak.

Lebih jauh, wacana pengembangan rumah singgah di lima wilayah kota administrasi juga perlu dikonkretkan menjadi program strategis jangka menengah. Rumah singgah ini bukan hanya fasilitas transit bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), tetapi entry point menuju rehabilitasi yang lebih komprehensif dan bermartabat. Rumah singgah bisa menjadi tempat aman bagi lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan berbasis gender, atau warga marginal lainnya yang tidak memiliki akses langsung ke layanan sosial formal. Dengan lokasi yang terdesentralisasi, rumah singgah berperan krusial dalam

crisis response, menjembatani penjangkauan dan pemulihan, serta mencegah keterlambatan layanan yang bisa berujung pada krisis sosial lebih besar.

Langkah-langkah ini secara keseluruhan menunjukkan pergeseran paradigma dari layanan berbasis institusi besar ke arah ekosistem sosial yang tersebar, decentralized, dan terintegrasi secara horizontal. Rehabilitasi sosial luar panti bukan lagi dianggap sebagai pelengkap dari layanan utama, tetapi telah menjadi sumbu transformasi sistem kesejahteraan sosial yang lebih tanggap risiko, manusiawi, dan kontekstual. Melalui penyebaran UILS, TAS, dan rumah singgah, pelayanan sosial akan hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat urban yang dinamis dan beragam.

Inilah arah kebijakan sosial Jakarta 2025–2029: membangun sistem kesejahteraan sosial yang tidak hanya kuat secara institusi, tetapi juga cerdas secara spasial dan empatik secara sosial. Transformasi ini penting untuk memperkuat daya tahan kota dalam menghadapi krisis ekonomi, bencana, maupun gejolak sosial, dengan menempatkan layanan sosial sebagai *jaringan perlindungan hidup* yang tersebar, terhubung, dan mudah diakses oleh setiap warga—terutama yang paling rentan.

4. Implikasi Strategis: Dari Responsif ke Transformatif

Capaian-capaian tersebut secara umum menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial dalam menjaga stabilitas layanan dasar dan adaptasi terhadap tantangan pasca pandemi. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya ditopang oleh sistem pemantauan jangka menengah dan evaluasi dampak program. Dengan kata lain, validitas capaian jangka panjang belum dapat dipastikan tanpa sistem monitoring yang kuat.

Selain itu, dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta yang sangat urban dan dinamis, pendekatan berbasis institusi perlu dikombinasikan dengan pendekatan komunitas melalui pelibatan TKSK, PSM, LKS, serta pemanfaatan teknologi spasial dan digital dalam pelayanan sosial.

Berdasarkan analisis terhadap data kinerja lima tahun terakhir dan proyeksi tantangan ke depan, maka arah kebijakan pelayanan sosial Dinas Sosial DKI Jakarta dalam periode 2025–2029 sebaiknya difokuskan pada lima prioritas utama:

1. Pemantapan kualitas layanan berbasis SPM:

Capaian indikator SPM yang konsisten mencapai angka 100% selama tiga tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk pemantapan kualitas layanan. Namun demikian, capaian ini perlu ditransformasi dari sekadar angka administratif menjadi standar mutu layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Fokus utama:

- A. Memastikan bahwa seluruh kelompok rentan (disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban bencana, dan tuna sosial) tidak hanya mendapatkan layanan, tetapi juga mendapatkan layanan yang berkualitas dan manusiawi.
- B. Perluasan jangkauan layanan ke wilayah dengan kesenjangan akses seperti Kepulauan Seribu, kawasan padat penduduk, dan permukiman informal.
- C. Standarisasi SOP layanan di seluruh titik layanan panti dan non-panti agar tidak terjadi disparitas pelayanan antarwilayah.
- D. Penguatan sistem monitoring berbasis indikator mutu, termasuk client feedback sebagai tolok ukur evaluasi.

2. Penguatan outcome layanan berupa kemandirian sosial dan ekonomi:

Capaian rehabilitasi dan pemberdayaan harus mampu menjawab tantangan berulangnya penerima manfaat yang kembali masuk dalam sistem layanan. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus menggeser orientasi dari sekadar penjangkauan dan bantuan, menjadi pemulihan dan exit strategy yang jelas.

Fokus utama:

- A. Menyusun indikator hasil pasca-program, seperti jumlah keluarga miskin yang berhasil mandiri, unit usaha penerima bantuan yang beroperasi setelah 12 bulan, atau penerima pelatihan kerja yang terserap ke dunia usaha.
 - B. Konsolidasi data longitudinal untuk memantau perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat dari waktu ke waktu.
 - C. Penerapan sistem insentif berbasis progres, di mana penerima yang menunjukkan kemajuan kemandirian dapat dihubungkan ke program penguatan ekonomi atau kerja sama dengan pelaku usaha.
 - D. Mengembangkan pusat inkubasi sosial ekonomi berbasis komunitas lokal, sebagai laboratorium transisi dari ketergantungan menuju kemandirian.
3. Pengembangan model pelayanan sosial adaptif terhadap bencana dan krisis:

Meningkatnya jumlah kejadian bencana dan eskalasi dampak sosialnya, seperti terlihat pada lonjakan pengungsi tahun 2024, menunjukkan urgensi integrasi antara sistem pelayanan sosial dan kebijakan kebencanaan.

Fokus utama:

- A. Menyusun protokol layanan sosial darurat yang fleksibel, berbasis data spasial dan risiko, untuk merespons lonjakan kebutuhan dengan cepat dan efisien.
- B. Pemetaan titik rawan sosial-bencana seperti bantaran sungai, kawasan kumuh, dan zona banjir untuk penempatan shelter sementara dan distribusi bantuan.
- C. Penguatan kapasitas SDM sosial dalam konteks penanggulangan bencana, baik melalui pelatihan manajemen krisis, simulasi tanggap darurat, hingga pemanfaatan teknologi logistik.

- D. Integrasi bantuan sosial dalam skenario kontinjensi dan rencana pemulihan pasca-bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana dan instansi terkait.

4. Transformasi digitalisasi pelayanan sosial:

Di era digital, sistem pelayanan sosial harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses dari berbagai saluran. Transformasi digital bukan hanya soal penyediaan platform daring, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola pelayanan sosial yang menempatkan efisiensi, keterbukaan, dan inklusivitas sebagai prinsip utama.

Untuk itu, arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun ke depan harus difokuskan pada penguatan sistem digital yang mendukung seluruh tahapan pelayanan dari identifikasi penerima manfaat, asesmen kebutuhan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi berbasis data. Upaya ini harus didukung oleh roadmap transformasi digital yang menyeluruh, tetapi tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat dan kondisi lokal.

Fokus utama:

- A. Pengembangan sistem layanan sosial digital secara menyeluruh (end-to-end) yang memfasilitasi proses pendaftaran, asesmen kebutuhan, pemrosesan bantuan, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam satu sistem yang mudah digunakan dan terhubung secara lintas sektor.
- B. Pemanfaatan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis pola permintaan bantuan, mendeteksi potensi fraud, dan menyusun prioritas layanan.
- C. Sistem dashboard kinerja sosial yang dapat diakses publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.
- D. Penyederhanaan proses layanan dengan verifikasi NIK berbasis biometrik, integrasi dengan DTSEN, dan notifikasi status bantuan secara real-time.

5. Penguatan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

Tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Sinergi antaraktor menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan layanan.

Fokus utama:

- A. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dalam skema CSR berbasis wilayah, untuk membiayai kegiatan pemberdayaan dan penguatan komunitas.
- B. Melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk uji coba model intervensi sosial dan evaluasi dampak program berbasis ilmiah.
- C. Menyusun platform kolaboratif berbasis daring antara Dinas Sosial, LSM, kelompok agama, dan komunitas lokal, dengan pembagian peran dan peta program.
- D. Menyusun regulasi insentif kolaboratif, misalnya penghargaan bagi pelaku usaha sosial atau LSM yang berhasil menciptakan dampak signifikan.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan pelayanan sosial di DKI Jakarta tidak hanya memenuhi standar minimal nasional, tetapi menjadi model bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kinerja pelayanan sosial yang kuat akan menjadi pondasi bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi dan perubahan zaman.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada sejumlah permasalahan utama yang bersumber dari dinamika sosial perkotaan, capaian kinerja lima tahun terakhir, perubahan profil demografi, serta kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup aspek struktural, operasional, dan kelembagaan. Secara sistemik, tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam enam permasalahan utama berikut:

1. Ketimpangan Sosial sebagai Penghambat Transformasi Jakarta menjadi Kota Global

Fokus utama RPJMD DKI Jakarta 2023–2026 adalah menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya. Namun, untuk mewujudkan visi ini, Jakarta dihadapkan pada tantangan mendasar berupa ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, keterbatasan akses layanan dasar, dan risiko sosial yang tinggi. Jakarta belum sepenuhnya mampu menjamin inklusivitas dalam pembangunan, khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini menjadi hambatan strategis dalam proses transformasi menuju kota global yang sejati.

Pembangunan ekonomi tanpa pemerataan dan perlindungan sosial akan melahirkan kota yang rapuh—megah di luar, tapi ringkih di dalam. Ketimpangan Rasio Gini yang tinggi (0,431 pada 2023), peningkatan kedalaman kemiskinan di wilayah seperti Kepulauan Seribu, serta belum pulihnya angka kemiskinan ke tingkat pra-pandemi, memperlihatkan bahwa sistem sosial belum cukup adaptif. Ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan sosial belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan kota global.

Fokus daripada RPJMD yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya. Hal ini diturunkan ke dalam misi untuk mewujudkan pusat ekonomi inovatif yang didukung oleh pembangunan dan akses sumber daya yang merata. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dengan tujuan utama yakni terwujudnya kehidupan yang layak dan bermartabat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif.

Kota global merupakan kota yang berperan penting dalam mengintegrasikan ekonomi transnasional (menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global. Pengertian tersebut, disadur

berdasarkan diskursus beberapa praktisi dan akademisi yang juga tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai berikut:

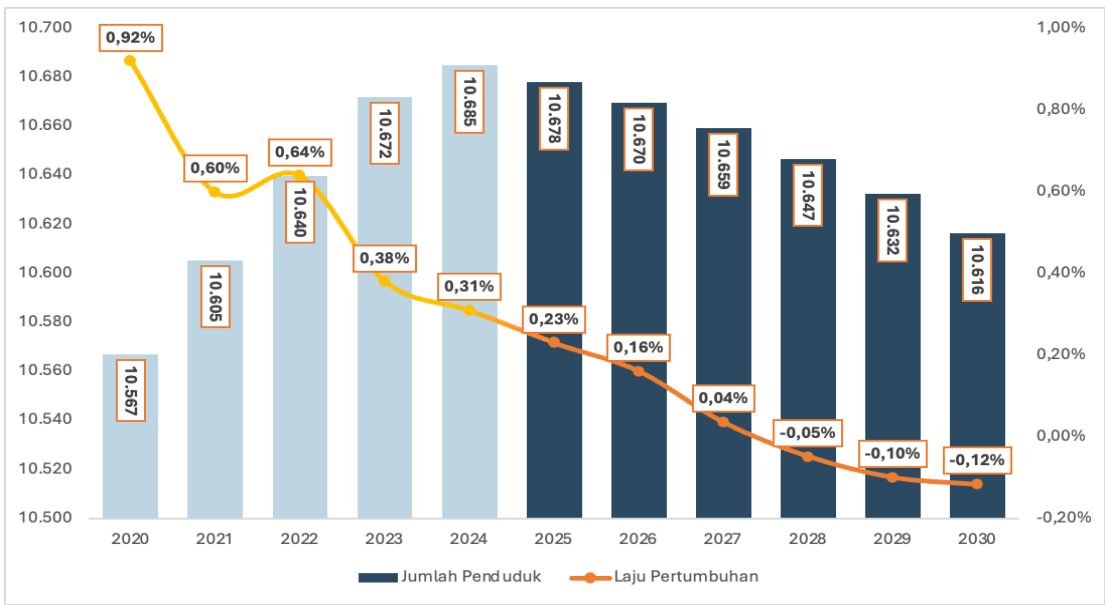
- A. Ann Markusen (1994), mendefinisikan kota global sebagai kota yang berhasil bersaing mendapatkan status kota besar dalam, setidaknya, salah satu fungsi penting dalam mengintegrasikan ekonomi kapitalis internasional
- B. Saskia Sassen (2006), mengartikan kota global merupakan simpul utama dari berbagai kota-kota di dunia dan memiliki hubungan yang mengikat dengan kota-kota lain, serta memiliki dampak langsung pada urusan sosio-ekonomi global
- C. Derek Gregory et. al, (2009), kota global adalah simpul utama dalam organisasi ekonomi dunia sebagai: pusat-pusat kendali ekonomi, produksi dan perdagangan, perputaran informasi, dan transmisi budaya, serta kekuatan politik
- D. Greg Clark (2016), kota global dicirikan oleh: (a) mendukung dan memiliki spesialisasi dari sektor yang diperdagangkan, (b) menarik dan mempertahankan wirausaha dengan populasi yang beragam, (c) mendorong inovasi untuk menciptakan pengaruh, (d) terdepan dalam penciptaan pasar, rute, produk, atau layanan baru, dan (e) memiliki keunggulan geopolitik

Namun, untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sejajar dengan pusat-pusat dunia seperti Singapura, Seoul, atau Tokyo, tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik dan sistem ekonomi yang kompetitif. Keberhasilan menjadi simpul utama dalam jaringan ekonomi global juga ditentukan oleh seberapa besar kemampuan kota dalam menjamin kesejahteraan seluruh warganya secara inklusif, khususnya kelompok rentan. Di sinilah tantangan besar Jakarta muncul.

Kota global yang ideal bukan hanya tempat bagi investasi dan inovasi, tetapi juga ruang hidup yang aman, adil, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial, kemiskinan, keterbatasan akses layanan dasar, serta risiko bencana yang tinggi menjadi hambatan struktural dalam proses transformasi ini. Dengan kata lain, penguatan sistem kesejahteraan sosial bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan prasyarat strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan Jakarta tidak timpang dan berkelanjutan. Untuk itu, penting menganalisis lebih dalam bagaimana dinamika kependudukan, distribusi kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan pembangunan kota menuju status global.

Kondisi kependudukan menjadi satu aspek vital dalam pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Seluruh aktivitas sosial dan ekonomi bahkan kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Profil kependudukan juga menjadi dasar perencanaan pembangunan pada seluruh tingkat administrasi pemerintahan termasuk wilayah Jakarta. Aspek pada profil demografi yang dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan di antaranya jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk berdasarkan wilayah administrasi, kepadatan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Seluruh profil demografi bersifat historis (tergantung ketersediaan data

profil) untuk seluruh aspek, hal ini sangat penting karena kondisi kependudukan dapat dilakukan proyeksi agar kebutuhan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang dapat terpenuhi dengan optimal. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Jakarta secara historis dapat dilihat pada Gambar berikut.

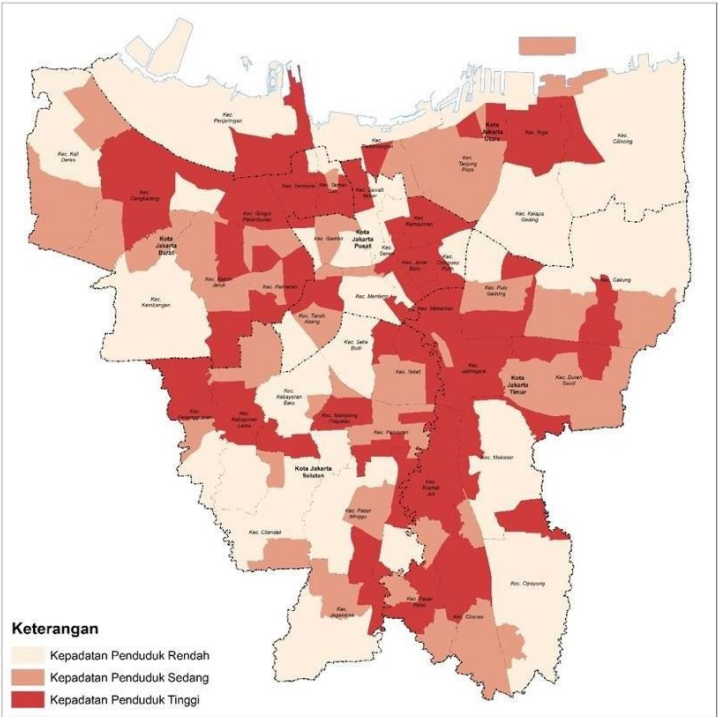


Gambar 2.2 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020–2030 (dalam ribu)

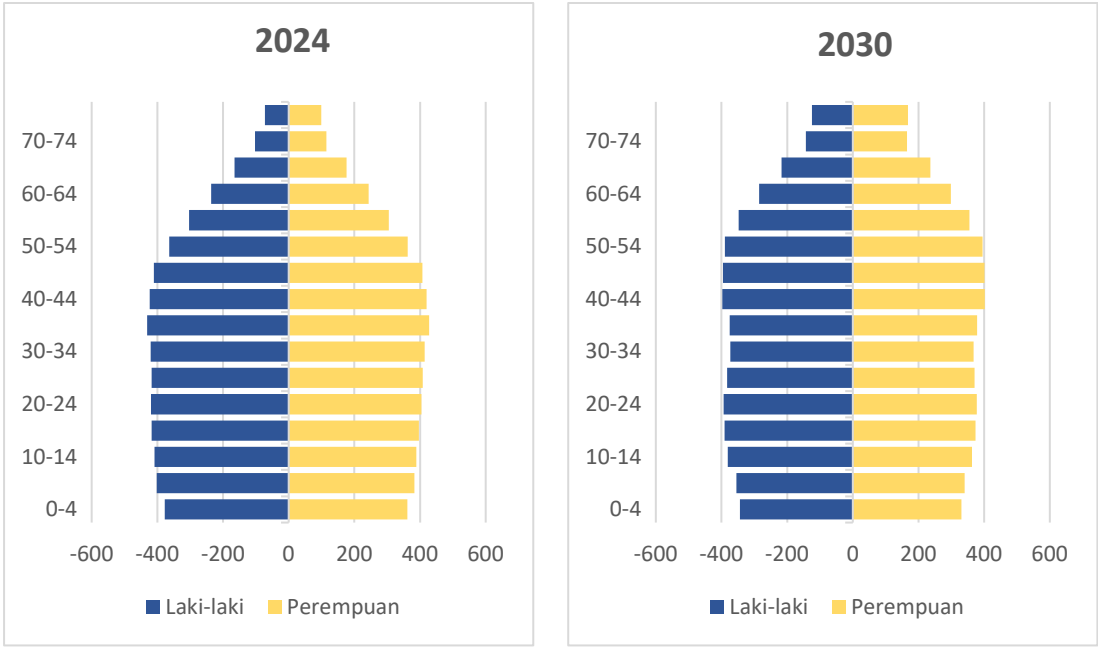
Berdasarkan data dari BPS Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 10,557 juta pada 2020 menjadi sebesar 10,685 juta jiwa di tahun 2025. Namun, setelah tahun tersebut, jumlah penduduk mulai menurun secara bertahap hingga mencapai 10,616 juta pada tahun 2030. Apabila dilihat secara lebih detail, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan yang drastis dari 0,92% pada 2020 menjadi negatif sejak 2028 (−0,05%) hingga −0,12% pada tahun 2030. Artinya, mulai 2028, jumlah penduduk Jakarta diperkirakan akan menyusut.

Proyeksi penurunan jumlah penduduk juga dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari kebijakan strategis pemerintah, termasuk relokasi ibu kota negara (IKN) dan upaya desentralisasi ekonomi dan administratif. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan keberhasilan awal dari kebijakan tersebut, meskipun implikasinya terhadap produktivitas dan ekonomi Jakarta perlu dievaluasi lebih lanjut. Lebih lanjut, penurunan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan menandakan bahwa Jakarta tengah memasuki fase post-urban growth atau kejenuhan urbanisasi. Ruang yang terbatas, mahalnya biaya hidup, serta tekanan lingkungan dan infrastruktur kemungkinan menjadi faktor pendorong migrasi keluar Jakarta, terutama ke wilayah penyangga (Bodetabek).

Migrasi yang dimaksud terjadi karena perkembangan daerah penyangga Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi terutama pada sektor infrastruktur, ekonomi, Pendidikan, serta transportasi. Secara administrasi wilayah di dalam wilayah daratan utama Jakarta, terdapat berbagai macam kondisi kepadatan penduduk yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Peta Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Jakarta Tahun 2023



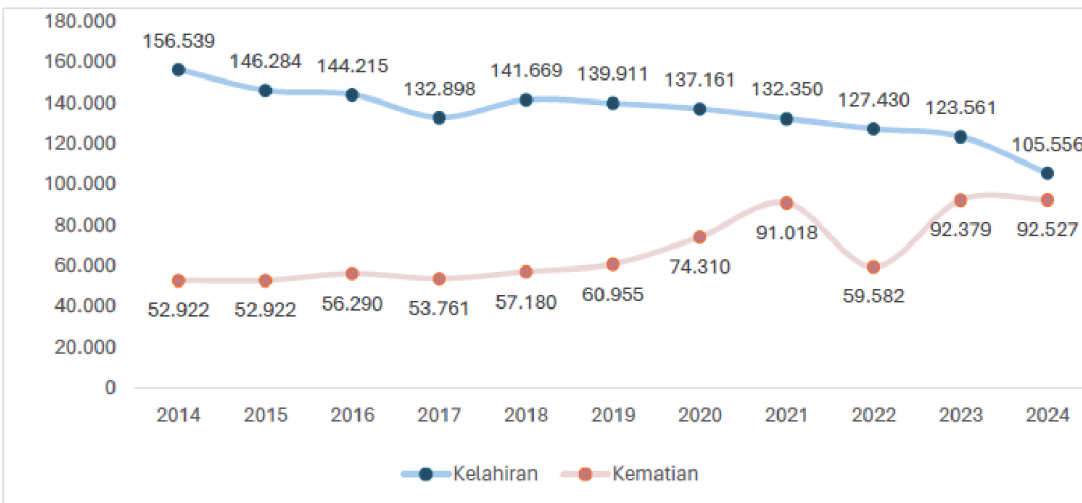
Gambar 2.4 Grafik Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2030

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Struktur demografi Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang cukup optimal. Basis piramida (usia muda 0–19 tahun) relatif lebar, menunjukkan proporsi anak-anak dan remaja yang cukup besar. Kelompok usia produktif (20–44 tahun) juga sangat dominan, menandakan bonus demografi sedang berlangsung. Di waktu yang sama, usia lanjut (60 tahun ke atas) juga masih relatif kecil. Sedangkan struktur demografi untuk tahun 2030 diproyeksikan memperlihatkan transisi dari struktur muda ke struktur menua. Basis piramida mulai menyempit, terutama kelompok usia 0–14 tahun, yang menunjukkan penurunan angka kelahiran. Kelompok usia produktif tetap besar, namun

bergeser ke atas, menandakan penuaan populasi. Bagian atas piramida (60 tahun ke atas) tampak membesar, menunjukkan peningkatan jumlah lansia. Singkatnya, DKI Jakarta sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur umur menuju populasi yang lebih tua. Hal ini menuntut kebijakan transformatif dalam berbagai sektor—dari perencanaan kota, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan—untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Komponen demografi lainnya yaitu angka kelahiran dan angka kematian, kedua kondisinya secara umum dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



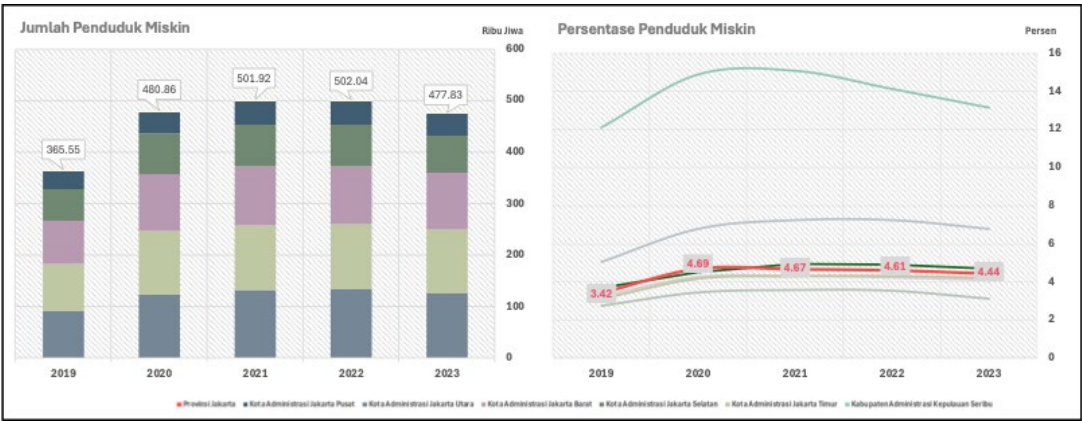
Gambar 2.5 Grafik Angka Kelahiran dan Kematian Jakarta Tahun 2014–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah penduduk tentunya sangat dipengaruhi angka kelahiran dan kematian. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ini memperlihatkan bahwa untuk angka kelahiran secara rata-rata mengalami penurunan sedangkan angka kematian cenderung naik, walaupun pada tahun 2020–2023 angka kematian cenderung fluktuatif. Kondisi yang terjadi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang diiringi dengan vaksinasi masif yang dilakukan oleh warga Jakarta. Perbandingan antara angka kelahiran dan angka kematian setidaknya pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Jakarta masih terus bertambah secara kumulatif apabila tidak mempertimbangkan angka migrasi. Angka kematian yang mendekati jumlah angka kelahiran juga perlu dijadikan perhatian khusus untuk menyusun strategi ke depannya terutama dalam hal pengendalian penduduk, karena apabila tren tersebut terus berjalan secara linear maka angka kematian akan semakin tinggi sedangkan angka kelahiran akan terus menurun yang dapat menyebabkan jumlah penduduk Jakarta akan turut menurun.

Indikator tingkat kemiskinan memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka memiliki tingkat konsumsi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui pengeluaran rumah tangga.

Dalam mengidentifikasi tingkat kemiskinan, digunakan metode perhitungan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM mencerminkan nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara GKNM mencakup kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



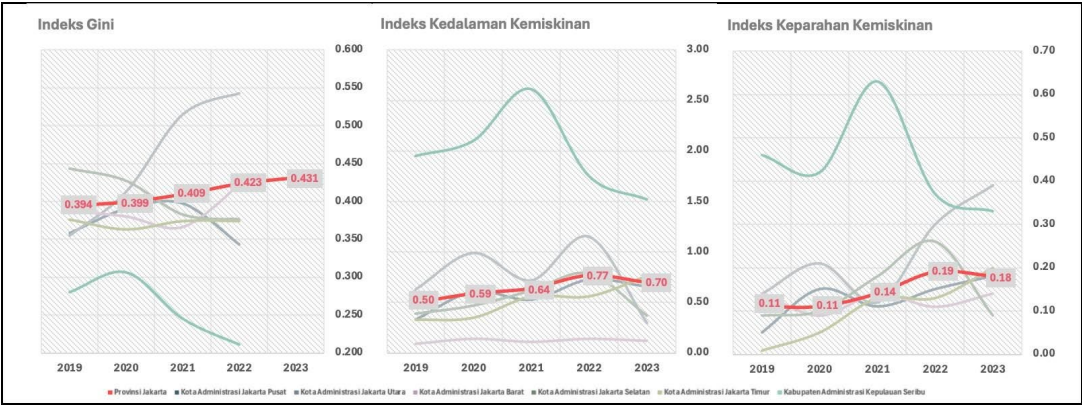
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2019–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2024

Berdasarkan indikator Head Count Index (HCI-P0), yang mengukur persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), tingkat kemiskinan di Jakarta dalam periode 2019–2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 3,42%, namun dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, termasuk terganggunya sektor ketenagakerjaan, menyebabkan lonjakan angka kemiskinan hingga mencapai puncaknya sebesar 4,69% pada tahun 2020.

Meskipun sejak 2021 angka kemiskinan mulai menunjukkan tren penurunan, hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level di bawah 4%, sebagaimana sebelum pandemi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak ekonomi pandemi masih dirasakan, terutama dalam pemulihan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Distribusi penduduk miskin di Jakarta selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa tiga wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara berurutan adalah Jakarta Utara (121 ribu jiwa), Jakarta Timur (118 ribu jiwa), dan Jakarta Barat (106 ribu jiwa). Tren ini semakin diperkuat saat pandemi Covid-19, di mana ketiga wilayah tersebut mengalami lonjakan angka kemiskinan paling signifikan, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 35,68% di Jakarta Utara, 33,97% di Jakarta Timur, dan 32,05% di Jakarta Barat. Meskipun sejak 2021 terjadi perlambatan dalam pertumbuhan jumlah penduduk miskin, hingga tahun 2023 angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata.



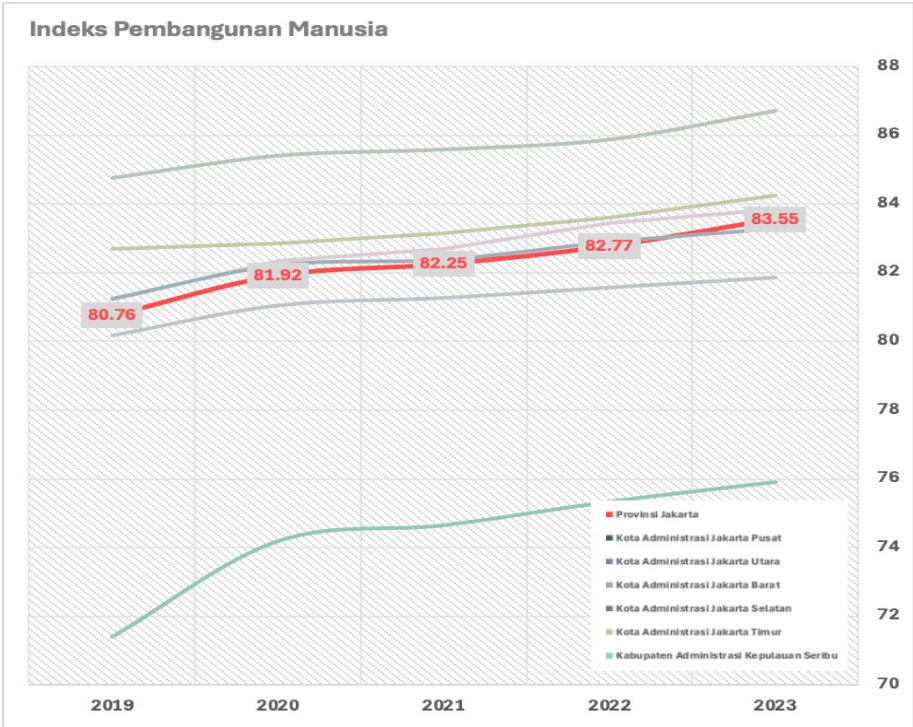
Gambar 2.7 Indeks Gini, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Jakarta Tahun 2019–2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2024

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan di Jakarta pada periode 2019 – 2023 mengalami peningkatan. Gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini Jakarta tercatat 0,431. Indeks tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (0,423). (Gambar II.27). Indeks tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,388, yang memiliki nilai sama dari periode sama tahun sebelumnya (0,381). Dari sisi nilai indeks, ketimpangan Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian karena berarti bahwa semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah.

Berdasarkan wilayahnya, ketimpangan pengeluaran tertinggi terdapat di Jakarta Utara. Ketimpangan di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2019 nilai indeks gini sebesar 0,355 sementara capaiannya pada tahun 2022 sebesar 0,543 dan menjadikan wilayah ini masuk ke dalam kategori ketimpangan tertinggi. Sementara itu, Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dengan tren yang menurun dari tahun 2019 sebesar 0,28 menjadi 0,211 di tahun 2022 dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Lebih lanjut, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index- P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Jakarta pada kurun waktu 2019–2023 juga mengalami sedikit peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin makin jauh di bawah garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang semakin meningkat. Berdasarkan wilayah, meskipun Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah namun kondisi kemiskinan di wilayah ini semakin dalam dan parah.

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber- sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).



Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2019–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta menunjukkan tren positif selama periode 2019–2023, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Jakarta tercatat sebesar 80,76 dan terus meningkat hingga mencapai 83,55 pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,45% dalam lima tahun terakhir. Namun, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan. IPM tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan dengan angka 86,71, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki IPM terendah sebesar 75,91, dengan disparitas mencapai 10,80 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, di mana Kabupaten Kepulauan Seribu masih tertinggal dibandingkan dengan lima kota lainnya.

Pada tahun 2023, tiga wilayah dengan IPM tertinggi di Jakarta adalah Kota Jakarta Selatan (86,71), Kota Jakarta Timur (84,26), dan Kota Jakarta Barat (83,85). Keunggulan wilayah-wilayah ini dalam pencapaian pembangunan manusia mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih tinggi. Sementara itu, kesenjangan yang masih terjadi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta, terutama bagi daerah yang masih tertinggal seperti Kabupaten Kepulauan Seribu..

Melalui berbagai indikator yang telah diuraikan sebelumnya, disadari bahwa jalan DKI Jakarta menuju status kota global bukanlah perjalanan yang linear ataupun bebas hambatan. Jakarta dihadapkan pada kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling bertaut, dan kesemuanya menuntut respon kebijakan yang tidak hanya bersifat sektoral dan jangka pendek. Menjadi kota global berarti menjelma menjadi pusat gravitasi peradaban, ekonomi, dan inovasi dunia. Namun di balik pencapaian itu, terdapat prasyarat mendasar yang kerap luput dari sorotan utama: kemampuan kota dalam melindungi, melayani, dan memberdayakan seluruh penduduknya secara inklusif dan berkelanjutan.

Kota global bukan semata tentang menjulanginya gedung pencakar langit, konektivitas digital, atau derasnya arus investasi asing. Ia adalah cerminan dari kualitas hidup warganya, seberapa adil distribusi kesejahteraan, dan seberapa tangguh kota menghadapi guncangan sosial maupun bencana. Dalam konteks inilah, pembangunan sosial yang terintegrasi dan adaptif memegang peran sentral. Pendekatan pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pemerataan dan perlindungan sosial akan melahirkan kota yang rapuh: megah di luar, tetapi rapuh di dalam.

Data demografi terbaru menunjukkan bahwa Jakarta sedang bergerak menuju fase *urban maturity*, bahkan mendekati kondisi *post-urban growth*. Laju pertumbuhan penduduk yang menurun tajam hingga negatif pada 2030 merupakan sinyal pergeseran fundamental dalam dinamika kependudukan. Bonus demografi yang saat ini dinikmati, lambat laun akan bergeser menjadi beban demografi jika tidak disiapkan dengan kebijakan jangka panjang yang adaptif. Menyempitnya basis piramida usia muda dan membesarnya populasi lansia menandakan bahwa tantangan ke depan tidak lagi sekadar kuantitas penduduk, tetapi juga kualitas layanan yang menjangkau kelompok usia non-produktif.

Fenomena penuaan penduduk ini akan berdampak luas. Kebutuhan akan layanan kesehatan lansia, perumahan ramah usia, perlindungan sosial berbasis komunitas, hingga desain kota yang inklusif bagi kelompok dengan keterbatasan fisik akan meningkat drastis. Sistem pelayanan sosial harus bertransformasi dari yang semula berorientasi bantuan sesaat menjadi sistem proteksi sosial jangka panjang yang berbasis data, berbasis wilayah, dan berbasis kerentanan aktual. Jakarta tidak bisa mengabaikan sinyal ini, karena daya saing kota global di masa depan akan ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap transisi demografis.

Di sisi lain, ketimpangan sosial yang masih menganga menjadi persoalan yang tidak kalah genting. Indeks Gini Jakarta yang tercatat di atas rata-rata nasional adalah peringatan keras bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Fakta bahwa wilayah-wilayah seperti Jakarta Utara mengalami lonjakan ketimpangan menunjukkan bahwa narasi pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan bukan sekadar statistik—ia adalah cerminan

nyata dari ketidaksetaraan peluang, keterbatasan mobilitas sosial, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah padat, serta meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Jakarta jauh lebih struktural. Intervensi sosial harus mampu menyentuh akar persoalan, mulai dari ketimpangan spasial, pengangguran tersembunyi, hingga keterputusan akses layanan dasar di daerah-daerah marjinal. Strategi pembangunan sosial ke depan tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan charity, tetapi harus ditransformasikan menjadi upaya penguatan daya tahan sosial masyarakat—melalui literasi sosial, ekonomi komunitas, dan inovasi berbasis lokal.

Di tengah tantangan ini, tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) patut diapresiasi. Namun, peningkatan ini belum cukup jika disparitas antarwilayah masih lebar. Kabupaten Kepulauan Seribu yang memiliki IPM terendah menjadi bukti nyata bahwa pembangunan belum menyentuh semua wilayah secara adil. Ketimpangan IPM menggambarkan bahwa masih banyak warga Jakarta yang belum menikmati hasil pembangunan secara setara, baik dari sisi pendidikan, layanan kesehatan, maupun standar hidup. Pembangunan manusia harus dilihat sebagai tujuan, bukan sekadar indikator, dan harus didekati secara lintas sektor dan lintas wilayah.

Mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan perubahan paradigma. Tidak cukup hanya berorientasi pada makro-ekonomi dan investasi. Jakarta harus dibangun dari bawah ke atas, dari kampung ke kota, dari kelompok rentan ke pusat kebijakan. Ekosistem kebijakan sosial harus progresif dan berbasis bukti. Artinya, kebijakan harus lahir dari pembacaan data spasial, pengenalan terhadap kebutuhan spesifik wilayah, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik kerentanan yang berkembang dinamis. Kota global harus memiliki sistem deteksi dini atas potensi krisis sosial dan kapasitas respons cepat berbasis komunitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu membangun platform kolaborasi multipihak yang mencakup sektor pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini bukan sekadar kemitraan administratif, tetapi ruang strategis untuk mendesain ulang arah pembangunan kota yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi. Dalam ekosistem ini, Dinas Sosial harus memainkan peran ganda: sebagai pelayan publik yang responsif sekaligus sebagai arsitek ketahanan sosial kota.

Jakarta sebagai kota global harus ditopang oleh kekuatan internal yang kokoh: masyarakat yang terlindungi, kelompok rentan yang diberdayakan, wilayah tertinggal yang dimajukan, dan sistem sosial yang berdaya adaptif. Dengan demikian, transformasi Jakarta bukan hanya terlihat dari luar, tetapi juga terasa dari dalam—dari kehidupan sehari-hari warganya yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Inilah wujud kota global sejati: kota yang tidak hanya bersinar di peta dunia, tetapi juga hangat bagi setiap manusianya.

2. Masalah Ketepatan Data Sosial dan Tata Kelola Perlindungan Sosial

Dalam sistem perlindungan sosial DKI Jakarta, ketepatan data dan efektivitas sistem graduasi penerima manfaat merupakan dua fondasi penting yang saat ini belum berfungsi secara optimal. Permasalahan pertama terletak pada presisi system data sosial yang masih bersifat administratif, lambat dalam memperbarui kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tidak terintegrasi secara lintas sektor. Akibatnya, terjadi dua kesalahan krusial:

- a. Inclusion error, di mana warga yang sudah tidak layak tetap menerima bantuan,
- b. Exclusion error, yang menyebabkan warga rentan tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Di sisi lain, proses verifikasi dan validasi data masih mengandalkan input manual dan belum memanfaatkan potensi aktor lokal seperti TKSK, PSM, atau LKS sebagai bagian dari sistem deteksi dini atau pemantau perubahan kondisi warga. Sistem data juga belum mampu mengenali dimensi kerentanan yang bersifat spasial atau ekologis, seperti risiko banjir, kepadatan pemukiman, dan keterbatasan akses layanan dasar.

Masalah kedua berkaitan dengan ketidakefektifan sistem graduasi penerima manfaat. Saat ini, tidak tersedia kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa warga yang berhenti menerima bantuan telah benar-benar mencapai kemandirian sosial dan ekonomi. Proses penghentian bantuan masih dilakukan berdasarkan mekanisme administratif, tanpa indikator objektif yang mencerminkan kualitas hidup atau ketahanan sosial ekonomi warga. Akibatnya, banyak graduasi yang bersifat semu, karena dilakukan tanpa perubahan kondisi riil penerima manfaat.

Permasalahan ini semakin diperparah dengan tidak adanya sistem monitoring pasca-program. Dinas Sosial belum memiliki alat pelacak longitudinal yang mampu mengikuti perjalanan eks-penerima manfaat dalam jangka menengah, untuk mendeteksi potensi kemunduran akibat kehilangan pekerjaan, bencana, atau guncangan lainnya. Tanpa sistem ini, keberhasilan program hanya diukur dari output administratif, bukan dari dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Kedua masalah ini, data yang tidak akurat dan graduasi yang tidak terukur, menghambat transformasi perlindungan sosial menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berdampak nyata. Dalam konteks DKI Jakarta yang menghadapi kompleksitas perkotaan, tekanan ekonomi, dan risiko iklim, reformasi terhadap arsitektur data sosial dan sistem graduasi adalah hal yang mendesak. Tanpa pembenahan mendasar, kebijakan bantuan sosial berisiko menjadi tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan gagal menciptakan mobilitas sosial.

Saat ini, sistem data sosial sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Jakarta masih memiliki keterbatasan fundamental, baik dari sisi teknis maupun kelembagaan. Seperti tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029, sistem data sosial belum bersifat dinamis dan real-time, serta masih sangat bergantung pada input manual dan proses validasi yang panjang. Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam penyesuaian data terhadap perubahan status sosial-ekonomi rumah tangga, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi, bencana alam, atau PHK massal.

Evaluasi dalam LKIP Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2024 juga mencatat bahwa verifikasi dan validasi data masih sangat manual dan sporadis. Pelibatan aktor sosial seperti TKSK, PSM, dan LKS masih terbatas pada pendataan administratif, belum difungsikan sebagai early warning system atau community auditor dalam sistem informasi sosial. Padahal, ketiga aktor ini adalah “mata dan telinga” negara di tingkat akar rumput, dan bisa memainkan peran penting sebagai penjaga validitas data.

Sementara itu, KLHS RPJMD 2025–2029 mengingatkan bahwa sistem data sosial Jakarta juga belum menjawab dimensi kerentanan lingkungan. Jakarta menghadapi risiko banjir, penurunan muka tanah, dan krisis iklim yang secara langsung memperparah kondisi sosial rumah tangga miskin. Namun, data sosial saat ini belum mampu memetakan rumah tangga miskin yang tinggal di zona risiko bencana, kawasan padat, atau daerah dengan akses layanan dasar terbatas. Padahal, integrasi data sosial-ekologis menjadi kunci untuk mendesain program yang bersifat preventif dan mitigatif.

Untuk membenahi persoalan ini, Jakarta membutuhkan reformasi data sosial berbasis tiga pilar:

1. Digitalisasi dan integrasi: Pengembangan sistem informasi sosial berbasis real-time, berbasis spasial, dan terintegrasi dengan sistem nasional. Pemanfaatan teknologi seperti AI, *big data analytics*, dan geospasial harus menjadi bagian dari arsitektur data sosial Jakarta.
2. Pelibatan komunitas sebagai mitra Data: Peran TKSK, PSM, dan LKS perlu diformalisasi sebagai bagian dari sistem verifikasi dan monitoring. Mereka harus dibekali pelatihan dan insentif berbasis kinerja, bukan sekadar dimanfaatkan sebagai pelaksana teknis.
3. Indikator multidimensi dan risiko: akan digunakan sebagai dasar untuk perumusan sistem graduasi bantuan sosial yang lebih akurat dan berkelanjutan. Sistem data ke depan tidak hanya mencatat status ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kerentanan lingkungan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar. Pendekatan ini akan memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih tajam dan berbasis kebutuhan nyata penerima manfaat.

Dengan pembenahan menyeluruh atas sistem data sosial, Jakarta dapat memposisikan diri sebagai kota yang tidak hanya cepat tanggap secara teknologi, tetapi juga berkeadilan secara sosial. Data yang akurat adalah syarat minimum bagi tata kelola kesejahteraan sosial yang transformatif bukan hanya menjangkau lebih banyak, tetapi menjangkau lebih tepat dan lebih dalam.

Dalam kerangka perlindungan sosial yang transformatif, sistem graduasi merupakan elemen kunci untuk menjembatani bantuan sosial jangka pendek menuju pemberdayaan sosial-ekonomi jangka panjang. Di kota megapolitan seperti Jakarta dengan tekanan sosial yang tinggi, mobilitas penduduk yang dinamis, dan tingkat kerentanan yang berlapis, graduasi harus menjadi mekanisme

yang bukan hanya mengentaskan, tetapi juga menaikkan kelas sosial kelompok miskin dan rentan secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktik tata kelola kesejahteraan sosial DKI Jakarta saat ini, sistem graduasi belum dibangun secara menyeluruh, terukur, dan lintas sistem. Evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial menunjukkan bahwa keberadaan sistem graduasi seringkali bersifat simbolik atau administratif, bukan sebagai bagian dari ekosistem yang dirancang untuk menghasilkan transformasi sosial.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen RPJMD DKI Jakarta 2025–2029, KLHS RPJMD, serta LKIP Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, terdapat tiga persoalan mendasar dalam membangun sistem graduasi yang fungsional di Jakarta:

1. Ketidadaan indikator graduasi yang objektif dan multidimensi

Proses penghentian bantuan sosial (graduasi) di Jakarta masih ditentukan oleh mekanisme administratif yang sempit, seperti masa penerimaan, status kependudukan, atau verifikasi manual berbasis usulan kelurahan/kecamatan. Hal ini tidak mencerminkan kondisi objektif kesejahteraan penerima bantuan. Tanpa adanya indikator yang kuat, graduasi dapat menjadi “semu”—peserta dianggap sudah mandiri secara sistem, padahal belum aman secara sosial dan ekonomi.

Dalam rangka membangun sistem graduasi sosial ekonomi yang berbasis dampak dan berkelanjutan, beberapa kerangka indikator multidimensi yang relevan dapat dijadikan rujukan pengembangan arah kebijakan, antara lain:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS): Diuraikan dalam KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025–2029, IKS dapat mengukur ketahanan sosial individu atau rumah tangga melalui variabel seperti kekuatan jejaring sosial, stabilitas tempat tinggal, keterlibatan dalam komunitas, dan akses terhadap layanan publik. IKS secara eksplisit disebut dalam KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 sebagai indikator yang dapat digunakan untuk pemetaan kerentanan sosial dan evaluasi dampak intervensi sosial.
- b. Skor Pemberdayaan Ekonomi: Berdasarkan model BRAC International (2025), indikator ini menggabungkan metrik pendapatan rutin, kepemilikan aset produktif (modal kerja, alat usaha), serta kemampuan untuk menghasilkan pendapatan mandiri secara berkelanjutan. Skor ini memiliki potensi adaptasi ke konteks DKI, misalnya melalui integrasi dengan program UMKM, pelatihan kerja, dan pelacakan aset produktif penerima bantuan.
- c. Indikator SDGs (Sustainable Development Goals): Sebagaimana juga diadopsi dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJMD DKI Jakarta, indikator SDGs meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang penting untuk memastikan kondisi dasar yang layak sebelum peserta “dinyatakan lulus” dari bantuan.

Ketiga kerangka ini tidak serta-merta menjadi alat ukur teknis dalam jangka pendek, namun akan menjadi dasar konseptual bagi pengembangan sistem pelacakan dan evaluasi graduasi dalam roadmap pemberdayaan sosial Dinas Sosial DKI Jakarta 2025–2029. Ketiga indikator tersebut saat ini belum ditetapkan sebagai kriteria operasional dalam sistem bantuan sosial DKI Jakarta, namun diusulkan dalam Renstra ini sebagai dasar pengembangan roadmap graduasi penerima manfaat bantuan sosial.

2. Tidak adanya ekosistem dukungan lintas sektor

Graduasi yang efektif membutuhkan ekosistem intervensi yang berkesinambungan, bukan sekadar penghentian bantuan. Namun, di Jakarta, fragmentasi lintas sektor masih menjadi kendala besar. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berjalan sendiri-sendiri tanpa skema integrasi data atau alur rujukan antar program. Contoh konkret yang diidentifikasi dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 dan LKIP Dinsos 2024:

- a. Pelatihan kerja dari Disnakertrans belum terkoneksi dengan sistem graduasi, padahal dapat menjadi jalur utama transisi menuju kemandirian ekonomi.
- b. Fasilitasi UMKM dari Dinas PPKUKM tidak secara otomatis menjadi rujukan bagi eks-penerima bansos, sehingga potensi wirausaha pasca-bantuan tidak tergarap optimal.
- c. TKSK, PSM, dan LKS, yang memiliki posisi strategis di komunitas, belum dimanfaatkan sebagai mentor pasca-graduasi untuk mendampingi peserta dalam membangun kapasitas ekonomi dan sosial.

Sebagai akibatnya, eks-penerima manfaat sering kali kehilangan “tangga berikutnya”, dan mudah kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan. Ini mengakibatkan siklus ketergantungan yang terus berulang, sekaligus pemborosan anggaran karena tidak menghasilkan dampak jangka panjang.

3. Tidak tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pasca graduasi

Graduasi bukan akhir dari proses, tetapi awal dari fase pembuktian kemandirian. Di sinilah pentingnya sistem monitoring jangka menengah dan sistem peringatan dini (*early warning system*). Namun hingga saat ini:

- a. Tidak ada *dashboard* pelacakan eks penerima bansos yang memantau pendapatan, kondisi rumah tangga, atau keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi setelah lulus bantuan.
- b. Tidak tersedia sistem deteksi dini untuk menangkap kondisi *fallback* akibat bencana, PHK, atau krisis lainnya.
- c. Keterlibatan komunitas melalui PSM, TKSK, atau LKS dalam pemantauan lapangan juga belum terstruktur sebagai bagian dari sistem M&E formal.

Kerangka evaluasi dari *Graduation Approach* oleh BRAC menunjukkan bahwa

pemantauan minimal selama 24–36 bulan setelah intervensi adalah kunci keberhasilan. Tanpa monitoring ini, keberhasilan graduasi tidak dapat diukur secara objektif, dan program menjadi tidak akuntabel.

Pembelajaran Global: BRAC International dan Graduation Approach

Dalam merespons tantangan kemiskinan kronis dan kerentanan sosial yang kompleks, salah satu pendekatan yang paling banyak diadopsi secara global adalah *Graduation Approach* yang dikembangkan oleh BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee). Pendekatan ini pertama kali diimplementasikan pada awal tahun 2000-an di Bangladesh dan telah direplikasi di lebih dari 20 negara dengan tingkat keberhasilan yang signifikan.

Di Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi dan dikontekstualisasikan ke dalam kerangka Sistem Perlindungan Sosial Adaptif (SPSA) sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan RPJMN 2025–2029, dengan penekanan pada kemampuan sistem perlindungan sosial untuk merespons guncangan, mengurangi kerentanan, dan memfasilitasi transisi menuju kemandirian ekonomi.

Model ini dirancang berdasarkan prinsip bahwa kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya diatasi dengan bantuan tunai, tetapi membutuhkan kombinasi intervensi yang terstruktur, bertahap, dan berkelanjutan. Dalam model BRAC (2025), struktur dasar dari *Graduation Approach* terdiri dari lima pilar utama:

4. Bantuan Dasar (Basic Needs Support)

Fase awal berfungsi untuk mengurangi tekanan psikososial dan ekonomi rumah tangga. Ini dapat berupa bantuan tunai, makanan, atau layanan kesehatan, yang bertujuan memberikan stabilitas dasar agar peserta siap menerima intervensi berikutnya. Berdasarkan temuan BRAC, fase ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental peserta, terutama bagi perempuan dan kelompok marginal.

5. Transfer Aset Produktif

Pilar ini merupakan inti dari transisi ekonomi. BRAC memberikan aset seperti hewan ternak, alat produksi, atau modal usaha kecil, yang dipilih berdasarkan preferensi lokal dan potensi pasar. Dalam konteks Jakarta, hal ini bisa dikembangkan menjadi pemberian alat kerja untuk usaha mikro, dukungan peralatan UMKM, atau integrasi ke dalam program inkubasi sosial ekonomi yang ada di Dinas PPKUKM.

6. Pelatihan Keterampilan dan Literasi Keuangan

Peserta diberikan pelatihan praktis terkait keterampilan teknis (misalnya menjahit, memasak, servis motor) maupun keterampilan manajerial seperti pencatatan keuangan rumah tangga, pengelolaan usaha kecil, dan strategi pemasaran. BRAC menekankan bahwa kapasitas bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku ekonomi.

7. Pendampingan Intensif dan Berkala

Setiap peserta mendapatkan mentor komunitas yang secara rutin melakukan kunjungan rumah, memberikan bimbingan, serta mengidentifikasi hambatan personal dan sosial.

Pendampingan ini berlangsung selama 18–24 bulan. Studi BRAC menemukan bahwa hubungan yang berkelanjutan antara mentor dan peserta memiliki efek signifikan terhadap keberhasilan program, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan koneksi sosial.

8. Monitoring Jangka Menengah (18–36 bulan)

Pendekatan ini berbeda dari sistem bansos konvensional karena memiliki sistem evaluasi longitudinal. Pemantauan dilakukan untuk mengukur keberlanjutan dampak: apakah peserta tetap berada di luar garis kemiskinan, memiliki cadangan tabungan, serta tetap menjalankan usaha atau pekerjaan produktif. Graduasi dianggap berhasil hanya jika transformasi ekonomi terjadi secara berkelanjutan.

Relevansi untuk DKI Jakarta

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, pendekatan *Graduation* yang dikembangkan oleh BRAC sangat relevan sebagai solusi terhadap tantangan kemiskinan perkotaan yang dinamis dan berlapis. Jakarta bukan sekadar menghadapi kemiskinan dalam pengertian ekonomi, tetapi juga dalam bentuk kerentanan sosial, keterbatasan akses layanan dasar, tekanan lingkungan, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang hanya berbasis bantuan tunai bersifat temporer dan tidak mampu menjawab kebutuhan transformatif warga miskin dan rentan.

Sebagaimana diuraikan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD DKI Jakarta 2025–2029, diperlukan sistem perlindungan sosial yang proaktif, adaptif, dan berbasis komunitas untuk menghadapi kombinasi risiko sosial dan ekologis di wilayah perkotaan. Jakarta menghadapi risiko banjir, polusi udara, kepadatan pemukiman informal, hingga tekanan ekonomi akibat PHK massal dan inflasi harga pangan. Dalam lanskap seperti ini, program perlindungan sosial tidak bisa lagi bersifat reaktif. Ia harus mampu membangun kapasitas warga untuk bertahan, pulih, dan naik kelas sosial secara mandiri.

Graduation Approach menawarkan kerangka yang sistematis dan menyeluruh untuk transisi dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian sosial ekonomi. Namun, agar pendekatan ini benar-benar efektif di Jakarta, diperlukan penyesuaian dengan karakteristik urban yang khas. Beberapa poin strategis penyesuaian yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Program Bansos dengan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha

Graduasi bukanlah soal menghentikan bantuan, tetapi memastikan penerima manfaat memiliki pijakan kuat untuk hidup mandiri setelahnya. Di Jakarta, hal ini dapat dimulai dengan mengintegrasikan program bantuan sosial (bansos) langsung ke dalam jalur pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta program fasilitasi UMKM dari Dinas PPKUKM.

Selama ini, berbagai program pemberdayaan berjalan secara sektoral dan tidak terhubung secara sistematis dengan skema bantuan sosial. Akibatnya, penerima bansos tidak otomatis diarahkan ke jalur transisi yang bisa meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan

integrasi ini, rumah tangga penerima bantuan tidak hanya diberikan dana, tetapi juga keterampilan, aset produktif, dan akses ke pasar, sehingga memiliki peluang nyata untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Pemanfaatan Indikator Digital dan Spasial dalam Pelacakan Pasca-Program

Jakarta memiliki infrastruktur digital dan kapasitas teknologi yang jauh lebih maju dibanding banyak wilayah lain di Indonesia. Hal ini harus dimanfaatkan dalam desain sistem pelacakan dan monitoring pasca-graduasi. Salah satu kelemahan program bansos saat ini adalah tidak adanya sistem untuk memantau kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat setelah keluar dari program. Akibatnya, pemerintah tidak tahu apakah mereka berhasil mandiri atau justru kembali ke kondisi miskin.

Melalui penggunaan indikator spasial (berbasis geolokasi) dan teknologi digital seperti dashboard pelacakan, mobile apps, atau integrasi data sektoral, proses monitoring dapat dilakukan secara lebih real-time, prediktif, dan presisi. Wilayah dengan risiko tinggi fallback (seperti kawasan banjir, permukiman padat, atau zona rawan ekonomi) bisa diberi perhatian khusus sebagai target intervensi pasca-program. Dengan sistem seperti ini, keberhasilan graduasi tidak lagi diukur hanya dari "berapa banyak yang sudah keluar dari daftar penerima", tetapi dari seberapa banyak yang berhasil bertahan di luar kemiskinan dalam 1–3 tahun berikutnya.

3. Optimalisasi Peran TKSK, PSM, dan LKS sebagai Mentor Komunitas

Salah satu kekuatan model BRAC adalah pendampingan intensif berbasis komunitas. Dalam hal ini, Jakarta sudah memiliki jaringan aktor sosial di tingkat lapangan, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Namun, peran mereka selama ini masih terbatas pada pengumpulan data dan pelaksanaan teknis program.

Pendekatan Graduation menuntut peran yang lebih strategis: sebagai mentor yang mendampingi warga dalam proses transisi sosial ekonomi, termasuk memberikan motivasi, pelatihan keterampilan dasar, memediasi akses layanan, serta menjadi mata dan telinga terhadap perubahan kondisi warga. Dengan pelatihan dan insentif yang tepat, mereka bisa menjadi garda terdepan dalam menjamin keberhasilan proses graduasi secara kontekstual dan berkelanjutan.

3. Ketergantungan pada Pola Pelayanan Institusional (Panti) dan Ketimpangan Akses Layanan Sosial Bagi Kelompok Rentan

Permasalahan ketiga yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan dua aspek yang saling terkait dan saling memperparah: ketergantungan pada model pelayanan institusional (panti) dan ketimpangan akses layanan sosial bagi kelompok rentan. Meskipun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka

yang tinggi, keberhasilan tersebut belum mencerminkan pemerataan akses layanan secara menyeluruh di wilayah DKI Jakarta.

Ketimpangan struktural dan spasial masih membatasi jangkauan intervensi sosial, terutama di wilayah-wilayah dengan kerentanan tinggi dan infrastruktur layanan yang lemah. Di sisi lain, pendekatan berbasis panti yang selama ini menjadi andalan justru semakin memperlihatkan keterbatasannya dalam merespons dinamika sosial perkotaan yang cepat berubah, kompleks, dan memerlukan fleksibilitas tinggi. Kedua persoalan ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan sosial Jakarta perlu direformulasi secara menyeluruh agar lebih responsif, adil secara spasial, dan kontekstual terhadap kebutuhan warga rentan di tingkat akar rumput.

A. Ketimpangan Akses Layanan Sosial: Masalah Struktural dan Spasial

Meski secara administratif capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyentuh angka 100% selama tiga tahun terakhir, keberhasilan ini tidak serta-merta menunjukkan tuntasnya pemerataan akses layanan sosial di lapangan. Angka capaian SPM cenderung menekankan kepatuhan terhadap indikator input dan output, namun belum menjangkau aspek kualitas dan kesetaraan spasial secara mendalam. Ini menciptakan paradoks antara “angka administratif yang sempurna” dengan “realitas distribusi pelayanan” yang belum merata.

Data penjangkauan menunjukkan bahwa akses layanan sosial masih sangat timpang di sejumlah wilayah. Wilayah seperti Kepulauan Seribu, permukiman padat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, serta kawasan informal di bantaran sungai dan lahan milik negara adalah area dengan akses layanan yang paling rendah. Data dari dokumen Rekap Jumlah Penjangkauan dan WBS Triwulan IV Tahun 2024 memperlihatkan fakta yang sangat kontras:

- 1) Terlihat bahwa di Jakarta Utara, realisasi penjangkauan melampaui 3 kali lipat dari target awal. Hal ini bisa diartikan sebagai lonjakan kerentanan sosial yang tidak terpetakan secara akurat sejak awal tahun.
- 2) Masalah serupa terjadi di Jakarta Barat, yang notabene merupakan salah satu wilayah dengan kantong kemiskinan urban dan permukiman tidak layak yang cukup luas. Fenomena ini mengindikasikan dua hal: prediksi kebutuhan sosial masih lemah, dan distribusi titik layanan dan intervensi belum responsif terhadap realitas wilayah.
- 3) Wilayah seperti Kepulauan Seribu menghadapi tantangan geografis tersendiri. Aksesibilitas yang terbatas menyebabkan layanan sosial tidak hanya lambat, tapi juga jarang menjangkau kelompok yang membutuhkan, seperti lansia miskin, anak telantar, dan penyandang disabilitas.
- 4) Sementara di kawasan padat perkotaan seperti Jakarta Barat dan Utara, masalah bukan hanya pada jumlah permintaan layanan, tetapi juga pada kompleksitas sosial—mulai dari urban poverty, gang sempit, hingga identitas kependudukan yang tidak jelas.

Hal ini juga memperlihatkan adanya bias struktural dalam model pelayanan, yang masih terlalu mengandalkan pendekatan administratif (berbasis domisili resmi) ketimbang identifikasi langsung kebutuhan sosial di lapangan. Ketika akses layanan tidak merata, kelompok rentan menjadi korban pertama. Anak jalanan, lansia telantar, ODGJ, dan penyandang disabilitas tidak hanya kesulitan mendapatkan layanan dasar, tapi juga menjadi invisibel dalam sistem. Tanpa titik layanan yang cukup dekat dan sistem pelaporan berbasis komunitas, mereka tidak terjangkau oleh mekanisme intervensi standar.

Dalam konteks kota seperti Jakarta, ketimpangan spasial ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah keadilan sosial. Tanpa strategi pemerataan layanan, kelompok rentan akan terus berada di luar jangkauan perlindungan sosial, bahkan ketika SPM secara administratif terpenuhi.

B. Ketergantungan pada Model Panti: Keterbatasan dalam Fleksibilitas dan Relevansi

Hingga saat ini, model pelayanan sosial berbasis institusional atau *residential care* (panti) masih menjadi kerangka dominan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di Provinsi DKI Jakarta. Model ini dibentuk dari pendekatan historis yang menempatkan panti sebagai "penampungan" bagi kelompok rentan seperti lansia telantar, anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan kelompok marginal lainnya. Secara yuridis-administratif, keberadaan panti memang memiliki dasar yang sah, tetapi dari sisi efektivitas sosial, model ini semakin sulit menjawab kompleksitas dinamika kerentanan perkotaan.

Salah satu persoalan mendasar dari pendekatan institusional adalah sifatnya yang sentralistik dan birokratis. Proses masuk-keluar warga binaan, asesmen kebutuhan, hingga tahapan rehabilitasi umumnya mengikuti standar prosedur yang seragam dan tidak fleksibel terhadap variasi kebutuhan individu. Padahal, konteks sosial-ekonomi warga Jakarta sangat heterogen: dari lansia terlantar di kawasan elite yang terputus dari keluarga, hingga anak jalanan yang berpindah-pindah di kolong jembatan dan terminal. Ketika prosedur layanan dibuat terlalu rigid dan terpusat, maka efektivitas program menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak panti beroperasi dalam kondisi fisik yang belum memadai. Data dari dokumen *Potret Bangunan Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta* mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari lebih dari 20 panti yang dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, sebagian besar dibangun sebelum tahun 2000, dan belum mengalami rehabilitasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Beberapa panti bahkan dikategorikan dalam kondisi "tidak baik", seperti Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 dan Panti Bina Karya Harapan Jaya, yang mengalami kerusakan bangunan dan ketidaklayakan fasilitas.

Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Dari sisi kenyamanan, warga binaan tidak mendapatkan ruang hidup yang layak. Dari sisi kesehatan, bangunan yang tua dan sempit

meningkatkan risiko penyakit menular, terutama di tengah krisis iklim dan polusi perkotaan. Dari sisi psikososial, fasilitas yang tidak ramah terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau lansia dapat memperburuk kondisi mental mereka, yang seharusnya dipulihkan melalui pendekatan rehabilitatif.

Lebih jauh lagi, keterbatasan kapasitas daya tampung juga menjadi hambatan. Panti seperti *PSTW Budi Mulia*, *Bina Laras*, dan *Bina Insan* masing-masing menampung ratusan hingga ribuan warga binaan. Namun, dengan rasio pekerja sosial dan pendamping yang terbatas, proses pembinaan menjadi tidak personal, dan rawan stagnasi rehabilitasi. Warga bisa tinggal dalam waktu yang lama tanpa kejelasan arah pemulihan atau reintegrasi sosial.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah lemahnya fleksibilitas institusi panti dalam menghadapi lonjakan kebutuhan layanan akibat perubahan sosial secara tiba-tiba—seperti krisis ekonomi, pandemi, inflasi, atau bencana alam. Dalam situasi darurat, sistem panti tidak bisa merespons secara cepat karena bersandar pada prosedur administratif dan proses intake yang panjang. Di sisi lain, kelompok rentan sering kali mengalami krisis dalam hitungan hari atau bahkan jam. Dalam konteks ini, pelayanan berbasis komunitas dan respons cepat berbasis kewilayahan jauh lebih relevan dan dibutuhkan.

Kondisi urbanisasi cepat Jakarta juga memperumit kebutuhan layanan sosial. Mobilitas penduduk, naiknya biaya hidup, dan kerentanan struktural (seperti pekerjaan informal, hunian tidak layak, dan relasi sosial rapuh) menghasilkan kelompok rentan baru yang tidak bisa dijangkau dengan model panti tradisional. Kelompok seperti lansia yang hidup sendiri di apartemen tanpa keluarga, anak korban KDRT yang tidak bisa kembali ke rumah, atau eks-narapidana yang butuh bimbingan ekonomi, tidak selalu cocok dimasukkan ke dalam panti. Mereka membutuhkan pendekatan yang kontekstual: berupa layanan sementara, pendampingan rumah tangga, atau layanan berbasis komunitas.

Karena itu, panti sosial semestinya tidak lagi dilihat sebagai “tujuan akhir” dari rehabilitasi sosial, melainkan sebagai salah satu elemen dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas dan adaptif. Dalam perannya yang baru, panti bisa berevolusi menjadi *pusat sumber daya sosial (social service hub)*, yang melayani lebih banyak fungsi strategis seperti:

- a. pusat asesmen sosial,
- b. pelatihan keterampilan dan vokasi,
- c. layanan rujukan psikologis,
- d. shelter darurat,
- e. serta koordinasi dengan layanan wilayah dan komunitas.

Untuk dapat memainkan peran ini, dibutuhkan reorientasi fungsi dan modernisasi infrastruktur panti. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas digital, integrasi dengan basis data basis data kesejahteraan sosial yang berlaku secara nasional, serta pengembangan layanan bergerak (*mobile service units*) yang mampu menjangkau kelompok rentan di wilayah rawan. Selain itu, kapasitas SDM—khususnya pekerja sosial, psikolog, dan

pendamping—perlu diperkuat dari sisi jumlah dan kompetensi.

Transformasi ini juga perlu disertai dengan perubahan paradigma. Pelayanan sosial tidak boleh dilihat sebagai beban fiskal, tapi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan sosial kota. Ketika layanan sosial adaptif, responsif, dan tersebar secara merata, maka biaya sosial akibat kriminalitas, pengabaian anak, atau eksklusi sosial dapat ditekan secara signifikan.

C. Konsekuensi Sosial: Invisibilitas dan Ketimpangan Ganda

Ketimpangan spasial dan kelemahan struktur pelayanan sosial di Jakarta tidak hanya menciptakan ketidakefisienan dalam distribusi bantuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang jauh lebih serius: invisibilitas kelompok rentan dan terjadinya ketimpangan ganda. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta—yang ditandai oleh stratifikasi sosial yang kompleks, mobilitas penduduk yang tinggi, dan tingkat urbanisasi yang ekstrem—akses terhadap layanan sosial sangat bergantung pada keberadaan data administratif yang sah, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status domisili resmi.

Masalahnya, sebagian besar warga yang tinggal di permukiman informal seperti rumah kontrakan harian, kolong jalan layang, bantaran sungai, maupun kawasan padat kumuh kerap tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Kondisi ini membuat mereka tidak tercakup dalam basis data kesejahteraan sosial, sehingga tidak terjangkau oleh sistem layanan sosial formal, baik berupa panti, bantuan tunai, maupun program pemberdayaan.

Mereka menjadi kelompok yang tak terlihat—the invisible poor—yakni warga yang mengalami kerentanan struktural ganda: miskin secara ekonomi dan terpinggirkan secara administratif. Invisibilitas ini membuat mereka tidak hanya kehilangan hak atas bantuan, tetapi juga tidak masuk dalam prioritas kebijakan. Tanpa intervensi yang terstruktur, kelompok ini berada dalam siklus eksklusi sosial yang berulang: tidak tercatat, tidak terlayani, dan tidak terlindungi.

Lebih jauh lagi, model pelayanan berbasis institusi seperti panti tidak dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang mobilitasnya tinggi atau tinggal di lingkungan padat. Misalnya, lansia terlantar yang tinggal di rumah petak sempit, anak jalanan yang berpindah-pindah lokasi, penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarga tanpa dukungan sosial, hingga ODGJ yang mengalami relaps di tengah masyarakat. Karakteristik kelompok ini menuntut layanan yang lincah, terdesentralisasi, dan berbasis komunitas. Namun pendekatan panti justru cenderung eksklusif, terpusat, dan tidak memiliki fleksibilitas operasional seperti intervensi berbasis RT/RW, kolaborasi dengan kader sosial lokal, atau penggunaan shelter darurat yang mobile.

Keterbatasan ini memicu terjadinya ketimpangan ganda. Pertama, ketimpangan secara geografis karena wilayah-wilayah dengan beban sosial tinggi tidak mendapatkan porsi

layanan yang proporsional. Kedua, ketimpangan dalam respons sosial karena kelompok yang paling membutuhkan sering kali justru paling sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru yang tidak pernah tersentuh oleh program formal, meskipun indikator SPM secara administratif terus menunjukkan angka maksimal.

D. Kelemahan dalam Sistem Informasi dan Integrasi Data

Permasalahan lain yang memperparah ketimpangan layanan sosial di DKI Jakarta adalah kelemahan dalam sistem informasi dan integrasi data. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, disebutkan bahwa sistem monitoring dan pelaporan capaian program masih didominasi oleh data agregatif tahunan yang tidak merepresentasikan distribusi spasial dan dinamika waktu. Hal ini berarti bahwa meskipun capaian target tahunan program terlihat tercapai atau bahkan melebihi, realitas di lapangan bisa sangat timpang antarwilayah.

Tanpa sistem pelaporan berbasis spasial (*spatially disaggregated data*), kesenjangan layanan antarwilayah—misalnya antara Jakarta Selatan yang relatif stabil dan Kepulauan Seribu yang aksesnya sulit—tidak bisa terdeteksi secara *real-time*. Ini membuat perencanaan intervensi sosial menjadi reaktif, bukan prediktif. Situasi darurat atau lonjakan kerentanan baru (misalnya akibat PHK massal, kebakaran permukiman padat, atau perpindahan penduduk musiman) tidak segera masuk ke dalam radar perencanaan program, karena data yang digunakan adalah data hasil rekap, bukan data berbasis geolokasi dan waktu nyata.

Di sisi lain, pengelolaan data kesejahteraan sosial di Jakarta masih terfragmentasi. Terdapat basis data nasional yang dikelola pemerintah pusat, sistem penjangkauan lapangan oleh suku dinas dan Dinas Sosial, serta pencatatan internal yang dimiliki LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), shelter, dan komunitas lokal. Sayangnya, antar sistem ini belum terintegrasi secara teknis maupun kelembagaan. Misalnya, temuan lapangan oleh TKSK atau PSM sering kali tidak otomatis masuk ke dalam sistem rujukan bantuan formal. Begitu pula data shelter darurat atau layanan berbasis komunitas yang belum terhubung dalam basis data kesejahteraan sosial nasional.

Akibatnya, efektivitas intervensi sosial terganggu. Satu keluarga rentan dapat tidak memperoleh bantuan karena tidak tercatat dalam basis data, meskipun telah ditangani oleh shelter darurat. Atau sebaliknya, individu yang telah lulus dari program rehabilitasi tetap masuk dalam sistem bantuan karena belum dikeluarkan dari database. Tidak adanya interoperabilitas antar-sistem menciptakan *inclusion error* (penerima tidak layak tetap menerima bantuan) dan *exclusion error* (penerima layak tidak mendapatkan bantuan), yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan sosial.

Dalam jangka menengah, kelemahan sistem informasi ini akan menjadi hambatan serius bagi transformasi pelayanan sosial yang berbasis data. Jakarta membutuhkan sistem *social*

service intelligence, yakni infrastruktur data yang mampu:

- a. mengintegrasikan berbagai sumber data lapangan dan kelembagaan,
- b. memetakan kebutuhan sosial secara spasial dan temporal,
- c. memantau outcome penerima manfaat secara longitudinal, dan
- d. menginformasikan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

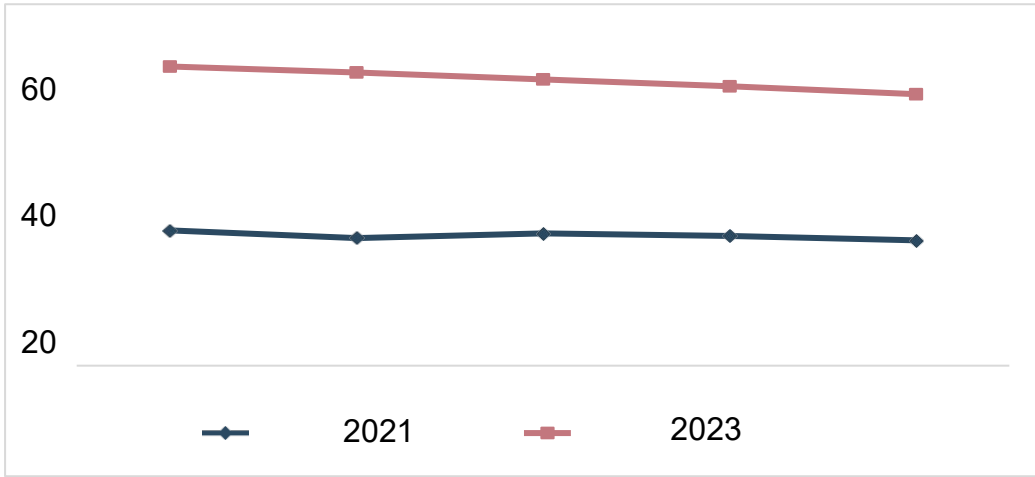
Tanpa reformasi sistem data sosial ini, ketepatan intervensi akan terus menjadi masalah, dan pelayanan sosial hanya akan menjadi tambal sulam administratif yang tidak menyentuh akar kerentanan warga.

4. Masalah Kesiapsiagaan Sosial terhadap Bencana dan Krisis

Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRBI) DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tidak diikuti dengan penurunan kejadian bencana. Tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan kasus banjir, kebakaran, dan rumah roboh, serta peningkatan drastis jumlah pengungsi. Ini menandakan bahwa sistem sosial belum siap menghadapi eskalasi dampak bencana.

Permasalahan muncul karena belum terbangunnya sistem layanan tanggap sosial berbasis risiko spasial. Kapasitas shelter, logistik, dan SDM belum mencukupi untuk menampung lonjakan permintaan bantuan dalam skenario darurat. Selain itu, bantuan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana yang lebih proaktif dan prediktif.

Bencana menjadi satu tantangan dalam pengembangan dan pembangunan kota, tidak terlepas seluruh wilayah Jakarta. Berbagai aspek dari geografi, geologi, hidrologi, ekologi, hingga demografi dapat menjadi alat bantu identifikasi potensi dan risiko bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana di tiap wilayah provinsi. IRBI yang diterbitkan oleh BNPB memiliki beberapa variabel atau komponen seperti bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana, yang selanjutnya disesuaikan dengan ancaman bencana pada setiap wilayah. Secara historis IRBI dapat memberikan gambaran umum terkait dengan kecenderungan bencana yang terjadi sehingga dapat menjadi acuan melihat risiko bencana di masa mendatang. Tren IRBI wilayah Jakarta dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 2.9 Grafik Indeks Risiko Bencana Indonesia dan Jakarta Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

IRB Jakarta mengalami penurunan yang konsisten dari 64,02 pada tahun 2020 menjadi 59,29 pada tahun 2024. Penurunan IRB ini mencerminkan adanya upaya nyata dalam pengurangan risiko bencana, seperti peningkatan kapasitas mitigasi, perencanaan tata ruang yang lebih baik, peningkatan sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat. Selain itu, IRB Jakarta yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional mengindikasikan bahwa, meskipun Jakarta adalah daerah urban dengan kerentanan tertentu (banjir, gempa, kepadatan penduduk), kapasitas tanggap dan mitigasi bencananya relatif lebih tinggi. Walaupun terjadi penurunan, IRB Jakarta masih berada pada angka yang tidak bisa dianggap rendah mutlak. Artinya, risiko tetap ada dan perlu diwaspadai, terutama mengingat Jakarta berpotensi terdampak berbagai jenis bencana.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta terdapat 9 (sembilan) jenis ancaman bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, gelombang ekstim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstim, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Selain itu, terdapat 1 (satu) jenis ancaman bencana non alam, yaitu kebakaran wilayah perkotaan sehingga secara total terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayah Jakarta. Rangkuman potensi risiko bencana alam Jakarta dapat dilihat pada dua tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Potensi Risiko Bencana Alam Jakarta

No	Jenis Bencana	Potensi Bahaya					Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	
		Luas Bahaya			Total Luas (Ha)	Kelas Resiko Berdasarkan Total Luas	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelas Resiko Berdasarkan Jumlah Penduduk
		Rendah	Sedang	Tinggi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	2.095	29.275	14.944	46.314	Tinggi	8.319.439	Sedang
2	Gempa Bumi	128.621	38.549	8	167.178	Sedang	11.246.068	Sedang
3	Likuifaksi	944	31.388	157	32.489	Sedang	5.918.303	Sedang
4	Tsunami	82.774	-	-	82.774	Rendah	71.992	Rendah
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	82.499	4.711	12.381	99.591	Tinggi	107.506	Sedang

6	Kekeringan	-	111.488	55.696	167.184	Tinggi	11.246.068	Sedang
7	Cuaca Ekstrem	34.796	49.759	82.628	167.183	Tinggi	11.246.068	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	6.944	-	-	6.944	Rendah	627	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	51.384	-	-	51.384	Rendah	11.246.068	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta, 2023

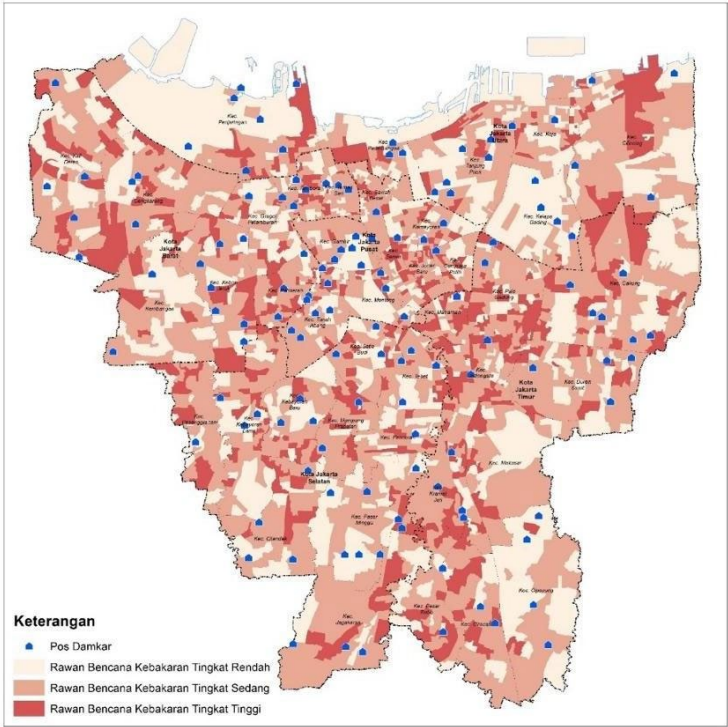
Secara luas terdampak bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, serta gelombang ekstrem dan abrasi yang memiliki kelas resiko tinggi tentunya perlu menjadi perhatian khusus dalam menyelenggarakan penanggulangan risiko bencana tersebut. Apabila menggunakan jumlah penduduk terpapar maka bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, dan epidemi memiliki jumlah penduduk terpapar yang banyak walaupun seluruhnya masuk ke dalam kategori sedang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari 9 (sembilan) bencana alam tersebut ialah banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gempa bumi yang merupakan bencana alam dengan risiko kelas yang cukup untuk dipertimbangkan lebih dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.8 Potensi Risiko Bencana Non Alam (Kebakaran) Jakarta

Kabupaten/Kota	% Bahaya	% Kerentanan	% Kapasitas	% Risiko	Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	11,79	27,81	60,41	51,35	Sedang
Jakarta Pusat	12,92	32,94	54,14	54,50	Sedang
Jakarta Utara	12,69	31,77	55,54	53,03	Sedang
Jakarta Barat	13,57	33,84	52,59	54,83	Sedang
Jakarta Selatan	13,22	32,80	53,98	53,79	Sedang
Jakarta Timur	13,89	32,44	53,66	55,47	Sedang
DKI Jakarta	13,34	32,75	53,92	54,42	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta, 2023

Khusus untuk kejadian bencana non alam, yaitu kebakaran wilayah perkotaan memiliki metode kajian yang berbeda dengan bencana alam. Identifikasi yang dilakukan menekankan kepada tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko di tiap wilayah administrasi Jakarta. Keseluruhan Jakarta masuk ke dalam kategori sedang tanpa terkecuali untuk potensi bencana kebakaran. Terlihat bahwa seluruh wilayah Jakarta memiliki kemungkinan potensi yang relatif sama sehingga untuk penanggulangan kebakaran wilayah perkotaan dapat dilakukan secara merata, detail antar wilayahnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran dan Titik Pos Damkar
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2024–2044

Meskipun indikator makro seperti penurunan Indeks Risiko Bencana (IRBI) menunjukkan peningkatan kapasitas mitigasi di DKI Jakarta, dinamika faktual di lapangan dalam kurun waktu 2023–2024 justru menampilkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Data kejadian bencana di DKI Jakarta Tahun 2023–2024 mengungkapkan lonjakan drastis jumlah kejadian bencana, khususnya banjir dan kebakaran permukiman, yang disertai dengan kemunculan kategori bencana lain seperti rumah roboh. Dari sisi substansi kebijakan, penurunan IRBI perlu dibaca beriringan dengan peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan.

Analisis Bencana di DKI Jakarta Tahun 2023–2024

- a. Peningkatan Signifikan Jumlah Kasus Bencana
 - Jumlah kejadian bencana mengalami lonjakan tajam dari tahun 2023 ke 2024:
 - Banjir meningkat drastis dari 20 kasus (2023) menjadi 151 kasus (2024).
 - Kebakaran permukiman juga naik dari 287 menjadi 382 kasus.
 - Muncul jenis bencana baru atau meningkat, seperti rumah roboh (dari 9 ke 69 kasus) dan kategori lainnya (3 ke 115 kasus).
- b. Dampak Sosial yang Lebih Luas
 - Jumlah jiwa terdampak meningkat hampir 10 kali lipat, dari sekitar 6.776 jiwa (2023) menjadi 66.894 jiwa (2024).
 - Jumlah pengungsi melonjak dari 1.188 menjadi 13.614 orang, yang menandakan beban penanganan lapangan juga membesar secara signifikan.
- c. Implikasi terhadap Kebijakan dan Respon Sosial

- Lonjakan jumlah kejadian dan pengungsi menuntut penguatan kapasitas logistik, shelter, dan SDM pada Dinas Sosial.
- Kesiapsiagaan berbasis data dan respons cepat lintas perangkat daerah menjadi krusial untuk tahun-tahun berikutnya.
- Bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan sistem mitigasi dan adaptasi bencana, terutama untuk kejadian yang kini makin sering dan menyebar (banjir, kebakaran, rumah roboh).

Data kejadian bencana di DKI Jakarta Tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa Jakarta tengah memasuki fase krusial peningkatan risiko sosial akibat bencana. Terjadi lonjakan drastis jumlah kejadian bencana banjir dari hanya 20 kasus pada tahun 2023 menjadi 151 kasus pada 2024. Peningkatan serupa terjadi pada kebakaran permukiman (dari 287 ke 382 kasus), serta jenis bencana lain seperti rumah roboh (dari 9 menjadi 69 kasus). Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah jiwa terdampak melonjak hampir sepuluh kali lipat—dari 6.776 jiwa menjadi 66.894 jiwa—sementara jumlah pengungsi meningkat dari 1.188 menjadi 13.614 orang. Angka-angka ini menegaskan bahwa meskipun Jakarta telah mencatat perbaikan dalam mitigasi struktural (misalnya melalui pengurangan IRBI secara konsisten dari 64,02 pada 2020 menjadi 59,29 pada 2024), tekanan terhadap sistem sosial justru meningkat secara signifikan.

Kondisi ini merefleksikan gap antara keberhasilan dalam pengelolaan risiko fisik dengan kapasitas respons sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kelompok rentan berada pada garis depan dalam menghadapi gelombang dampak bencana yang kian kompleks dan berlapis. Bukan hanya ancaman fisik yang harus ditangani, namun juga trauma sosial, dislokasi komunitas, gangguan akses terhadap layanan dasar, hingga risiko eksklusi sosial pasca-bencana.

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) DKI Jakarta 2023–2027, telah diidentifikasi 9 jenis bencana alam dan 1 jenis bencana non-alam (kebakaran wilayah perkotaan) sebagai ancaman aktual Jakarta. Dari sisi cakupan wilayah dan jumlah penduduk terdampak, empat jenis bencana perlu mendapat perhatian khusus: banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gempa bumi. Misalnya, banjir berisiko tinggi melanda area seluas lebih dari 46.000 hektare, dengan potensi paparan terhadap lebih dari 8 juta penduduk. Sedangkan gempa bumi berisiko sedang namun dapat memengaruhi lebih dari 11 juta jiwa. Secara kumulatif, bencana-bencana ini membentuk matriks ancaman yang saling beririsan dengan isu sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan, dan ketimpangan antarwilayah.

Sementara itu, kebakaran wilayah perkotaan sebagai bencana non-alam juga menunjukkan pola distribusi risiko yang merata di seluruh wilayah administratif Jakarta. Tidak ada satu wilayah pun yang dapat dikatakan bebas dari potensi kebakaran. Dengan kata lain, seluruh sistem pelayanan sosial—baik di Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, maupun Kepulauan Seribu—harus siap menghadapi skenario kedaruratan secara simultan dan berlapis.

Implikasi strategis terhadap Dinas Sosial sangat signifikan, mencakup tiga ranah utama:

- a. Penguatan Sistem Layanan Tanggap Darurat: Dibutuhkan peningkatan kapasitas logistik, penyiapan shelter yang layak, serta penguatan SDM tanggap bencana. Penanganan pengungsi dalam jumlah besar, sebagaimana terjadi pada 2024, memerlukan koordinasi lintas sektor yang cepat dan solid.
- b. Pemanfaatan Teknologi dan Data Spasial: Untuk menghindari respons yang lambat dan tidak tepat sasaran, Dinas Sosial perlu memanfaatkan data spasial berbasis geografi dan demografi untuk memetakan potensi lonjakan permintaan layanan sosial di titik-titik rawan.
- c. Integrasi Sistem Bantuan Sosial dengan Kebijakan Mitigasi: Desain program bantuan harus bersifat preventif dan adaptif. Misalnya, pembangunan shelter tahan banjir, penyaluran bantuan berbasis digital real-time, serta pelibatan masyarakat dalam sistem peringatan dini.

Seluruh realitas ini menuntut transformasi menyeluruh strategi pelayanan sosial. Peran Dinas Sosial tidak lagi cukup jika hanya bersifat reaktif. Sebaliknya, pendekatan yang dibutuhkan adalah proaktif, prediktif, dan terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah. Dinas Sosial harus menjadi pilar utama dalam membangun ketangguhan sosial, tidak hanya merespons dampak bencana, tetapi juga menciptakan kapasitas adaptasi jangka panjang di tengah kondisi urbanisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.

2.2.2 Rumusan Isu Strategis

Rumusan isu strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai bentuk respons kebijakan terhadap kompleksitas tantangan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah perkotaan dengan karakteristik megapolitan. Jakarta, yang tengah diarahkan menjadi kota global, menghadapi tuntutan ganda: di satu sisi, memperkuat daya saing ekonomi dan konektivitas internasional; di sisi lain, memastikan inklusi dan keberlanjutan sosial bagi seluruh penduduknya, termasuk kelompok rentan. Oleh karena itu, perumusan isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2025–2029 tidak bisa berhenti pada pembacaan permasalahan aktual semata, tetapi juga harus bersandar pada pemahaman menyeluruh terhadap arah pembangunan nasional, dinamika global, serta potensi dan kelembagaan sosial lokal yang dimiliki Jakarta.

Proses perumusannya mengadopsi pendekatan triangulasi kebijakan, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber perencanaan strategis dan dokumen normatif seperti RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Sosial, RPJMD DKI Jakarta 2025–2029, dan KLHS RPJMD. Tak kalah penting, rumusan ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dijamin selama periode 2020–2024, termasuk suara komunitas penyandang disabilitas, lansia, anak-anak jalanan, serta kelompok miskin perkotaan. Prosedur perencanaan ini sejalan dengan arahan teknokratik sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, Inmendagri No. 2 Tahun 2025, dan SE Bappeda No. e-0014/SE/2025 tentang penyusunan Renstra perangkat daerah.

Dalam kerangka itu, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi lima kelompok pertimbangan utama sebagai dasar dalam merumuskan isu-isu strategis:

1. Potensi Daerah dan Kewenangan Dinas Sosial

Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat ekonomi, pemerintahan, dan budaya, Provinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan struktural dalam infrastruktur kelembagaan sosial yang relatif lebih lengkap dan terorganisasi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keberadaan aktor-aktor seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) membentuk tulang punggung dari sistem pelayanan sosial yang ada. Aktor-aktor ini bukan hanya simbol kehadiran negara di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi penghubung penting antara warga dan program perlindungan sosial yang dikelola pemerintah.

Keunggulan ini seharusnya dapat menjadi leverage utama bagi Dinas Sosial dalam memperluas cakupan layanan, mempercepat respons terhadap situasi darurat seperti bencana dan krisis sosial, serta memperkuat jejaring kolaboratif antara pemerintah dan komunitas lokal. Dalam konteks kota megapolitan seperti Jakarta—yang menghadapi kompleksitas sosial tinggi, mobilitas penduduk yang dinamis, serta risiko bencana yang terus meningkat—kemampuan untuk mengaktifkan jaringan kelembagaan sosial secara cepat dan adaptif menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Namun demikian, potensi struktural tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Evaluasi internal menunjukkan bahwa banyak LKS dan PSM masih beroperasi dengan kapasitas yang terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, akses pelatihan, dukungan anggaran, maupun keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan. Banyak dari lembaga ini masih diposisikan sebagai pelaksana teknis semata, bukan sebagai mitra strategis yang setara dalam siklus kebijakan publik. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara desain program sosial yang dibuat secara top-down dan realitas lapangan yang dihadapi para aktor lokal.

Kondisi ini menandakan pentingnya transformasi peran kelembagaan sosial, dari sekadar “agen distribusi bantuan” menjadi elemen vital dalam governance kesejahteraan sosial yang partisipatif dan berbasis data. Ekosistem kelembagaan sosial perlu dikembangkan lebih jauh menjadi sistem yang terintegrasi, dengan tata kelola yang akuntabel, mekanisme koordinasi yang jelas, serta sistem penguatan kapasitas yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penguatan kelembagaan sosial juga harus diarahkan pada perluasan fungsi-fungsi promotif dan preventif. Di tengah meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, peran aktor sosial lokal sangat strategis untuk mendeteksi potensi kerentanan sejak dini, melakukan intervensi berbasis komunitas, serta mendorong pemberdayaan warga yang berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan yang konsisten dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi, insentif berbasis kinerja, serta integrasi mereka ke dalam sistem informasi layanan sosial digital yang sedang dikembangkan.

Dengan demikian, potensi daerah yang dimiliki Jakarta dalam bentuk kelembagaan sosial harus dipandang bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai instrumen utama dalam membangun ketahanan sosial kota. Dinas Sosial perlu mereformulasi kebijakan dan alokasi sumber daya agar mampu menjadikan LKS, PSM, TSKS, dan Tagana bukan hanya sebagai mitra teknis, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil, tangguh, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jakarta.

2. Isu Strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 menggarisbawahi urgensi transformasi pendekatan pembangunan dari yang bersifat sektoral dan eksklusif, menuju pendekatan yang inklusif, adaptif, dan tangguh terhadap risiko sosial serta lingkungan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memainkan peran strategis sebagai pilar ketahanan sosial yang mampu mengurangi kerentanan struktural masyarakat perkotaan terhadap bencana, tekanan lingkungan, dan krisis sosial.

KLHS menempatkan Dinas Sosial sebagai salah satu aktor utama dalam mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Relevansi peran ini tercermin dalam tiga mandat strategis:

- A. Penyediaan layanan sosial adaptif terhadap risiko bencana dan krisis iklim:**
Lonjakan bencana hidrometeorologis, seperti banjir dan cuaca ekstrem, menuntut layanan sosial yang mampu bertransformasi dari sekadar tanggap darurat menjadi sistem proteksi jangka panjang. Dinas Sosial perlu mengembangkan sistem shelter komunal berbasis prediksi spasial, serta layanan bantuan sosial real-time berbasis digital.
- B. Menjamin inklusi sosial bagi kelompok marginal dalam proses pembangunan:**
KLHS menyoroti perlunya pengarusutamaan kelompok rentan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas, lansia tanpa pendamping, anak jalanan, dan kelompok miskin ekstrem memiliki akses yang setara terhadap program-program perlindungan dan pemberdayaan.
- C. Pembangunan berbasis komunitas di wilayah rawan kemiskinan dan bencana:**
Pemetaan kawasan rawan sosial dan lingkungan yang dilakukan dalam KLHS menunjukkan konsentrasi kerentanan di daerah-daerah seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian wilayah Jakarta Timur. Dinas Sosial harus mendorong penguatan komunitas lokal melalui pendekatan kewilayahan, pelibatan LKS dan PSM, serta integrasi dengan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, KLHS menegaskan bahwa tantangan lingkungan dan sosial di Jakarta tidak dapat dipisahkan, dan justru saling memperkuat. Oleh sebab itu, Dinas Sosial perlu

memposisikan diri sebagai institusi strategis dalam menghubungkan agenda sosial dan lingkungan secara simultan.

3. Lingkungan Dinamis

Konteks global, nasional, dan regional memberikan tekanan tambahan bagi Dinas Sosial untuk bertransformasi. Isu strategis dari lingkungan dinamis ini menjadi penting untuk diantisipasi melalui kebijakan yang responsif, terukur, dan progresif:

- A. **Global:** Jakarta tengah bersaing langsung dengan kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur dan Bangkok, yang telah lebih maju dalam hal integrasi sistem perlindungan sosial dan infrastruktur layanan dasar. Indeks kesejahteraan sosial Jakarta, terutama dalam dimensi inklusi sosial dan akses layanan bagi kelompok marjinal, masih tertinggal. Ini menunjukkan perlunya akselerasi reformasi perlindungan sosial berbasis big data dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif.
- B. **Nasional:** RPJMN 2025–2029 menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2027. Selain itu, terdapat dorongan besar untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat digital, adaptif, dan responsif terhadap siklus kehidupan. Hal ini menuntut Dinas Sosial Jakarta untuk tidak hanya menyesuaikan sistemnya, tetapi juga menjadi pelopor dalam penerapan perlindungan sosial berbasis Artificial Intelligence (AI), geospasial, dan interoperabilitas data lintas sektor.
- C. **Regional (DKI Jakarta):** Ketimpangan kesejahteraan sosial masih mencolok di dalam wilayah administrasi Jakarta. Data BPS 2024 menunjukkan kesenjangan IPM antara Jakarta Selatan (86,71) dan Kepulauan Seribu (75,91), mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak. Selain itu, prevalensi lansia tanpa pendamping, penyandang disabilitas berat, serta pengemis dan gelandangan masih tinggi di kawasan-kawasan padat penduduk. Ketimpangan spasial ini memerlukan pendekatan layanan sosial yang bersifat kontekstual dan berbasis lokalitas.

4. Isu Strategis Dinas Sosial

Rumusan isu strategis internal Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggambarkan tantangan struktural dan fungsional yang harus segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Empat isu utama berikut merupakan hasil identifikasi dari analisis evaluatif terhadap pelaksanaan Renstra 2020–2024, hasil penjarangan aspirasi publik, serta kajian kebijakan nasional dan regional. Keempat isu ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas, jangkauan, dan relevansi pelayanan sosial di Jakarta dalam menghadapi tantangan perkotaan dan globalisasi yang kian kompleks.

A. Kesenjangan Akses dan Ketimpangan Layanan Sosial

Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial secara administratif memang menunjukkan capaian yang impresif dengan angka 100% selama tiga tahun terakhir. Namun, capaian tersebut belum menggambarkan kondisi lapangan secara utuh. Ketika dilihat dari aspek spasial, justru muncul kesenjangan akses yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau secara sosial-ekonomi sangat rentan, seperti Kepulauan Seribu, kawasan padat penduduk di Jakarta Utara dan Barat, serta permukiman informal yang tidak terdata secara administratif.

Ketimpangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi struktural. Keterbatasan akses terhadap layanan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan, memunculkan risiko invisibilitas sosial, yaitu kelompok yang eksistensinya tidak tercermin dalam sistem pelayanan publik. Ketidaksesuaian antara data kinerja dan kondisi faktual di lapangan menandakan perlunya reformulasi sistem pelayanan sosial. Pendekatan berbasis wilayah, dengan unit layanan aktif hingga tingkat kelurahan, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin hak sosial warga secara adil dan menyeluruh.

Dalam rangka memastikan akses pelayanan yang lebih inklusif, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari dan membutuhkan perawatan khusus, Dinas Sosial perlu memperkuat tata kelola layanan yang mendukung peningkatan kemandirian peran keluarga. Upaya ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan kesejahteraan bagi warga, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai pendamping utama dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan psikososial bagi anggota keluarganya yang membutuhkan perawatan khusus.

Dalam kolaborasi lintas sektor bagi warga dengan ketergantungan berat, arah kebijakan Dinas Sosial memperkuat dukungan sosial berbasis rumah sebagai pelengkap upaya perawatan yang telah berjalan dalam pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Fokusnya adalah memastikan warga tetap terhubung dengan layanan yang dibutuhkan serta menjaga peran keluarga dalam keberlangsungan dukungan sehari-hari. Melalui sinergi antarpemangku kepentingan, keberlanjutan dukungan di rumah dapat lebih terjaga sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang menyeluruh.

B. Ketergantungan Pada Pola Pelayanan Institusional yang Tidak Fleksibel

Selama beberapa dekade, layanan rehabilitasi sosial di Jakarta masih sangat bergantung pada model institusional, yakni pelayanan berbasis panti. Meskipun model ini memiliki dasar hukum dan telah berkontribusi terhadap penanganan kelompok rentan, efektivitasnya semakin diragukan di tengah dinamika sosial perkotaan yang cepat berubah. Banyak panti yang saat ini beroperasi di Jakarta berdiri sejak puluhan

tahun lalu, dan belum pernah mengalami revitalisasi besar. Kondisi fisik panti yang tidak layak, sebagian dalam kategori “tidak baik”, menciptakan keterbatasan ruang dan layanan bagi warga binaan yang justru memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan personal.

Model panti juga bersifat sentralistik dan birokratis, sehingga tidak mampu merespons lonjakan kasus mendesak, seperti peningkatan jumlah orang terlantar pasca-pandemi, ODGJ tanpa keluarga, atau lansia tanpa pengasuh. Model pelayanan seperti ini tidak memiliki fleksibilitas untuk menjangkau secara langsung wilayah-wilayah kritis. Oleh karena itu, transformasi ke arah pendekatan berbasis komunitas dan kewilayahan menjadi sangat penting. Dinas Sosial harus mulai mendorong pengembangan shelter transisi, layanan sosial kelurahan, dan kolaborasi lokal sebagai strategi penguatan pelayanan yang relevan dan terukur.

C. Lemahnya Sistem Data Sosial dan Monitoring Outcome

Permasalahan data sosial masih menjadi akar dari banyak kesalahan kebijakan dan inefisiensi program di Jakarta. Basis data kesejahteraan sosial nasional yang selama ini menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial masih bersifat administratif dan tidak cukup mencerminkan dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara real-time. Akibatnya, inclusion error (penerima bantuan yang tidak berhak) dan exclusion error (pihak yang layak tapi tidak menerima bantuan) masih sering terjadi.

Di sisi lain, belum tersedia sistem monitoring jangka panjang (longitudinal tracking) yang dapat melacak perjalanan penerima manfaat pasca-program. Tanpa sistem ini, sulit menilai sejauh mana program sosial berdampak terhadap perubahan kesejahteraan, atau apakah penerima bantuan benar-benar telah keluar dari lingkaran kemiskinan. Proses “graduasi” dari program bantuan sosial pun menjadi formalitas, tanpa ada pengukuran berbasis bukti. Maka, pembangunan sistem informasi sosial yang prediktif, terintegrasi, dan berbasis spasial menjadi prioritas penting untuk menjamin efektivitas program di masa depan.

D. Fragmentasi Tata Kelola dan Minimnya Kolaborasi Lintas Sektor

Pelayanan sosial di wilayah urban seperti Jakarta tidak dapat berjalan dalam silo sektoral. Kompleksitas masalah sosial mengharuskan adanya integrasi antarpelaku: pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, hingga warga komunitas. Namun, pada kenyataannya, kolaborasi di antara aktor-aktor ini masih terfragmentasi. Pembagian peran antara Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan relawan sosial seperti PSM belum memiliki pola koordinasi yang sistematis.

Minimnya platform kolaboratif, integrasi data, serta keterbatasan penguatan kapasitas kelembagaan membuat banyak intervensi sosial tidak tepat sasaran atau tumpang tindih. Padahal, pendekatan berbasis multipihak terbukti lebih efisien dan inklusif dalam menjawab permasalahan kompleks di tingkat akar rumput. Ke depan, perlu dibangun mekanisme tata kelola kolaboratif berbasis wilayah, dengan sistem akuntabilitas yang transparan dan digital. Dengan cara ini, pelayanan sosial bisa dijalankan lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata.

Keempat isu strategis ini saling terkait dan menuntut transformasi menyeluruh dalam manajemen pelayanan sosial. Dinas Sosial perlu berpindah dari pola kerja administratif menuju institusi kebijakan yang inovatif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, Dinas Sosial dapat menjadi aktor kunci dalam menciptakan ketahanan sosial Jakarta sebagai kota global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial	Permasalahan Dinas Sosial	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Sosial	Isu Lingkungan Dinamis Global / Nasional / Regional	Isu Strategis Dinas Sosial
Ketersediaan sumber daya kelembagaan pelayanan sosial (panti, shelter, SDM, relawan)	Ketimpangan spasial akses layanan sosial dan belum adanya titik layanan minimal di setiap kelurahan	Ketimpangan wilayah pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan dasar inklusif	Urbanisasi cepat, kemiskinan baru di perkotaan, tekanan migrasi musiman	Kesenjangan akses dan ketimpangan layanan sosial berbasis wilayah
Ketersediaan program bantuan sosial dan pemberdayaan yang masif melalui APBD	Ketergantungan terhadap pola bantuan dan panti, tanpa strategi graduasi berkelanjutan	Kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin perkotaan	Transformasi sistem jaminan sosial nasional dan tuntutan efektivitas bansos	Ketergantungan pada pola pelayanan institusional yang tidak fleksibel
Jaringan kelembagaan sosial yang kuat (TKSK, PSM, LKS, Karang Taruna)	Fragmentasi peran antar aktor sosial dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor	Penguatan ketahanan komunitas terhadap risiko sosial dan lingkungan	Tuntutan partisipasi masyarakat sipil dan kolaborasi lintas sektor	Fragmentasi tata kelola dan minimnya kolaborasi lintas aktor sosial
Ketersediaan sistem digital layanan sosial	Sistem data tidak terintegrasi dan belum prediktif terhadap dinamika sosial	Digitalisasi layanan dan peningkatan kapasitas sistem informasi	Perkembangan AI dan big data dalam pelayanan publik	Lemahnya sistem data sosial dan monitoring outcome program

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Penyusunan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan sosial yang terjadi, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Proses ini dilakukan untuk menjawab arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2025–2029, serta memastikan keselarasan dengan RPJPD, RPJMN, dan kebijakan teknis lainnya seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017, Inmendagri No. 2 Tahun 2025, dan Surat Edaran Bappeda No. e-0014/SE/2025.

Pemilihan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada serangkaian pertimbangan strategis sebagai berikut:

A. Potensi Daerah dan Kewenangan Dinas Sosial

Jakarta memiliki sumber daya kelembagaan dan jaringan sosial yang luas dalam layanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial menjadi ujung tombak dalam mengoptimalkan potensi ini melalui penguatan kelembagaan seperti TAGANA, TKSK, LKS, PSM, dan unit-unit layanan sosial lainnya.

B. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Beberapa tantangan besar masih dihadapi, antara lain ketimpangan sosial, kemiskinan ekstrem, kurang optimalnya pemberdayaan komunitas kelompok rentan seperti kelompok disabilitas dan lansia, hingga keterbatasan akurasi data sosial dan sistem graduasi penerima manfaat yang belum berjalan maksimal.

C. Isu Strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS menyoroti pentingnya pendekatan inklusif, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan sosial dalam pembangunan kota global seperti Jakarta. Isu-isu ini sangat relevan dengan tugas pokok Dinas Sosial, terutama dalam perencanaan intervensi sosial jangka menengah.

D. Lingkungan Dinamis

1. Global: Jakarta merupakan salah satu kota global yang bersaing dengan kota-kota besar lain di Asia Tenggara seperti Bangkok dan Singapura. Dalam aspek kesejahteraan sosial, indeks kesejahteraan personal warga Jakarta masih perlu dioptimalkan.

2. Nasional: Kemiskinan ekstrem nasional sebesar 0,83% masih menjadi tantangan besar. Jakarta berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,35% pada Maret 2024, namun upaya eliminasi menyeluruh masih harus dilanjutkan agar pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara optimal.
3. Regional: Masih terdapat ketimpangan antarkawasan serta tingginya angka disabilitas yang belum memiliki aksesibilitas sesuai kebutuhan, lansia tanpa pendamping, dan kelompok miskin di perkotaan.

E. Isu Strategis Dinas Sosial

1. Kesenjangan akses dan ketimpangan layanan sosial
2. Ketergantungan pada pola pelayanan institusional yang tidak fleksibel
3. Lemahnya sistem data sosial dan monitoring outcome
4. Fragmentasi tata kelola dan minimnya kolaborasi lintas aktor kesejahteraan sosial

Berdasarkan keseluruhan pemetaan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Sosial adalah terwujudnya kehidupan yang layak dan bermartabat kelompok rentan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu, sasarannya diarahkan pada meningkatkan fungsi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dari tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan menjawab visi-misi RPJMD serta menjembatani kebutuhan riil masyarakat Jakarta dalam menghadapi tantangan sosial perkotaan.

Dalam rangka menjamin keselarasan arah pembangunan sosial Jakarta dengan dokumen induk RPJMD, Rencana Strategis Dinas Sosial telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan kolaboratif. Konsep strategis ini tidak hanya menekankan pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga pada kebermaknaan dan keberlanjutan layanan sosial. Secara rinci, kerangka renstra yang mengaitkan tujuan-sasaran-program dan subkegiatan telah disajikan dalam bagan yang mencerminkan keterkaitan langsung dengan misi RPJMD: “*Mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata*”, yang diturunkan ke dalam sasaran RPJMD berupa “Tercapainya inklusivitas sumber daya pembangunan dan penghidupan yang layak”, yang dijawab melalui tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial.

Dalam hal mengaitkan berbagai topik tersebut, maka terbentuk konsep renstra Dinas Sosial yang sudah mengadopsi berbagai hal dalam RPJMD. Secara detail, konsep dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

mandiri. Melalui tujuan ini, Dinas Sosial berupaya membangun tatanan layanan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi darurat atau temporer, tetapi juga mendorong keberdayaan sosial dalam jangka panjang.

Tabel 3.1 Tujuan Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Sosial 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Kehidupan yang Layak dan Bermartabat Kelompok Rentan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas 2. Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia 3. Persentase (%) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang Tergraduasi

Secara substansi, tujuan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif menjadi pendekatan pembangunan sosial yang partisipatif dan transformatif. Artinya, Dinas Sosial tidak hanya memberikan layanan dasar, tetapi juga menciptakan ruang untuk pemulihan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok sasaran. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui integrasi layanan yang terkoordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pelaku sosial, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Adapun indikator dari tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah:

1. Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas

Indikator ini mencerminkan derajat kesejahteraan penyandang disabilitas yang dinilai dari aksesibilitas terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, pelatihan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peningkatan indeks ini akan menunjukkan bahwa program yang dijalankan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan bebas stigma terhadap disabilitas.

2. Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia

Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan lansia di Provinsi DKI Jakarta telah terpenuhi, baik dari aspek kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan, tempat tinggal, maupun keterlibatan sosial. Indeks ini juga mencerminkan efektivitas layanan sosial yang ditujukan bagi lansia, termasuk dalam aspek rehabilitasi sosial, layanan pendampingan, dan akses terhadap bantuan sosial reguler maupun insidental.

3. Persentase (%) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang Tergraduasi

Indikator ini mengukur proporsi penerima bantuan sosial yang telah mampu keluar dari status ketergantungan dan beralih menjadi individu atau keluarga yang mandiri secara sosial dan ekonomi. “Graduasi” ini merupakan hasil akhir dari proses pemberdayaan dan

pendampingan sosial yang berhasil, dan menjadi tolok ukur penting keberhasilan intervensi sosial yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan transformatif.

3.1.2 Sasaran detail Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial

Penetapan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 dilakukan untuk memastikan arah pembangunan bidang sosial selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan nasional. Sasaran strategis ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, sekaligus menjadi panduan dalam menyusun indikator kinerja yang terukur. Setiap sasaran disertai indikator yang relevan, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara obyektif dan berkesinambungan.

Tabel berikut menyajikan sasaran strategis beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program selama periode perencanaan.

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Sosial 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Peranan Sosial 2. Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sasaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029 adalah *meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*. Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam menjalani kehidupan yang produktif, aman, dan bermartabat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, fakir miskin, korban kekerasan, dan lainnya.

Fungsi sosial mencakup kemampuan seseorang atau kelompok untuk berperan dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, dan berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosialnya. Dinas Sosial bertugas tidak hanya untuk menanggulangi permasalahan sosial secara langsung, tetapi juga memastikan bahwa individu yang menjadi penerima layanan sosial mampu kembali berfungsi secara utuh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sasaran ini menjadi kunci keberlanjutan dari proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Adapun indikator dari sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial adalah:

1. Indeks Peranan Sosial

Indeks ini mencerminkan partisipasi sosial para penerima layanan kesejahteraan sosial dalam komunitasnya. Indikator ini menilai sejauh mana individu dapat kembali mengambil peran sebagai warga aktif dalam masyarakat, baik dalam bentuk kerja, kontribusi komunitas, atau interaksi sosial yang bermakna. Semakin tinggi indeks ini, maka semakin besar pula keberhasilan program pemberdayaan sosial. Tidak hanya menggambarkan partisipasi sosial para penerima layanan, indeks ini juga menggambarkan keberhasilan pilar sosial dalam

mendorong peranan dan partisipasi yang lebih aktif dan bermakna

2. Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok penerima layanan sosial telah mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas intervensi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjawab kebutuhan fundamental masyarakat.

Tabel berikut ini menyajikan informasi perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial 2025-2029.

Tabel 3.3 Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial 2025-2029

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun					Ket.
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Tercapainya Inklusivitas Sumber Daya Pembangunan dan Penghidupan yang Layak 2. Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Terwujudnya Kehidupan yang Layak dan Bermartabat Kelompok Rentan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas	48.83	50.85	52.87	54.89	56.74	
			Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia	68.34	71.17	74.00	76.83	79.42	
			Persentase (%) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang Tergraduasi	2.42	3.14	3.92	4.76	4.97	
		Meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Peranan Sosial	65.40	68.10	70.81	73.52	75.99	
			Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar	59.13	61.58	64.03	66.47	68.71	

3.2 Strategi Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

3.2.1 Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 disusun secara bertahap, komprehensif, dan berbasis pada pendekatan siklus perencanaan yang berorientasi hasil. Proses ini dimulai dari tahap perancangan yang mencakup penyiapan dasar-dasar strategis, pemutakhiran data sosial, hingga penyusunan peta jalan (roadmap) sebagai landasan arah kebijakan. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh intervensi sosial yang dirancang dapat menjawab kebutuhan kelompok rentan secara kontekstual dan terukur. Selain perancangan internal, juga dilakukan perancangan untuk konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pemenuhan tujuan dan sasaran yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh Dinas Sosial, melainkan oleh kolaborasi erat dengan SKPD lainnya.

Setelah tahap perancangan, strategi dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan. Pada fase ini, Dinas Sosial memperkuat kapasitas pelaku sosial di lapangan, menyusun standar operasional prosedur (SOP), serta membangun mekanisme koordinasi dan integrasi lintas unit layanan. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan ekosistem kelembagaan dan operasional yang siap menjalankan intervensi sosial secara efektif dan efisien. Persiapan yang matang di tahap ini menentukan keberhasilan tahapan implementasi selanjutnya.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mulai menjalankan program-program strategis yang telah dirumuskan. Pelaksanaan tidak hanya berfokus pada eksekusi program, tetapi juga disertai pemantauan baseline untuk memastikan akurasi pelaporan dan penyesuaian cepat terhadap kondisi lapangan. Tahapan ini dilanjutkan dengan refleksi secara berkala melalui proses monitoring dan evaluasi capaian. Hasil dari refleksi akan digunakan dalam tahap pembenahan strategi, sehingga intervensi sosial dapat terus disesuaikan, diperkuat, dan disempurnakan. Refleksi strategi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari dan membutuhkan perawatan khusus dalam rangka meningkatkan kemandirian peran keluarga. Siklus strategi ini diakhiri dengan perumusan arah keberlanjutan di akhir periode rencana, sebagai dasar bagi fase kebijakan berikutnya.

3.2.2 Penjabaran tahapan

Lima tahapan strategi yang telah dirancang berlaku secara simultan, baik untuk tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, dengan alur yang berkesinambungan dari perancangan hingga keberlanjutan. Pada Tahap I, strategi diarahkan pada perancangan strategis serta penguatan infrastruktur, layanan dasar, dan fondasi kelembagaan. Di tahap ini dilakukan pemetaan permasalahan, pemutakhiran data sosial terpadu untuk meningkatkan validitas pemetaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penyusunan peta jalan sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas-SKPD untuk memastikan konsolidasi kebijakan berjalan searah. Pada saat yang

sama, penyusunan modul layanan juga dilakukan agar tersedia pedoman teknis sejak awal. Seluruh langkah ini bertujuan membangun pemahaman menyeluruh mengenai posisi awal serta kapasitas dasar yang akan menjadi pijakan dalam implementasi.

Tahap II menekankan pada persiapan konkret untuk implementasi. Persiapan tersebut mencakup penyusunan SOP program, penguatan kapasitas teknis pelaku layanan—termasuk TKSK, PSM, LKS, dan komunitas lokal—serta eksplorasi peluang dan inovasi pelayanan sosial. Dengan demikian, semua instrumen, regulasi, dan aktor berada dalam posisi siap untuk melaksanakan program secara konsisten sesuai pedoman.

Memasuki Tahap III, strategi masuk pada fase pelaksanaan awal. Implementasi dimulai dengan intervensi sosial, uji coba model pemberdayaan, penerapan mekanisme graduasi, serta pengumpulan data hasil awal atau baseline. Pada tahap ini pula praktik pelaksanaan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan sosial terus terjaga.

Berikutnya, Tahap IV berfokus pada refleksi dan penyesuaian. Refleksi dilakukan melalui evaluasi capaian program, analisis efektivitas intervensi, dan survei kepuasan penerima manfaat. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk menyusun arah perbaikan serta memastikan program berjalan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Terakhir, Tahap V diarahkan pada pembenahan dan keberlanjutan. Pada tahap ini dilakukan reformulasi arah strategi berdasarkan hasil refleksi, peningkatan efektivitas model layanan, serta perancangan program pasca-renstra untuk menjamin kesinambungan pelayanan sosial. Dengan pendekatan bertahap yang sistematis ini, Dinas Sosial memastikan setiap langkah dalam perencanaan maupun pelaksanaan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif, konsisten, dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Lima Penahapan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Perancangan strategis dan penguatan infrastruktur, layanan dasar, dan fondasi; B. Pemutakhiran data sosial terpadu untuk peningkatan validitas pemetaan pemerlu pelayanan sosial;	A. Persiapan implementasi; B. Penyusunan SOP; C. Penguatan kapasitas pelaku layanan. D. Eksplorasi peluang dan inovasi pelayanan sosial	A. Pelaksanaan awal; B. Dimulainya intervensi sosial dan C. Praktik pelaksanaan berkelanjutan untuk kualitas pelayanan sosial	A. Refleksi dan penyesuaian; B. Evaluasi capaian program dan arah perbaikan.	A. Pembenahan dan keberlanjutan; B. Reformulasi arah strategi; C. Rancang program perbaikan pasca-renstra.

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. Penyusunan peta jalan sinkronisasi kebijakan. D. Koordinasi dan Kolaborasi dengan SKPD terkait E. Penyusunan modul				

3.3 Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang berasal dari berbagai penurunan kebijakan tingkat RPJMD yang dikaitkan dengan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang	(1) Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak (2) Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	(1) Penguatan dan optimalisasi program pemberdayaan sosial; (2) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial; (3) Pemenuhan perlindungan dna jaminan sosial; (4) Pelayanan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan (5) Optimalisasi pengelolaan taman makam pahlawan (6) Layanan dan penanganan terhadap korban bencana	

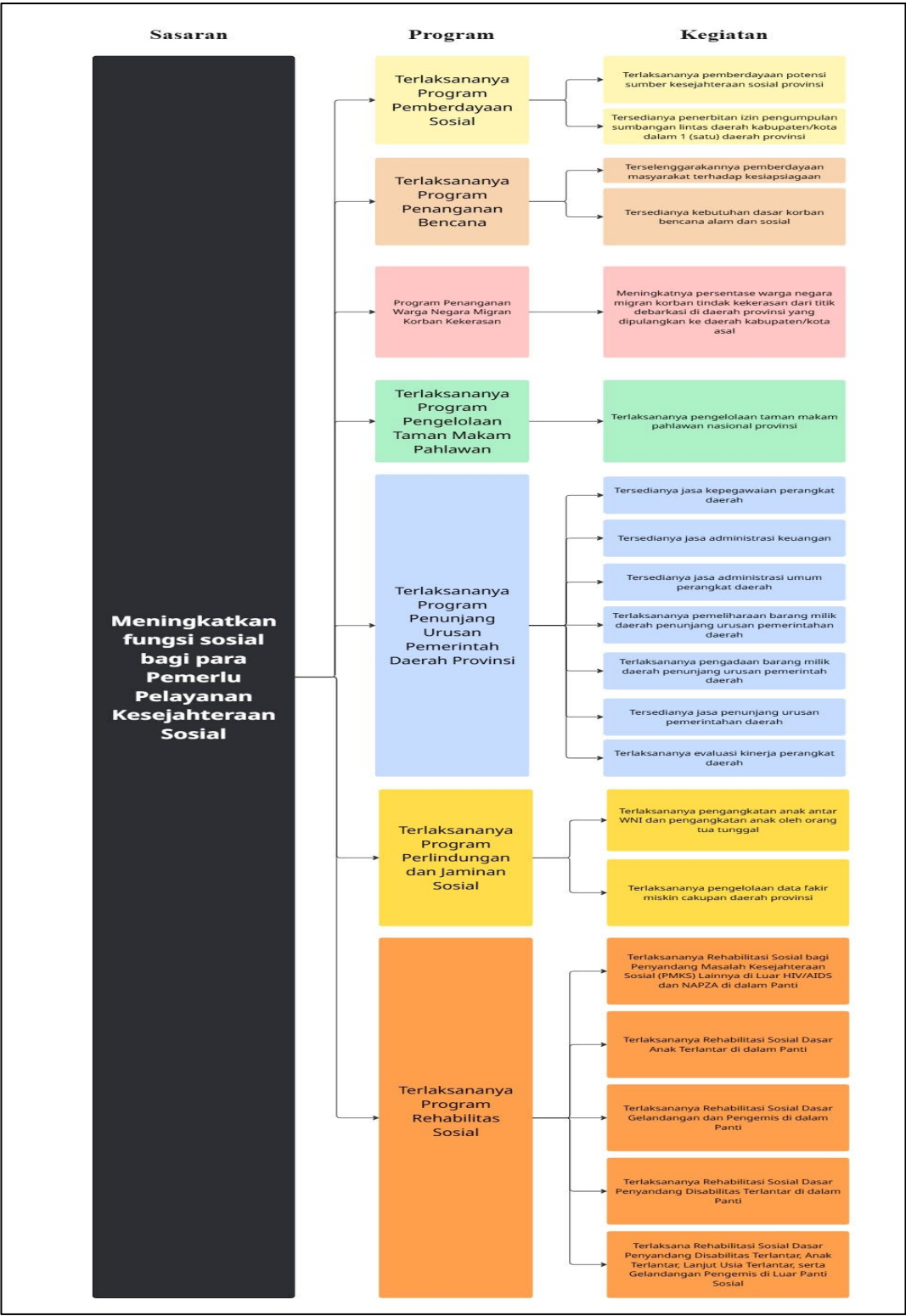
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sosial Di Daerah Provinsi Dan Didaerah Kab/Kota; (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial			

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

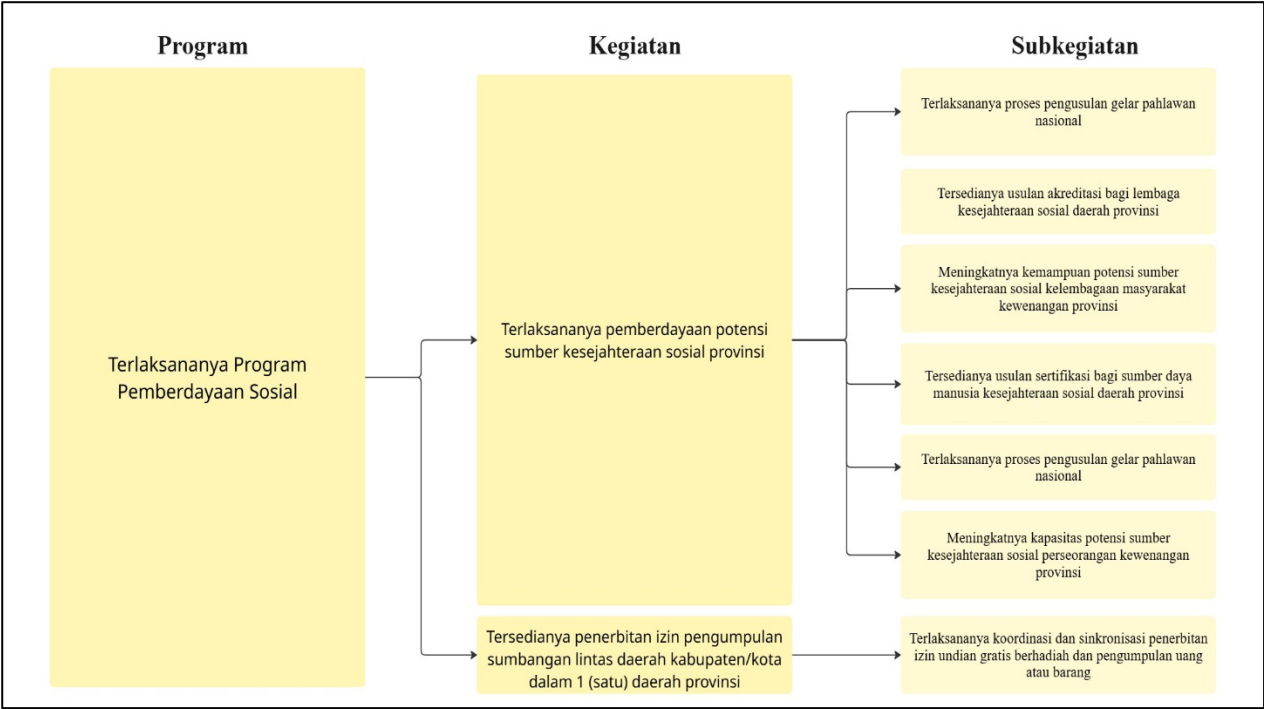
Penyusunan Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Untuk mengidentifikasi *outcome* dilakukan berdasarkan bukti (*evidence*) atau data yang andal dan valid. Identifikasi *outcome* juga terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi.
2. Tahap kedua setelah menetapkan *outcome*/hasil yang harus dicapai, yaitu mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) *outcome* I hasil terkait. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Untuk menentukan CSF, perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah, kemudian diterjemahkan menjadi kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai *outcome*. Proses penjabaran CSF dapat dilakukan dengan menggunakan gambar/diagram.
3. Tahap ketiga yaitu menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) kepada kondisi- kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/ideal. CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabarannya sama seperti ketika mengidentifikasi *key success factor* dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian *outcome*. Penjelasan dan turunan dari CSF dapat dilihat di lampiran Renstra
4. Tahap keempat yaitu melengkapi setiap variable dengan indikatornya masing- masing. Indicator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program

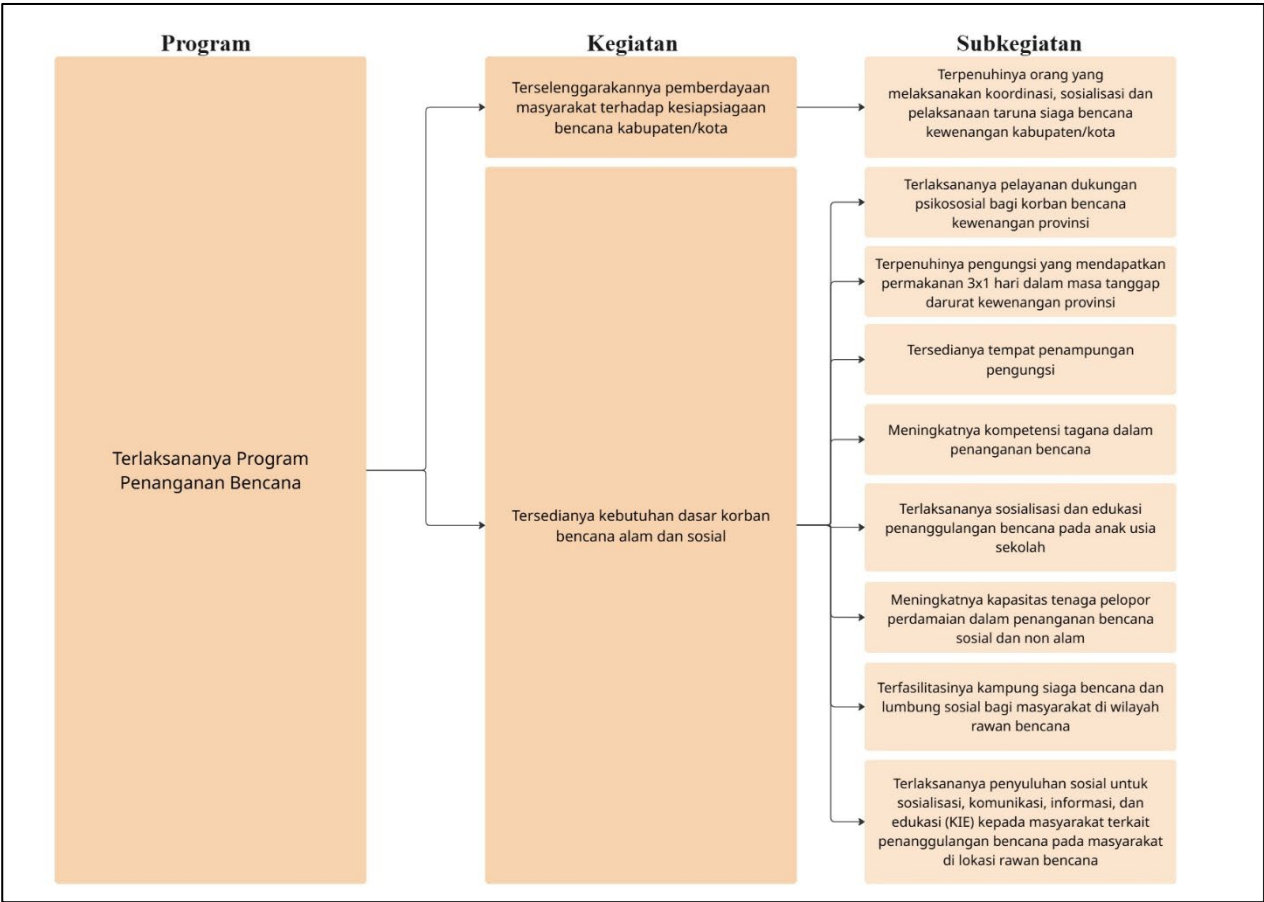
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur. Indikator yang baik yaitu indicator yang memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound*.



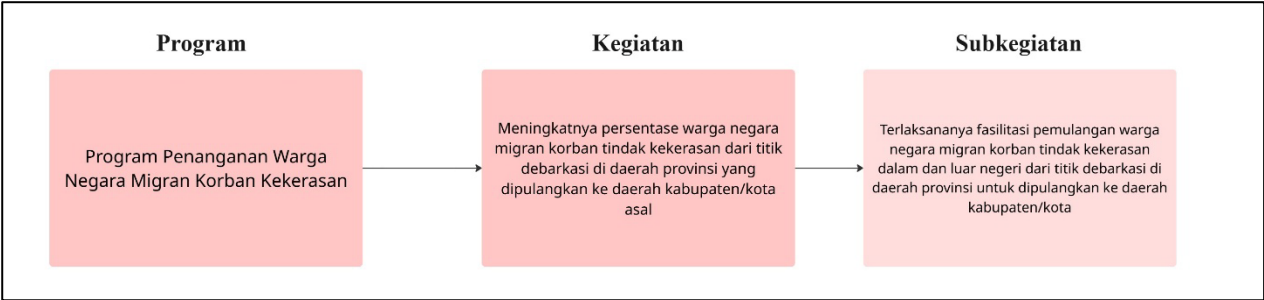
Gambar 3.2a Pohon Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



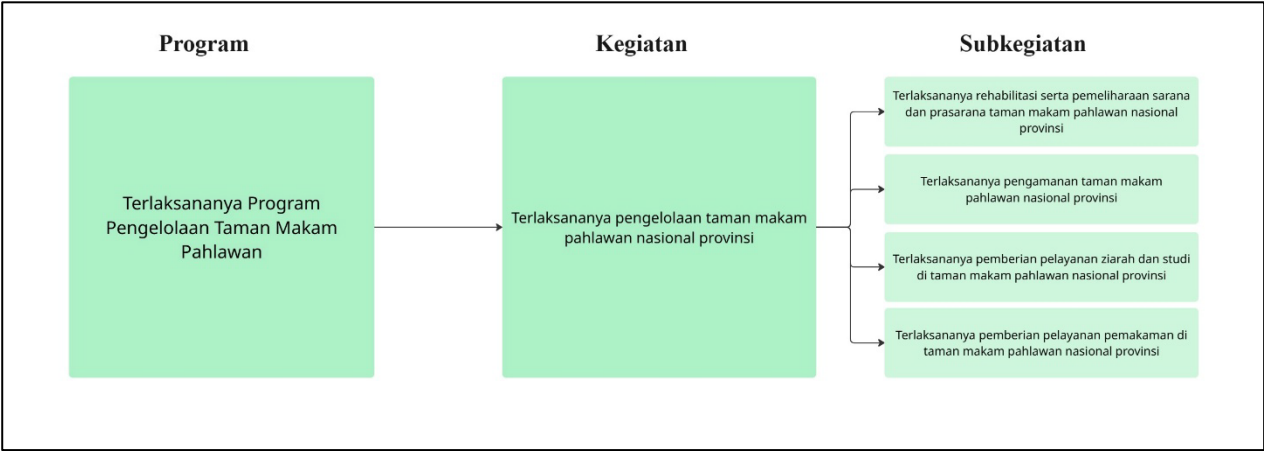
Gambar 3.3b Pohon Kinerja Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



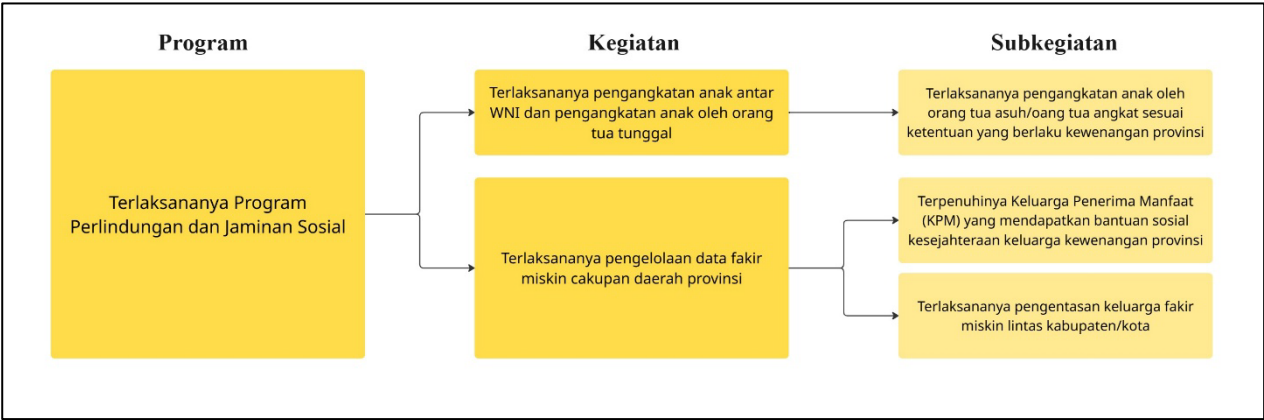
Gambar 3.4c Pohon Kinerja Program Penanganan Bencana, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



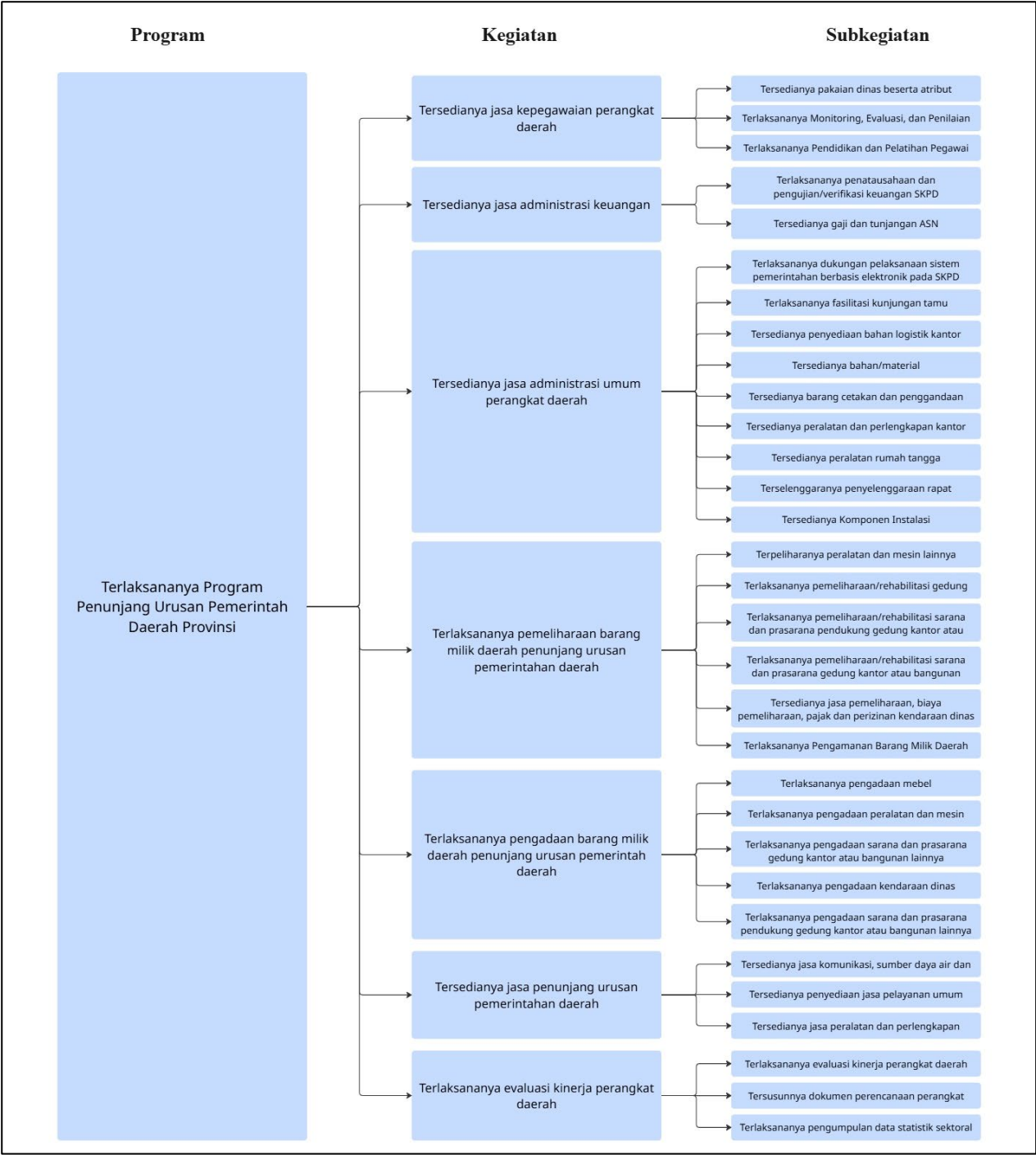
Gambar 3.5d Pohon Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



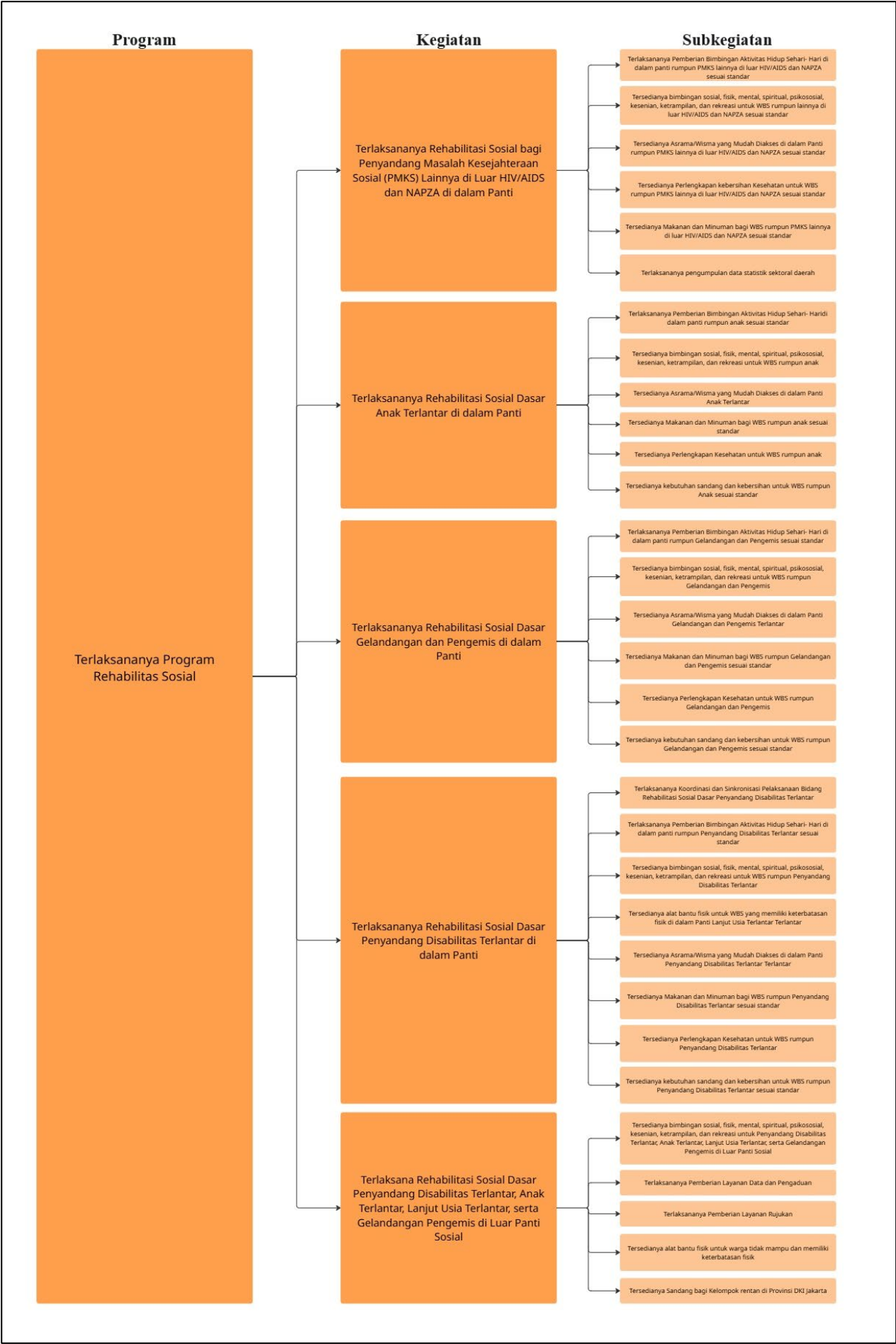
Gambar 3.6e Pohon Kinerja Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.7f Pohon Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.8g Pohon Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.9h Pohon Kinerja Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada bagian ini akan dibahas mengenai uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.1 Uraian Program

Pada tahun 2026, Dinas Sosial melaksanakan enam program utama yang mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, ketangguhan masyarakat, dan tata kelola kelembagaan yang adaptif dan responsif.

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas aktor-aktor sosial seperti PSM, TKSK, Karang Taruna, dan LKS melalui pelatihan, sertifikasi, serta dukungan ekonomi untuk kelompok rentan. Program ini juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan graduasi penerima bantuan sosial menuju kemandirian, dengan target potensi SDM kesejahteraan sosial mampu menjalankan peran pemberdayaan.

2. Program Penanganan Bencana

Program ini berfokus pada menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi. Melalui penguatan peran TAGANA, fasilitasi Kampung Siaga Bencana, pelatihan mitigasi bagi anak sekolah, hingga penyediaan layanan psikososial dan logistik darurat, program ini diarahkan mencapai pemenuhan 100% standar pelayanan minimal (SPM) di bidang bencana.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

Program ini bertujuan meningkatkan layanan perlindungan bagi WNI migran korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi, melalui fasilitasi pemulangan dari titik debarkasi di provinsi ke daerah asal. Layanan mencakup identifikasi dan asesmen korban, penyediaan kebutuhan dasar, dukungan psikososial awal, serta rujukan ke lembaga lanjutan sesuai Permensos No. 8 Tahun 2023. Target dari penanganan warga negara migran adalah memastikan seluruh korban yang terdata mendapat penanganan dan pemulangan

secara aman dan layak.

4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Program ini merupakan upaya menjaga kelayakan sarana penghormatan dan edukasi nilai kebangsaan. Kegiatan mencakup pemeliharaan sarana, pengamanan area, dan fasilitasi kegiatan ziarah maupun edukasi publik. Target dari pengelolaan taman makam pahlawan adalah menjamin pengelolaan TMP sesuai standar.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan memenuhi kebutuhan layanan penunjang kantor, kepegawaian, sarana, dan prasarana aparatur sesuai standar sehingga mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keberhasilan program diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (agregat dari beberapa indeks layanan: administrasi umum, jasa penunjang, administrasi keuangan, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang), termasuk monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.

6. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan gelandangan, melalui pendekatan panti dan berbasis komunitas. Program ini meliputi pelatihan life skills, layanan permakanan, bimbingan psikososial, pemberian alat bantu, serta monitoring keberfungsian sosial, dengan standar pencapaian rehabilitasi sosial yang memenuhi 100% indikator SPM. Selain itu, untuk memastikan bahwa panti dapat mendorong keterampilan warga binaan dan memberikan kenyamanan dan keamanan, juga akan dilakukan fokus renovasi kepada seluruh panti yang disesuaikan dengan pelaksanaannya dengan pembagian anggaran. Terakhir, layanan tidak hanya berfokus pada di dalam panti, tetapi juga kepada sasaran di luar panti dengan berbagai kegiatan turunan untuk menunjang pelayanan yang optimal

7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini ditujukan untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada kelompok sasaran secara tepat. Kegiatan meliputi pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan seperti KLJ, KAJ, KPDJ, hingga dukungan pengembangan ekonomi (UEP/KUBE). Program ini menekankan validitas data dan efektivitas penyaluran, dengan target seluruh bantuan sosial tepat sasaran.

4.2 Uraian Kegiatan

Setiap program dijabarkan menjadi beberapa kegiatan utama, yang kemudian dipecah menjadi subkegiatan operasional. Setiap subkegiatan dirancang untuk menghasilkan output terukur yang berkontribusi pada outcome program dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan serta RPJMD dan IKU/IKK Dinas Sosial DKI Jakarta.

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Meningkatkan kapasitas PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS, dan potensi sosial lainnya melalui pelatihan, pendampingan kelembagaan, fasilitasi akreditasi, dan sertifikasi kompetensi, sehingga mampu memberikan layanan dan pemberdayaan kepada masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Memproses, menerbitkan, dan mengawasi izin kegiatan pengumpulan sumbangan yang melibatkan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi, untuk memastikan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan akuntabel.

2. Program Penanganan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna tanggap darurat. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana, unsur penanganan bencana turut diberdayakan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Beberapa unsur penanganan bencana diantaranya: kampung siaga bencana (KSB), Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, termasuk permakanan, sandang, tempat penampungan sementara, dukungan psikososial, dan layanan rujukan sesuai kebutuhan.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal. Kegiatan ini mencakup memfasilitasi penanganan dalam bentuk layanan awal yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) migran yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan berbasis eksploitasi saat berada di luar negeri atau dalam proses kepulangan. Layanan yang dimaksud mencakup: (1) identifikasi dan asesmen, (2) penyediaan kebutuhan dasar (sandang, pangan, tempat tinggal sementara), (3) dukungan psikososial awal, (4) hingga rujukan ke lembaga lanjutan. Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, terutama untuk korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan darurat

4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh TMPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dikelola sesuai standar kelayakan fisik, pemeliharaan rutin, dan nilai kepatutan sebagai bentuk penghormatan negara. Pengelolaan mencakup perawatan sarana dan prasarana, pengamanan area makam, serta penyediaan layanan ziarah, upacara kenegaraan, dan kegiatan edukasi untuk pelestarian nilai-nilai perjuangan. Pelaksanaan program ini mengacu pada ketentuan Permensos Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur peruntukan TMPN sebagai lokasi pemakaman pahlawan nasional.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi kepegawaian perangkat daerah adalah pelayanan kepegawaian yang bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kantor secara umum yang dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya meliputi penyediaan logistik dan

rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, rapat koordinasi, fasilitasi kunjungan tamu, dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan lain sebagainya.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Barang Milik Daerah didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Aktivitas pemeliharaan barang milik daerah diantaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi pengadaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, gedung kantor atau bangunan lainnya, dan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mendukung operasional kantor yang meliputi penyediaan jasa surat menyurat; jasa kebersihan dan keamanan serta jasa perorangan lainnya.

7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan oleh perangkat daerah secara tepat waktu.

6. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui layanan yang komprehensif di dalam panti dan luar panti. Layanan ini mencakup pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, keterampilan, dan rekreasi sesuai standar pelayanan. Selain itu, program memastikan tersedianya fasilitas asrama atau wisma yang mudah diakses, perlengkapan kebersihan dan kesehatan, makanan dan minuman bergizi, serta kebutuhan sandang yang memadai bagi warga binaan sosial pada layanan rehabilitasi sosial dalam panti maupun penerima manfaat pada layanan rehabilitasi sosial luar panti. Seluruh layanan diberikan secara terpadu untuk mendukung pemulihan kondisi, pengembangan potensi, serta kemandirian warga binaan dan penerima manfaat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial

7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah seluruh upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko yang timbul akibat guncangan dan kerentanan sosial. Sementara itu, jaminan sosial merupakan skema yang dilembagakan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemberian perlindungan dan jaminan sosial diberikan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Penentuan penerima program perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.

Proses masuknya data ke dalam DTSEN dilakukan melalui tahapan verifikasi, validasi, serta mekanisme usul-sanggah yang memungkinkan masyarakat memberikan koreksi. Penetapan ketepatan sasaran penerima manfaat mengacu pad:

- a. Hasil integrasi dan pemadanan data dari berbagai sumber ke dalam DTSEN.
- b. Hasil musyawarah di tingkat kelurahan/desa yang kemudian divalidasi oleh pendamping sosial atau aparat sesuai prosedur.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi lapangan terhadap penerima layanan pada tahun berjalan oleh pendamping sosial, perangkat daerah, dan instansi terkait.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Anak yang mendapatkan orang tua asuh atau pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak Pasal 13. Kegiatan ini mencakup pemrosesan permohonan pengangkatan anak sesuai peraturan perundangan, termasuk asesmen kelayakan, pendampingan, serta pembinaan pasca-pengangkatan.

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Penerima manfaat merupakan seluruh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima bantuan sosial maupun bantuan pengembangan ekonomi. Bantuan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan program lainnya sesuai peraturan gubernur yang berlaku. Bantuan pengembangan ekonomi diberikan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Kegiatan ini mencakup pemutakhiran dan verifikasi data fakir miskin serta orang tidak mampu, guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Subbab ini memuat uraian subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program sesuai dengan mandat urusan pemerintahan bidang sosial. Setiap subkegiatan dirancang untuk menjawab isu strategis, memenuhi target kinerja, serta mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Rincian subkegiatan disajikan dalam tabel berikut, yang memuat keterkaitan dengan NPSK dan sasaran RPJMD, tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada periode 2025–2029. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran masing-masing subkegiatan dalam mendukung kinerja perangkat daerah secara terukur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2025-2030

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial							
	Terwujudnya Kehidupan yang Layak dan Bermartabat Kelompok Rentan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial						
		Meningkatkan fungsi sosial bagi para					

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial					
			Terlaksananya program pemberdayaan sosial		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	(1) Program Pembedayaan Sosial	
			Terlaksananya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan	(1.1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Meningkatnya kemampuan potensi pekerja sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	(1.1.1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat kewenangan provinsi			
				Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	(1.1.2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya usulan akreditasi bagi lembaga kesejahteraan sosial daerah provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	(1.1.3) Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
				Meningkatnya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial	(1.1.4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		
				Tersedianya usulan sertifikasi bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial daerah provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	(1.1.5) Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
				Terlaksananya proses pengusulan gelar pahlawan nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	(1.1.6) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertif	
				Terlaksananya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan di provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	(1.1.7) Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persentase Kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang sesuai dengan Ketentuan	(1.2) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	(1.2.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Terlaksananya program penanganan bencana		Indeks pencapaian spm penanganan bencana	(2) Program Penanganan Bencana	
				Terselenggarakannya pemberdayaan masyarakat terhadap	Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam	(2.1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		
				Terpenuhinya orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	(2.1.1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Tersedianya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	(2.2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
				Terlaksananya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan provinsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	(2.2.1) Pelayanan Dukungan Psikososial	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya pengungsi yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	(2.2.2) Penyediaan Permakanan	
				Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana pengungsi yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan provinsi	(2.2.3) Penyediaan Sandang	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi	(2.2.4) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Meningkatnya kompetensi tagana dalam penanganan bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan peningkatan kompetensi	(2.2.5) Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
				Terlaksananya sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanggulangan bencana pada lokasi rawan bencana	(2.2.6) Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	(2.2.7) Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya kampung siaga bencana dan lumbung sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	(2.2.8) Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
				Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	(2.2.9) Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	(3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	
				Meningkatnya persentase warga negara	Persentase warga negara migran korban tindak	(3.1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi yang dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi yang dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
				Terlaksananya fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	(3.1.1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Terlaksananya program pengelolaan taman makam pahlawan		Persentase TMN dan MPN yang dikelola sesuai standar yang ditetapkan	(4) Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah taman makam pahlawan provinsi yang dikelola sesuai standar	(4.1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi	(4.1.1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi	(4.1.2) Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Terlaksananya pemberian pelayanan ziarah dan studi di taman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah orang yang diberikan pelayanan ziarah dan studi di taman makam pahlawan nasional provinsi	(4.1.3) Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di taman makam pahlawan nasional provinsi	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di taman makam pahlawan nasional provinsi	(4.1.4) Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	(5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
				Tersedianya jasa kepegawaian perangkat daerah	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	(5.1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	(5.1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(5.1.2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Penilaian Kinerja Pegawai		Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(5.1.3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya jasa administrasi keuangan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	(5.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	(5.2.1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	(5.2.2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa administrasi umum perangkat daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	(5.3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	(5.3.1) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	(5.3.2) Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	(5.3.3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	(5.3.4) Penyediaan Bahan/Material	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	(5.3.5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	(5.3.6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	(5.3.7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Terselenggaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(5.3.8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(5.3.9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	(5.4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				urusan pemerintahan daerah			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	(5.4.1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(5.4.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(5.4.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(5.4.4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kantor atau bangunan lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	(5.4.5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(5.4.6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah	(5.5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	(5.5.1) Pengadaan Mebel	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	(5.5.2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	(5.5.3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	(5.5.4) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	(5.5.5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(5.6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	(5.6.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	(5.6.2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	(5.6.3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	(5.7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kinerja perangkat daerah tepat waktu		
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	(5.71.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	(5.7.2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	(5.7.3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Terlaksananya program perlindungan dan jaminan sosial		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	(6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Terlaksananya pengangkatan anak antar	Persentase anak yang mendapatkan orang tua	(6.1) Pengangkatan Anak antar WNI dan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wni dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	asuh/angkat sesuai ketentuan	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	(6.1.1) Pengangkatan Anak antar WNI	
				Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi	(6.2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	(6.2.1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan provinsi			
				Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin lintas kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas kabupaten/kota	(6.2.2) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	(7) Program Rehabilitas Sosial	
				Terlaksana Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase capaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	(7.1) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	(7.1.1) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Hari di dalam panti rumpun PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar			
				Tersedianya bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, ketrampilan, dan rekreasi untuk WBS rumpun lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	(7.1.2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
				Tersedianya Asrama/Wisma yang Mudah Diakses di dalam Panti rumpun PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	(7.1.3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Perlengkapan kebersihan Kesehatan untuk WBS rumpun PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	(7.1.4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS rumpun PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	(7.1.5) Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya kebutuhan sandang untuk WBS rumpun PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	(7.1.6) Penyediaan Sandang	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksana Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti	(7.2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di dalam panti rumpun anak sesuai standar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	(7.2.1) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Tersedianya bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, ketrampilan, dan rekreasi untuk WBS rumpun Anak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	(7.2.2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Tersedianya Asrama/Wisma yang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	(7.2.3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mudah Diakses di dalam Panti Anak Terlantar			
				Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS rumpun anak sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	(7.2.4) Penyediaan Makanan	
				Tersedianya Perlengkapan Kesehatan untuk WBS rumpun anak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	(7.2.5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Tersedianya kebutuhan sandang dan kebersihan untuk WBS rumpun Anak sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	(7.2.6) Penyediaan Sandang	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	(7.2.7) Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
				Terlaksana Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti	(7.3) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di dalam panti rumpun Gelandangan dan Pengemis sesuai standar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	(7.3.1) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, ketrampilan, dan rekreasi untuk WBS rumpun Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	(7.3.2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
				Tersedianya Asrama/Wisma yang Mudah Diakses di dalam Panti Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	(7.3.3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
				Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS rumpun Gelandangan dan Pengemis sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	(7.3.4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Tersedianya Perlengkapan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	(7.3.5) Penyediaan Permakanan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk WBS rumpun Gelandangan dan Pengemis	Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
				Tersedianya kebutuhan sandang dan kebersihan untuk WBS rumpun Gelandangan dan Pengemis sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	(7.3.6) Penyediaan Sandang	
				Terlaksana Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	(7.4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	(7.4.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di dalam panti rumpun Penyandang Disabilitas Terlantar sesuai standar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	(7.4.2) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Tersedianya bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, ketrampilan, dan rekreasi untuk WBS rumpun Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	(7.4.3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Tersedianya alat bantu fisik untuk WBS yang memiliki keterbatasan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	(7.4.4) Penyediaan Alat Bantu	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fisik di dalam Panti Lanjut Usia Terlantar Terlantar	Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
				Tersedianya Asrama/Wisma yang Mudah Diakses di dalam Panti Penyandang Disabilitas Terlantar Terlantar	Tersedianya Asrama/Wisma yang Mudah Diakses di dalam Panti Penyandang Disabilitas Terlantar Terlantar	(7.4.5) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
				Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS rumpun Penyandang Disabilitas Terlantar sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	(7.4.6) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Tersedianya Perlengkapan Kesehatan untuk WBS rumpun Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	(7.4.7) Penyediaan Permakanan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Minimal Kewenangan Provinsi		
				Tersedianya kebutuhan sandang dan kebersihan untuk WBS rumpun Penyandang Disabilitas Terlantar sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	(7.4.8) Penyediaan Sandang	
				Terlaksana Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	(7.5) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Tersedianya bimbingan sosial, fisik, mental, spiritual, psikososial, kesenian, ketrampilan,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	(7.5.1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan rekreasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	(7.5.2) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	(7.5.3) Pemberian Layanan Rujukan	
				Tersedianya alat bantu fisik untuk warga tidak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	(7.5.4) Penyediaan Alat Bantu	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mampu dan memiliki keterbatasan fisik	Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Tersedianya Sandang bagi Kelompok rentan di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	(7.5.5) Penyediaan Sandang	

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Pemberdayaan Sosial			Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	84	19.844.811.463	84	19.902.158.276	85	20.487.231.475	85	21.109.860.925	86	21.763.621.847
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan	62	19.750.980.783	63	19.816.897.688	64	20.397.707.858	65	21.015.861.127	66	21.664.922.059
		Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	30	75.760.520	30	85.260.588	30	89.523.617	30	93.999.798	30	98.699.788
		Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	0	-	50	12.600.000	50	13.230.000	50	13.891.500	50	14.586.075
		Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	0	-	100	12.600.000	100	13.230.000	100	13.891.500	100	14.586.075
		Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	0	-	1	367.945.204	1	386.342.464	1	405.659.588	1	425.942.567

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	3.007	18.134.277.768	2.908	18.469.444.279	2.908	18.996.943.064	2.908	19.552.120.716	2.908	20.135.057.252
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.047	1.540.942.495	2.668	869.047.617	2.668	898.438.713	2.668	936.298.025	2.668	976.050.302
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang sesuai dengan Ketentuan	100	93.830.680	100	85.260.588	100	89.523.617	100	93.999.798	100	98.699.788
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	93.830.680	12	85.260.588	12	89.523.617	12	93.999.798	12	98.699.788

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Penanganan Bencana			Indeks Pencapaian SPM Bencana	100	45.396.596.220	100	45.057.887.874	100	55.495.728.084	100	61.949.461.176	100	67.113.059.959
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	100	6.952.938.794	100	6.804.999.120	100	7.712.262.143	100	8.356.977.277	100	9.069.954.623
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.289	6.952.938.794	1.389	6.804.999.120	1.489	7.712.262.143	1.589	8.356.977.277	1.689	9.069.954.623
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100	38.443.657.426	100	38.252.888.754	100	47.783.465.941	100	53.592.483.899	100	58.043.105.336
		Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	-	91	1.318.493.860	91	1.516.267.939	91	1.743.708.130	91	2.005.264.349
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	720	441.313.824	720	213.872.972	720	399.382.928	720	399.382.928	720	399.382.928

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Psikososial Kewenangan Provinsi										
		Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	-	42	72.450.000	42	83.317.500	42	95.815.125	42	110.187.394
		Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	-	850	1.328.440.173	950	1.527.706.199	1.100	1.756.862.129	1.200	2.020.391.448
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	198.300	12.966.240.546	212.100	13.039.304.513	215.100	15.160.353.804	218.100	16.433.934.527	220.600	17.749.906.551
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	22.350	23.655.782.016	212.100	21.501.818.052	215.100	28.213.305.009	218.100	31.276.509.060	220.600	34.690.301.652
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	500	1.380.321.040	50	697.489.184	50	802.112.562	50	1.805.252.000	50	922.429.446

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	0	-	30	81.020.000	60	81.020.000	90	81.020.000	120	145.241.568
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Difasilitasi	0	0	100	28.774.496	100	28.774.496	100	28.774.496	100	28.774.496
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100	0	100	28.774.496	100	28.774.496	100	28.774.496	100	28.774.496

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0	-	4	28.774.496	4	28.774.496	4	28.774.496	4	28.774.496
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase TMPN dan MPN yang dikelola sesuai standar yang ditetapkan	0	0	0	0	100	1.217.872.482	100	1.294.516.106	100	1.359.291.912
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah Taman Makam Pahlawan Provinsi yang Dikelola Sesuai Standar	0	0	0	0	1	1.217.872.482	1	1.294.516.106	1	1.359.291.912
		Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	-	0	-	2	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	-	0	-	50	4.013.100	50	4.213.755	50	4.424.443
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	-	0	-	0	-	2	5.000.000	6	5.500.000

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	-	0	-	12	1.208.859.382	12	1.269.302.351	12	1.332.767.469
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	-	0	-	0	-	1	6.000.000	1	6.600.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	444.276.485.307	4	441.178.367.389	4	471.612.701.544	4	486.790.842.372	4	528.078.815.315
			Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	4		4		4		4		4	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	4	76.359.147	4	80.177.105	4	84.185.960	4	88.395.258
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	10	76.359.147	10	80.177.105	10	84.185.960	10	88.395.258
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4	4.371.804.877	4	4.961.862.956	4	5.727.497.181	4	5.688.657.830	4	6.524.041.766

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	1	96.525.000	1	101.351.250	1	106.418.813	1	111.739.753
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	310	405.325.254	310	425.591.517	310	446.871.093	310	469.214.647
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118	4.371.804.877	30	4.460.012.702	30	5.200.554.414	30	5.135.367.924	30	5.943.087.366
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	4	248.608.222.872	4	250.643.690.831	4	265.721.128.293	4	284.123.077.633	4	303.865.417.323
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121	245.360.000	30	270.016.635	30	281.074.000	30	294.137.900	30	306.396.588
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	593	248.362.862.872	593	250.373.674.196	593	265.440.054.293	593	283.828.939.733	593	303.559.020.735
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4	22.698.586.983	4	21.455.262.159	4	26.433.210.382	4	28.318.327.979	4	29.847.095.202
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	2.811.959.971	8	2.065.068.480	8	2.395.173.444	8	2.438.659.652	8	2.573.886.989
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9	226.109.680	17	231.619.536	17	230.068.286	17	233.190.723	17	236.469.282

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	336.629.560	14	318.247.622	14	358.798.142	14	397.115.807	14	430.661.488
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	36	3.294.457.196	72	3.580.368.842	72	3.760.600.205	72	4.105.816.032	72	4.355.959.630
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	178.862.901	13	154.515.502	13	159.108.810	13	169.669.836	13	181.857.736
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	31	1.931.686.874	31	2.028.271.218	31	2.129.684.779	31	2.236.169.018
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73	3.312.763.922	143	3.705.750.635	141	3.447.227.418	140	3.726.149.499	140	3.947.398.407
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	54	8.944.979.888	111	8.908.293.668	111	9.826.073.644	111	10.598.088.154	111	11.101.255.944
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	3.592.823.865	57	559.711.000	57	4.227.889.215	57	4.519.953.497	57	4.783.436.708
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan	4	55.542.525.358	4	27.225.478.615	4	70.919.994.527	4	60.493.205.397	4	72.995.409.785

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	725.940.108	57	1.074.527.945	57	1.066.988.555	57	1.146.046.683	57	1.226.880.014
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55	47.777.155.037	46	18.747.900.289	44	61.520.526.923	43	50.297.550.036	43	62.123.827.581
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	219	1.409.749.577	410	1.612.393.627	410	2.058.821.920	410	2.160.388.733	410	2.270.034.223
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	578	911.440.656	1.165	977.794.532	1.149	1.114.783.895	1.165	1.245.312.471	1.149	1.338.023.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	4.718.239.980	340	4.812.862.222	340	5.158.873.234	340	5.643.907.474	340	6.036.644.767
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah	4	54.419.341.695	4	76.849.033.178	4	34.756.360.607	4	35.461.170.930	4	37.014.691.259

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	99	24.172.766.576	34	52.506.007.965	30	410.431.169	30	439.161.351	30	469.902.646
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	10.108.598.528	22	12.554.931.475	22	15.033.300.031	22	16.335.868.023	22	16.854.912.211
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.213	17.481.938.229	1.517	10.883.772.665	1.634	18.319.161.536	1.477	17.559.704.861	1.427	18.412.233.615
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	514	2.656.038.362	533	876.751.240	533	978.219.223	533	1.110.120.641	533	1.260.184.610
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	10	27.569.833	10	15.248.648	10	16.316.054	10	17.458.177
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	57.969.953.522	4	58.985.230.503	4	66.180.684.449	4	70.763.886.103	4	75.816.392.293
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	372	15.168.750.937	372	15.277.207.884	372	16.598.595.768	372	17.634.003.426	372	18.821.517.921
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324	40.986.407.445	324	41.658.781.640	324	47.380.269.777	324	50.802.029.039	324	54.523.754.080

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	124	1.814.795.140	124	2.049.240.979	124	2.201.818.904	124	2.327.853.638	124	2.471.120.292
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	666.050.000	100	981.450.000	100	1.793.649.000	100	1.858.330.540	100	1.927.372.429
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	151.250.000	1	151.500.000	1	313.087.500	1	324.416.125	1	336.537.754
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	-	1	159.390.000	1	167.359.500	1	175.727.475	1	184.513.849
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	514.800.000	2	670.560.000	2	1.313.202.000	2	1.358.186.940	2	1.406.320.826
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	100	862.641.576.443	100	861.103.670.662	100	863.999.572.792	100	863.999.572.792	100	867.040.270.029
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Persentase Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Angkat sesuai Ketentuan	100	6.700.000	100	6.700.000	100	6.700.000	100	6.700.000	100	6.700.000

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20	6.700.000	20	6.700.000	20	6.700.000	20	6.700.000	20	6.700.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi	100	862.634.876.443	100	861.096.970.662	100	863.992.872.792	100	863.992.872.792	100	867.033.570.029
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.787	4.179.539.765	1.817	564.852.775	1.933	564.852.775	2.060	564.852.775	2.200	564.852.775
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	219.252	802.462.320.000	219.252	802.462.320.000	219.252	802.462.320.000	219.252	802.462.320.000	219.252	802.462.320.000
		Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	0	-	855	977.819.842	855	1.026.710.834	855	1.078.046.375	855	1.131.948.694
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	6	55.993.016.678	6	57.091.978.045	6	59.938.989.183	6	59.887.653.642	6	62.874.448.560

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Rehabilitasi Sosial			Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	100	370.469.265.981	100	460.743.906.681	100	433.351.058.459	100	450.408.348.638	100	430.241.434.472
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	100	10.907.883.400	100	12.605.266.700	100	12.898.982.083	100	13.654.516.735	100	14.531.454.945
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Persentase capaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	100		100		100		100		100	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270	3.517.443.504	270	3.859.578.254	270	3.952.535.160	0	4.189.345.128	270	4.440.230.784

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270	1.098.419.885	270	1.164.603.243	270	874.667.510	270	910.125.253	270	1.013.551.544
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	270	350.312.144	270	369.600.000	270	356.160.000	270	377.529.600	270	400.181.376
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270	56.398.859	270	69.376.620	270	105.110.393	270	110.824.568	270	126.360.704
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	290	4.841.700.512	270	5.338.046.917	270	6.151.025.729	270	6.501.800.588	270	6.892.340.982
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	290	1.043.608.496	270	1.804.061.666	270	1.459.483.291	270	1.564.891.598	270	1.658.789.555
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti	100	44.747.135.805	100	156.790.521.701	100	73.565.630.699	100	73.250.299.092	100	66.095.241.229
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100		100		100		100		100	

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Terlantar di dalam Panti		bagi anak terlantar di dalam panti										
		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	15	151.804.704	15	151.755.285	15	151.755.285	15	151.755.285	15	151.755.285
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	820	12.770.650.323	870	13.210.625.627	870	14.812.237.489	870	15.774.927.974	870	16.803.449.787
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	820	4.951.032.429	870	4.953.323.387	870	5.423.016.808	870	5.749.386.396	870	6.099.364.696
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	820	6.641.723.400	870	20.537.604.311	870	24.501.646.127	870	20.651.275.795	870	10.676.920.290
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	820	207.389.119	870	231.046.503	870	253.787.419	870	273.161.650	870	294.115.926
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	820	14.796.199.344	870	15.498.903.495	870	17.590.260.733	870	18.437.324.419	870	19.444.686.225
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	820	5.228.336.486	870	102.207.263.093	870	10.832.926.838	870	12.212.467.573	870	12.624.949.020

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi										
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti	100	42.246.154.579	100	42.223.333.907	100	62.200.180.017	100	65.961.023.076	100	70.054.951.917
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti	100		100		100		100		100	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.450	8.073.099.674	1.450	7.688.720.850	1.450	8.367.699.990	1.450	8.905.459.283	1.450	9.496.994.506
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.450	1.049.636.025	1.450	988.305.930	1.450	1.087.136.523	1.450	1.195.850.175	1.450	1.315.435.193
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.450	987.893.648	1.450	487.683.608	1.450	15.712.462.799	1.450	15.793.223.662	1.450	15.872.546.028
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	1.450	592.031.552	1.450	515.311.776	1.450	661.278.499	1.450	727.406.349	1.450	800.146.984

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.450	23.811.524.288	1.450	24.247.679.060	1.450	26.832.591.121	1.450	28.900.654.414	1.450	31.144.764.244
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.450	7.731.969.392	1.450	8.295.632.683	1.450	9.539.011.085	1.450	10.438.429.193	1.450	11.425.064.962
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	100	52.825.028.550	100	35.229.276.509	100	50.770.032.964	100	53.511.824.498	100	55.592.701.249
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	100		100		100		100		100	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.333	11.853.584.373	1.338	7.313.240.554	1.338	12.596.183.611	1.338	13.191.815.852	1.338	13.841.038.734
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.333	1.538.052.368	1.338	1.164.807.626	1.338	1.687.004.212	1.338	1.796.077.272	1.338	1.669.512.416
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	32	88.317.488	9	30.862.048	20	60.862.048	20	62.108.875	20	62.751.052

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi										
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.333	10.509.108.960	1.338	3.797.967.239	1.338	4.234.243.160	1.338	4.539.276.418	1.338	4.753.263.750
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.333	461.336.346	1.338	449.429.856	1.338	665.488.354	1.338	709.255.828	1.338	757.996.478
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.333	21.629.412.704	1.338	17.232.335.455	1.338	23.265.362.096	1.338	23.973.256.603	1.338	24.729.933.108
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.333	6.745.216.311	1.338	5.240.633.731	1.338	8.260.889.483	1.338	9.240.033.650	1.338	9.778.205.711
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100	151.314.444.011	100	152.471.692.971	100	169.252.978.553	100	175.426.208.272	100	151.148.347.740
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100		100		100		100		100	

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Terlantar di dalam Panti		bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3	1.636.539.692	0	-	0	-	0	-	0	-
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	3.875	25.750.105.617	3.875	27.401.231.584	3.875	27.315.442.742	3.875	28.539.304.871	3.875	29.817.076.065
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	3.875	4.407.772.417	3.875	4.881.652.609	3.875	5.177.758.611	3.875	5.678.574.340	3.875	5.998.396.584
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	122	359.488.864	116	328.538.344	116	327.252.301	116	328.976.108	116	330.786.104
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	3.130	34.394.445.167	3.875	24.905.036.779	3.875	35.202.306.574	3.875	35.513.083.116	3.875	3.701.298.615
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	3.875	1.378.838.821	3.875	1.116.570.229	3.875	1.445.456.455	3.875	1.564.728.744	3.875	1.655.323.113

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3.875	64.725.643.328	3.875	73.302.250.355	3.875	70.328.056.151	3.875	73.513.214.831	3.875	76.615.619.684
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	3.875	18.661.610.105	3.875	20.536.413.071	3.875	29.456.705.719	3.875	30.288.326.262	3.875	33.029.847.575
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	68.428.619.636	100	61.423.814.893	100	64.663.254.143	100	68.604.476.965	100	72.818.737.392
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100		100		100		100		100	

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	-	1.504	1.507.832.796	1.504	1.545.528.616	1.504	1.584.166.831	1.504	1.623.771.002
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	935	17.065.025.421	935	15.010.200.726	935	16.093.898.153	935	16.489.965.181	935	16.914.519.193
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	165	45.670.000	165	45.670.000	165	45.670.000	165	45.670.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	209.643.104	0	-	0	-	0	-	0	-
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.220	33.456.684.935	6.220	32.603.281.767	6.220	35.991.990.892	6.230	38.107.419.387	6.240	40.367.649.431

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.785	17.476.936.400	3.178	12.004.636.351	3.106	10.739.065.218	3.076	12.116.829.960	3.056	13.592.614.673
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	980	220.329.776	825	252.193.253	825	247.101.264	825	260.425.606	825	274.513.093

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung target dan sasaran dari Rencana Strategis PD tetapi juga menyasar kepada program prioritas pembangunan daerah DKI Jakarta 2025-2029.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya program rehabilitasi sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program ini mendukung capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
2	Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya program Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Program Pemberdayaan sosial khususnya pemberdayaan PSKS merupakan program yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan sosial yang mumpuni

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya program perlindungan dan jaminan sosial	1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Program perlindungan dan jaminan sosial menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki perlindungan dan jaminan sosial yang dibutuhkan
4	Program Penanganan Bencana	Terlaksananya program penanganan bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Program ini mendukung capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Adapun indikator kinerja utama Renstra Dinas Sosial yang detail adalah:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial Lansia	Indeks	68,34	71,17	74,00	76,83	79,42
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial Disabilitas	Indeks	48,83	50,85	52,87	54,89	56,74
3.	Persentase Penerima Bantuan Sosial Tergraduasi	Persentase	2,42	3,14	3,92	4,76	4,97
4.	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks	59,13	61,58	64,03	66,47	68,71
5	Indeks Peranan Sosial	Indeks	65,40	68,10	70,81	73,52	75,99

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun indikator kinerja kunci Renstra Dinas Sosial yang detail adalah:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	84	84,4	84,8	85,3	85,7
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan	Persen	62,45	63,31	64,18	65,07	65,96
3	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	30	30	30	30	30
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga	0	50	50	50	50
5	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang	0	100	100	100	100
6	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	0	1	1	1	1
7	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan	Lembaga	3.007	2.908	2.908	2.908	2.908

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Kapasitasnya Kewenangan Provinsi						
8	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2.047	2.668	2.668	2.668	2.668
9	Persentase Kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang sesuai dengan Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	12	12	12	12	12
11	Indeks Pencapaian SPM Bencana	Indeks	100	100	100	100	100
12	Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100
13	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.289	1.389	1.489	1.589	1.689
14	Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persen	100	100	100	100	100
15	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	0	91	91	91	91
16	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	720	720	720	720	720
17	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	0	42	42	42	42
18	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	850	950	1.100	1.200
19	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	198.300	212.100	215.100	218.100	220.600
20	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	22.350	212.100	215.100	218.100	220.600
21	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	500	50	50	50	50
22	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa	Orang	0	30	60	90	120

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
	sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan						
23	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Difasilitasi	Persen	0	100	100	100	100
24	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persen	100	100	100	100	100
25	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	4	4	4	4
26	Persentase TMPN dan MPN yang dikelola sesuai standar yang ditetapkan	Persen	0	0	100	100	100
27	Jumlah Taman Makam Pahlawan Provinsi yang Dikelola Sesuai Standar	Unit	0	0	1	1	1
28	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	0	0	2	4	4
29	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	0	0	50	50	50
30	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	0	0	0	2	6
31	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	0	0	12	12	12
32	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	1
33	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4
34	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	4	4	4	4	4
35	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	0	4	4	4	4
36	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	10	10	10	10
37	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	4	4	4	4	4

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
38	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	1	1	1
39	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	310	310	310	310
40	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	118	30	30	30	30
41	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	Indeks	4	4	4	4	4
42	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	121	30	30	30	30
43	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	593	593	593	593	593
44	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Indeks	4	4	4	4	4
45	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	8	8	8	8
46	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	9	17	17	17	17
47	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	14	14	14
48	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	36	72	72	72	72
49	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	13	13	13
50	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	31	31	31	31
51	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	73	143	141	140	140
52	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	54	111	111	111	111
53	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	57	57	57	57
54	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks	4	4	4	4	4
55	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	57	57	57	57
56	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	55	46	44	43	43
57	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	219	410	410	410	410
58	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	578	1.165	1.149	1.165	1.149

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
59	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	174	340	340	340	340
60	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah	Indeks	4	4	4	4	4
61	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	99	34	30	30	30
62	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	21	22	22	22	22
63	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.213	1.517	1.634	1.477	1.427
64	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	514	533	533	533	533
65	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10	10	10	10
66	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4
67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	372	372	372	372	372
68	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	324	324	324	324	324
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	124	124	124	124	124
70	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100
71	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1
72	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	1	1	1	1
73	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2
74	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	100	100	100	100	100
75	Persentase Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Angkat sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100
76	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
77	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi	Persen	100	100	100	100	100
78	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1.787	1.817	1.933	2.060	2.200
79	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	219.252	219.252	219.252	219.252	219.252
80	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	0	855	855	855	855
81	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	6	6	6	6	6
82	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	100	100	100	100	100
83	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
84	Persentase capaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
85	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	270	270	270	0	270
86	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	270	270	270	270	270
87	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	270	270	270	270	270
88	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	270	270	270	270	270
89	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	290	270	270	270	270
90	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	290	270	270	270	270
91	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
92	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
93	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15
94	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
95	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
96	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
97	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
98	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
99	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	820	870	870	870	870
100	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
101	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
102	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
103	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
104	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
105	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
106	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
107	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	Orang	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi						
108	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
109	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
110	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
111	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
112	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	32	9	20	20	20
113	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
114	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
115	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
116	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1.333	1.338	1.338	1.338	1.338
117	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
118	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100
119	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	3	0	0	0	0
120	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
121	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
122	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	Orang	122	116	116	116	116

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi						
123	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	3.130	3.875	3.875	3.875	3.875
124	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
125	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
126	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
127	Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100
128	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100
129	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	1.504	1.504	1.504	1.504
130	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	935	935	935	935	935
131	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	165	165	165	165
132	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	0	0	0	0
133	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6.220	6.220	6.220	6.230	6.240
134	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4.785	3.178	3.106	3.076	3.056
135	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	980	825	825	825	825

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Sosial dalam kurun waktu periode RPJMD berjalan. Dengan demikian unit utama dan unit kerja di lingkup Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Sosial. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB VI

LAMPIRAN

6.1

Critical Success Factor

Tabel 6.1 Tujuan Renstra dan Critical Success Factor

(Ultimate outcome) Tujuan Renstra	Kondisi akhir yang diharapkan di Renstra	Critical Success Factors (CSF)	(intermediate outcome) Sasaran renstra
Tercapainya inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak	Terbangunnya ekosistem pemberdayaan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, di mana potensi sosial masyarakat (PSKS) menjadi penggerak utama kesejahteraan berbasis komunitas.	1. Tersedianya data PSKS yang valid, terintegrasi lintas sektor, dan diperbarui berkala untuk mendukung perencanaan program. 2. Peningkatan kompetensi PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS melalui akreditasi dan sertifikasi agar berperan aktif sebagai agen pemberdayaan di tingkat lokal. 3. Penguatan kolaborasi lintas unsur (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, CSR) berbasis wilayah. 4. Penerapan SOP pemberdayaan sosial terstandar di seluruh kabupaten/kota. 5. Ketersediaan pembiayaan multi-sumber (APBD, APBN, CSR, dan inovatif) yang berkelanjutan.	Meningkatkan fungsi sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
	Terbangunnya masyarakat tangguh bencana dengan kesiapsiagaan tinggi, perlindungan sosial adaptif, dan sistem tanggap darurat yang cepat, tepat, dan inklusif.	1. Terlaksananya pendidikan dan simulasi kesiapsiagaan bencana yang terstruktur melalui Kampung Siaga Bencana, Tagana, dan PSKB di seluruh wilayah risiko tinggi. 2. Terbangunnya protokol penanganan darurat sosial yang terintegrasi dengan layanan perlindungan sosial. 3. Ketersediaan logistik dan shelter ramah kelompok rentan (perempuan, lansia, disabilitas, anak). 4. Tersedianya sistem monitoring cepat dan early warning berbasis indikator sosial-ekonomi daerah.	

	Terlaksananya sistem perlindungan terpadu bagi WNI migran korban kekerasan, dengan layanan cepat, aman, dan manusiawi mulai dari titik debarkasi hingga reintegrasi di daerah asal.	1. Tersedianya mekanisme asesmen cepat dan dukungan psikososial awal di seluruh titik debarkasi. 2. Terbangunnya rujukan dan layanan lanjutan terpadu antara provinsi dan tingkat kota/kabupaten. 3. Penguatan koordinasi lintas sektor (Dinsos, BP2MI, P2TP2A) untuk perlindungan berkelanjutan. 4. Pemanfaatan basis data korban dan eks-korban untuk pemantauan keberlanjutan reintegrasi.	
	Terjaminnya pengelolaan TMP yang terstandar, layak, dan berkelanjutan sebagai simbol penghormatan negara dan edukasi nilai perjuangan bagi masyarakat.	1. Tersedianya standar nasional pengelolaan TMP yang mencakup aspek fisik, pemeliharaan, dan nilai kepatutan. 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola TMP melalui pelatihan rutin dan SOP pemeliharaan terpadu. 3. Pemanfaatan TMP sebagai sarana edukasi dan pelestarian nilai kebangsaan melalui kegiatan ziarah, upacara, dan program edukatif publik.	
	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, mendukung seluruh urusan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik berbasis digital.	1. Penguatan sistem kepegawaian dan keuangan berbasis kinerja (SPBE) untuk mempercepat layanan publik. 2. Optimalisasi pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana yang ramah lingkungan dan efisien energi. 3. Implementasi manajemen aset dan logistik daerah berbasis data terpadu. 4. Penguatan kapasitas ASN dan budaya kerja adaptif digital.	

	Meningkatnya kualitas dan akses layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS, baik di dalam maupun di luar panti, menuju kemandirian dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.	1. Tersedianya standar pelayanan rehabilitasi sosial terpadu (fisik, psikososial, spiritual) di seluruh unit layanan. 2. Peningkatan akses fasilitas dan sarana pendukung yang layak dan inklusif. 3. Penguatan kapasitas tenaga rehabilitasi dan pendamping sosial melalui pelatihan berjenjang. 4. Monitoring graduasi penerima manfaat berbasis multidimensi untuk mencegah <i>fallback</i>.	
	Terwujudnya sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).	1. Pemutakhiran DTSEN secara berkala dan terpadan dengan data kependudukan. 2. Peningkatan akurasi verifikasi dan validasi penerima manfaat melalui mekanisme <i>usul-sanggah</i> dan musyawarah kelurahan. 3. Penguatan perlindungan sosial adaptif berbasis data real-time untuk merespons krisis dan guncangan sosial. 4. Pemantauan longitudinal eks-penerima manfaat (18–36 bulan) guna memastikan keberlanjutan kemandirian.	